

**EKSISTENSI RUMAH PELANGI INDONESIA DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DASAR BAGI KELOMPOK
LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER
INTERSEKSUAL QUEER (LGBTIQ) DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)



Oleh:

Anggita Widya Rezanti

1706026052

**PRODI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Anggita Widya Rezanti

NIM : 1706026052

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan

Hak-Hak Dasar Bagi Kelompok Lesbian, Gay,

Biseksual, Interseksual dan Queer (LGBTIQ) di Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada sidang skripsi. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 April 2021

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis,

Bidang Substansi Materi,



Dr. H. Mochamad Parmudi, M. Si.

NIP. 196904252000031001



Ririh Megah Safitri, M. A.

NIP. 199209072019032018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

EKSISTENSI RUMAH PELANGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DASAR BAGI KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, GAY, TRANSGENDER, INTERSEKSUAL DAN QUEER (LGBTIQ) DI KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:

Anggita Widya Rezanti

1706026052

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 19 April 2021

dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Ahwan Fanani, M. Ag.

NIP. 196904252000031001

Sekretaris/Penguji II



Dr. H. Mochamad Parmudi, M. Si.

NIP. 197809302003121001

Penguji III



Nur Hasyim, M. A.

NIDN. 2023037303



Penguji IV



Akhriyadi Sofyan, M. A.

NIDN. 2022107903

Pembimbing I



Dr. H. Mochamad Parmudi, M. Si.

NIP. 196904252000031001

Pembimbing II



Ririh Megah Safitri, M. A.

NIP. 199209072019032018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 April 2021



Anggita Widya Rezanti

1706026052

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan Hak-Hak Dasar Bagi Kelompok LGBTIQ di Kota Semarang”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan nasehat dan ilmu selama menjadi mahasiswa.
3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si dan Akhriyadi Sofyan, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.

4. Bapak Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si dan Ibu Ririh Megah Safitri, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan, pengarahan serta motivasi sehingga bisa tersusun skripsi ini.
5. Bapak Endang Supriadi, M.A selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan, nasehat dan cinta kasih tulus membimbing anak walinya sejak awal perkuliahan hingga akhir.
6. Bapak Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh pengurus dan anggota Rumah Pelangi Indonesia yang telah memberikan izin kepada penulis dengan baik untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Ibu Sri Widayati dan Bapak Wisnu Broto Susanto yang telah memberikan kasih sayang, menasehati dan memberikan pelajaran berharga dalam membesarkan anaknya. Skripsi ini tidak akan mampu membalas jasa mereka yang amat besar.
10. Kedua saudara penulis tersayang, Kansha Siti Maulidyasanti dan Keisha Siti Maulidyasanti, terima kasih untuk doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakek dan Nenek penulis, Ibu Sukatin dan Bapak Kadiran, terima kasih untuk doa, nasehat dan dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

12. Teman dekat penulis, Rizki Wahyu Aji yang telah memberikan doa, menemani penulis dalam penggalan data dan memberikan semangat positif sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
13. Sahabat-sahabatku “Nurul Komariyah, Evi Layaliya, Sonia Okta, Dede Hafidz, Salsabila Fitri, Safira Ayu, Hafidz Ernanda, Atik Arini, Riska Maulani dan yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu karena terbatasnya ruang”, terima kasih untuk doa, semangat, motivasi kepada penulis, menjadi teman curhat dan sahabat perempuanku yang bersedia memberikan tempat kepada penulis untuk beristirahat di waktu luang perkuliahan. Semoga kedepannya kita sukses bersama. Aamiin.
14. Teman-teman seperjuangan Sosiologi angkatan 2017, terima kasih untuk semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Semoga kelak kita bisa mencapai kesuksesan dalam bidang yang digeluti.
15. Teman-teman dari KKN posko 71 Semarang Timur yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis. Semoga persaudaraan ini tidak berhenti disini dan tetap menjalin silaturahmi.
16. Teman-teman organisasi di Lembaga Pers Mahasiswa Reference, HMI Sosiologi 2018 dan PMII FISIP. Terima kasih telah menjadi bagian dalam berproses, belajar dan berbagi pengalaman bersama penulis dengan perbedaan karakter dimiliki kita tetap menjadi keluarga sampai saat ini.
17. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa balasan yang lebih baik dan diterima amal sholehnya. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kepada para pembaca, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi

ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan tentunya kepada para pembaca.

Semarang, 11 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anggita' followed by a stylized surname.

Anggita Widya Rezanti

NIM 1706026052

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Orang tua saya tercinta Bapak Wisnu Broto Susanto dan Ibu Sri Widayati yang telah menjadi motivator terhebat, membesarkan, merawat, mendidik, memberi cinta kasih tulus, selalu di samping saya dan berdoa untuk kesuksesan saya.

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang menjadi ladang ilmuku diperkuliahan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

MOTTO

“Alam semesta diciptakan dengan karakter beragam”.
“Keberagaman dalam segala sesuatu, kepribadian manusia, pikiran dan keyakinan
adalah sifat alam semesta. Begitulah manusia dan akal mereka diciptakan.
Siapa yang menuntut ketunggalan manusia, dia menuntut sesuatu yang mustahil,
yang tak mungkin”.

KH. Husein Muhammad

ABSTRAK

Keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ) di Indonesia masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan di kalangan masyarakat hingga saat ini. Pandangan mengenai kelompok dan komunitas LGBTIQ lekat dengan stigma negatif yang seringkali mengarah pada tindakan spontan berupa kekerasan dan diskriminasi. Peningkatan kasus diskriminasi dan kekerasan baik kekerasan fisik, non fisik, domestik maupun publik dialami kelompok LGBTIQ di Kota Semarang berdasarkan Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIE-SC). Kelompok LGBTIQ dianggap berbeda oleh masyarakat, atas perlakuan buruk yang dialami kelompok tersebut di lingkungan sosial telah terjadi pelanggaran hak kebebasan, berkumpul dan perlindungan atas rasa aman seharusnya didapatkan sebagai sesama warga negara Indonesia. Penulis mengambil objek penelitian di Rumah Pelangi Indonesia yang merupakan salah satu komunitas aktif dan berkinerja mewadahi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang dengan meneliti bagaimana eksistensi komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar mulai dari pandangan lingkungan sosial, alasan individu LGBTIQ membentuk komunitas, membuat identitas dan berperan penuh bagi anggotanya dalam seluruh kegiatan seperti, edukasi, pelayanan dan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang dilakukan pada pengurus dan anggota Rumah Pelangi Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial karya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis data lapangan mengenai peran Rumah Pelangi Indonesia yang dimaknai anggotanya dalam mewadahi dan memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat tiga simpulan, pertama kelompok LGBTIQ di lingkungannya kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan yang membuat trauma sehingga cenderung menutup diri kekhawatiran tidak diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut memperpuruk seseorang, membatasi mereka dalam mengembangkan kapasitas apabila tidak tergabung dalam komunitas. Kedua, kekerasan dan diskriminasi yang dialami minoritas seksual di Semarang Rumah Pelangi Indonesia berperan mewujudkan inklusifitas bagi anggotanya, menciptakan ruang aman bagi korban diskriminasi dan kekerasan serta mendorong anggota ikut serta dalam seluruh kegiatan komunitas seperti, edukasi, gathering, pelatihan, pelayanan kesehatan dan webinar untuk mendapat informasi, mengasah nalar kritis dan wawasan lebih luas mendapatkan hal-hal positif sehingga berperan aktif di lingkungan sosial, berdaya dan memaknai hidupnya. Ketiga, RPI memiliki tim advokasi bertujuan mendampingi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC. Namun demikian, peran dan eksistensi yang ditunjukkan Rumah Pelangi Indonesia di masyarakat masih saja ada beberapa individu yang menolak dengan stigma buruk mengenai penyimpangan seksual sebagai tantangan komunitas.

Kata Kunci: Kelompok LGBTIQ; Rumah Pelangi Indonesia; Peran; Eksistensi

ABSTRACT

The existence of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Inter-sexual and Queer (LGBTIQ) groups in Indonesia is still a debate that has not been resolved among the public until now. The views of LGBTIQ groups and communities are associated with negative stigma which often leads to spontaneous acts of violence and discrimination. LGBTIQ groups in Semarang City experienced an increase in cases of discrimination and violence, both physical, non-physical, domestic and public based on Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIE-SC). LGBTIQ groups are considered different by society, because of the bad treatment experienced by these groups in the social environment, there have been violations of the rights to freedom, assembly and protection of a sense of security that should be obtained as fellow Indonesian citizens. The author takes the object of research at Rumah Pelangi Indonesia which is one of the active and performing communities to accommodate LGBTIQ groups in the city of Semarang by examining how the existence of communities in fighting for basic rights starting from the perspective of the social environment, the reasons for LGBTIQ individuals to form communities, create identity and play a full role. for its members in all activities such as education, services and empowerment. This study uses a descriptive qualitative approach, data collection by observation, in-depth interviews and documentation carried out on the management and members of the Indonesian Rainbow House. This study uses the theory of social construction by Peter L. Berger and Thomas Luckmann to analyze field data regarding the role of Rumah Pelangi Indonesia which is interpreted by its members in accommodating and fighting for the rights of LGBTIQ groups in Semarang City.

Based on the research conducted, there are three conclusions, first, LGBTIQ groups in their environment often get discriminatory treatment and traumatic violence so that they tend to shut down their concerns about not being accepted by the community. This condition destroys a person, limiting them in developing their capacity if they do not join the community. Second, violence and discrimination experienced by sexual minorities in Semarang Rumah Pelangi Indonesia plays a role in realizing inclusiveness for its members, creating safe spaces for victims of discrimination and violence and encouraging members to participate in all community activities such as, education, gatherings, training, health services and webinars for get information, hone critical reasoning and broader insights to get positive things so that they play an active role in the social environment, empower and give meaning to their life. Third, RPI has an advocacy team that aims to assist victims of SOGIE-SC based violence. However, the role and existence shown by Rumah Pelangi Indonesia in society are still some individuals who reject with a bad stigma regarding sexual deviance as a challenge to the community.

Keywords: LGBTIQ group; Rumah Pelangi Indonesia; Role; Existence

مستخلص البحث

كانت مجموعة السحاقي ومثلي الجنس وثنائي الجنس والخُنثوي ومُتحوّلي الجنس والشاذ لا تزال وجودها نقاشاً إندونيسياً ولم ينتهي بين الجمهور حتى الآن. ترتبط آراء مجموعات ومُجتمعات LGBTIQ بفكرة سلبية التي غالباً ما تؤدي إلى أعمال المرتجل بالعنف والتمييز. وُجدت مجموعات LGBTIQ في مدينة سيمارانج زيادةً في حالة التمييز والعنف والجسدي وغير الجسدي والمنزلي والعالم على أساس التوجه الجنسية والهوية الجنسية والتعبير والخصائص الجنسية (SOGIE-SC). فاعتمدها المجتمع مجموعة LGBTIQ باعتماد مختلف، بسبب المعاملة السيئة التي تتعرض لها هذه المجموعات في البيئة الاجتماعية، كانت انتهاكات الحق في الحرية والتجمعة وحماية الشعور بالأمن الذي يجب الحصول عليه كمواطن إندونيسياً. أخذت الباحثة مجتمع البحث في Rumah Pelangi Indonesia، وهي من أحد المجموعات النشيطة وينفذ لاستيعاب مجموعة LGBTIQ في مدينة سيمارانج من خلال الدراسة عن كيفية وجود المجتمع في نضال الحقوق الأساسية بدءاً من منظور البيئة الاجتماعية، وأسباب الأفراد في تشكيل مجتمع LGBTIQ، وتشكيل الهوية واللعب بدور كامل لأعضائهم في جميع الأنشطة مثل التعليمية والخدمة والتمكينية. استُخدمت هذه الدراسة النهج النوعي والوصفي، وجمع البيانات بطريقة الملاحظة، والمقابلات المتعمقة والوثائق التي أجريت على لجنة وأعضاء Rumah Pelangi Indonesia. واستُخدمت هذه الدراسة نظرية بنية الاجتماعية لبيتر ل. برجر وتوماس لاكمان لتحليل بيانات الميداني عن دور Rumah Pelangi Indonesia مفسرة لأعضائه في التكيف والنضال من أجل حقوق مجموعة LGBTIQ بمدينة سيمارانج.

بناءً على البحث المنجز، كانت ثلاث استنتاجات، الأولى، تتعرض مجموعة LGBTIQ في بيئتها بمعاملة التمييز والعنف تسبباً بالرضا حتى تتحيز في الغيب خائفاً عن رفض المجتمع. تدمر هذه الحالة الشخص، وتحد من تطوير قدراته إذا لم تنضم إلى المجموعة. الثاني، وقد اعترض العنف والتمييز للأقليات الجنسية في مدينة سيمارانج، فيلعب Rumah Pelangi Indonesia في وجود الشامل لأعضائه، وينشأ غرفاً مأمونة

للمصاب بالتمييز والعنف ويدفعهم في مشاركة الأنشطة، مثل التعليم والاجتماع والتدريب والخدم في الصحة والنقاش عبر الويب لنيل المعلومات، وتوسيع الفكر الناقد وأوسع المعلومات لنيل الأمور الايجابية حتى يدور بالنشاط في البيئة الاجتماعية، تمكيناً وتفسراً لحياته. الثالث، كان Rumah Pelangi Indonesia فريقاً مناصرةً يُهدفُ إلى مساعدة مصاب العنف قائماً بـSOGIE-SC. ومع ذلك، فإنَّ الدورَ والوجودَ الذي أظهرته Rumah Pelangi Indonesia للمجتمع لا يزالُ في رفضه من بعض الأفرادِ بفكرةٍ سلبيةٍ فيما يتعلَّقُ بالإنحرافِ الجنسيِّ باعتباره تحدِّياً للمجموعة. **الكلمات المفتاح:** مجموعة LGBTIQ؛ Rumah Pelangi Indonesia؛ الدور؛ الوجود

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR	V
PERSEMBAHAN	IX
MOTTO	X
ABSTRAK	XI
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR TABEL.....	XVIII
DAFTAR GAMBAR	XIX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis	15
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Komunitas LGBTIQ di Indonesia.....	16
2. LGBTIQ dalam Kebijakan Negara	21
F. Metode Penelitian	24
1. Lokasi Penelitian.....	25
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber dan Jenis Data.....	26

4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	30
BAB II.....	33
RUMAH PELANGI INDONESIA, LGBTIQ DAN PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL	33
A. Definisi Konseptual.....	33
1. Eksistensi	33
2. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ)...	34
3. Hak-Hak Dasar.....	35
4. Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIE-SC)	38
B. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann	40
BAB III	49
RUMAH PELANGI INDONESIA SEMARANG	49
A. Semarang sebagai Basis Perkumpulan dan Ruang Kinerja Rumah Pelangi Indonesia.....	49
B. Sejarah Gerakan LGBTIQ di Indonesia.....	57
C. Sejarah Rumah Pelangi Indonesia.....	68
D. Profil Rumah Pelangi Indonesia.....	71
E. Kelembagaan Rumah Pelangi Indonesia.....	79
F. Pilar Penting dalam Kelembagaan Rumah Pelangi Indonesia	80
BAB IV	86
INTERAKSI SOSIAL DAN ALASAN LGBTIQ MEMBENTUK KOMUNITAS	86
A. Interaksi Sosial Kelompok LGBTIQ Pandangan terhadap Kehidupan Sosialnya	86
B. Faktor Pendorong Terbentuknya Komunitas LGBTIQ di Kota Semarang	100
C. Identitas Rumah Pelangi Indonesia.....	113
BAB V.....	125
PERAN RUMAH PELANGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DASAR BAGI KELOMPOK LGBTIQ.....	125
A. Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi Kelompok LGBTIQ di Kota.....	125

Semarang	125
B. Peran Rumah Pelangi Indonesia dan Keterlibatan LGBTIQ dalam	141
Komunitas	141
BAB VI	157
STRATEGI RUMAH PELANGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DASAR BAGI KELOMPOK LGBTIQ.....	157
A. Strategi Advokasi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan	157
Hak-Hak Dasar.....	157
B. Tantangan Komunitas LGBTIQ di Semarang.....	180
C. Implikasi Teoritik Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia.....	188
BAB VII.....	204
PENUTUP.....	204
A. Kesimpulan.....	204
B. Kritik dan Saran	208
DAFTAR PUSTAKA	211
LAMPIRAN.....	217
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	221

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan	29
Tabel 1.3 Letak Geografis Kota Semarang	51
Tabel 2.3 Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Semarang	52
Tabel 3.3 Tabel Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	56
Tabel 1.5 Jumlah Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Kelompok LGBTIQ di Kota Semarang	128
Tabel 1.6 Tiga Tahapan Strategi Advokasi	176
Tabel 2.6 Implikasi Teori	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Peta Kota Semarang	50
Gambar 1.5 Kampanye RPI dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional 2020	148
Gambar 2.5 Webinar Diskriminasi pada Transpuan	150
Gambar 3.5 Kegiatan Bedah Film Lovely Man	151
Gambar 4.5 Webinar Ragam Gender dan Seksual dalam Perspektif Agama ...	152
Gambar 5.5 Gathering Rumah Pelangi Indonesia	154
Gambar 1.6 Klarifikasi Kasus oleh Rumah Pelangi Indonesia	169
Gambar 2.6 Kampanye RPI atas Penolakan Kasus Klien	170
Gambar 3.6 Edukasi Transfobia	171
Gambar 4.6 Kampanye Hari Perempuan Internasional	175
Gambar 5.6 Gathering Rumah Pelangi Indonesia	195
Gambar 6.6 Webinar Ragam Gender dan Seksual dalam Perspektif Agama ..	197

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan identitas seksualnya termasuk menjadi seorang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ) (Muthmainnah, 2015). Memperjuangkan kehidupan dengan identitas seksual di luar dari heteronormativitas tidaklah mudah. Diskursus mengenai LGBTIQ berkaitan erat dengan kajian gender dan seksualitas, namun tema tersebut tidak serta merta mudah dipahami oleh masyarakat yang terdikotonomi oleh konsep feminin (betina) dan maskulin (jantan) dalam masyarakat terbelenggu budaya patriarki melahirkan konsep biner atas dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) diakui di Indonesia. Homoseksual di Indonesia hingga saat ini belum diakui keberadaannya atas dasar penyimpangan nilai norma dan asas, namun pada dasarnya perilaku orang-orang homoseksual sudah lama ada tanpa memberikan label jelas dalam menyatakan identitas seksualnya. Hal tersebut dikarenakan, laki-laki dan perempuan zaman dahulu kurang menyukai penyebutan lesbian/gay yang identik dengan stereotipe memandang rendah keberadaan mereka (Davies, 2018).

Kehidupan perilaku homoseksual tertuang dalam karya etnografi dan cerita-cerita yang disampaikan turun-temurun. Perilaku homoseksual di Indonesia zaman dahulu terjadi pada masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan dengan praktek Bissu dan perilaku hubungan warok dengan gemblak (Boellstorff, 2005). Bissu memiliki gelar sebagai dukun memiliki kekuatan magis bertugas memimpin ritual perkawinan, menyembuhkan orang dan ritual panen padi. Bissu memiliki perawakan laki-laki menyerupai perempuan (waria) dengan melakukan hubungan seksual sesama jenis. Atas perilaku seksualnya di luar norma hetero bissu

memiliki kedudukan bermartabat sebagai pendeta dari keempat gender. Praktek hubungan seksual sesama jenis di Indonesia telah dilakukan zaman dahulu oleh warok dengan gemblaknya dalam pementasan Reog Ponorogo. Meskipun, warok menikah dengan perempuan dalam memperoleh kekuatan mistisnya warok tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Manusia memiliki nafsu seksual sama dengan warok, mereka mengambil anak-anak berumur 18 tahun diambil diajaknya melakukan hubungan seksual. Anak laki-laki yang disembunyikan warok dalam rumahnya tersebut diberi penghidupan dan disayangi disebut dengan gemblak. Begitupun istilah wandu atau banci pada masyarakat Jawa serta fenomena kehidupan para penari lengger lanang turut mewarnai sejarah keberagaman gender di Indonesia. Dalam Islam Allah Swt telah menciptakan makhluknya yakni manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut menjelaskan, Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi untuk mengatur kehidupan dan meninggikan derajat lainnya. Semua itu menurut sunnatullah untuk itu Allah menguji mereka dengan masing-masing karunia yang diberikan dan akan mendapatkan balasan dari ujiannya, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia merupakan khalifah di muka bumi dengan kondisi dan keputusannya dalam bertindak di kehidupan sehari-hari sesungguhnya menjadi bagian dari ujian diberikan Allah Swt. Di Indonesia secara umum

hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan tidak mengakui individu dengan identitas gender dan seksual berbeda, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual dan queer yang merasa perilaku dan kepribadiannya berbeda dengan jenis kelamin. Semua makhluk Allah Swt tidak pantas menghakimi dan memperlakukan buruk orang lain atas apa yang tidak mereka ketahui, sesungguhnya apa yang manusia lakukan nantinya akan mendapatkan balasan dari Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan kemajuan teknologi kelompok LGBTIQ menunjukkan keberadaannya melalui alat komunikasi gawai dan kemudahan akses media sosial dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai minoritas seksual. Minoritas adalah sejumlah kecil dari masyarakat besar yang mendapatkan perlakuan buruk atau tidak menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut aktivitis LGBTIQ sekaligus pendiri Gaya Nusantara Dede Oetomo, menyatakan jumlah gay di Indonesia ratusan ribu orang belum diketahui sumber pastinya namun pihaknya memperkirakan tiga persen dari penduduk Indonesia adalah kaum LGBTIQ (Ariefana, 2015). Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 754.310 gay dan biseksual atau dalam laporan HIV diistilahkan LSL: Lelaki Seks Lelaki baik yang tampak maupun tidak tersebar di Indonesia tahun 2016 kemungkinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada data terakhir Kementerian Kesehatan tahun 2017 jumlah LSL menurun sebesar 153.154 hal ini dikarenakan jumlah orang mengikuti tes HIV tahun 2017 mengalami penurunan.

Pemahaman mengenai keragaman gender di Indonesia membutuhkan sosialisasi dan kajian terpublikasi resmi sehingga kehadiran LGBTIQ sesungguhnya keberadaan mereka bukan atas penduplikasian budaya barat melainkan telah ada di nusantara sejak dahulu sebagai gender ketiga yang memiliki penyebutan berbeda sesuai kultur budaya sehingga wacana tersebut tidak dianggap hal tabu oleh masyarakat (Gayatri, 2015).

Minoritas seksual rentan mendapatkan perlakuan buruk atas diskriminasi dan stigma yang melekat pada diri mereka. Aparat keamanan dalam menindak LGBTIQ menempatkan mereka sebagai makhluk hina dengan dikemas menegakkan moralitas melakukan razia tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah yang terlembagakan belum mengakui kehadiran minoritas seksual, mereka terhimpit oleh hukum yang menindas dengan pandangan homofobia. Komisioner Komisi Tinggi PBB Navanathem Pillay, menyatakan kebijakan nasional mengkriminalkan keberadaan LGBTIQ perlu dihapuskan karena tidak sesuai dengan konsistensi hukum internasional yang menjunjung tinggi martabat, inklusi dan penghormatan bagi semua orang (Muthmainnah, 2015). Sejumlah pandangan datang dari tokoh nasional profesor fikih Islam Musdah Mulia menyatakan bahwa LGBTIQ bukan kelompok dengan aktivitas seksual menyimpang (Wahid, 2011). Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain maka dari itu, sesama makhluk ciptaan Tuhan manusia tidak boleh saling menghakimi orang lain termasuk keberadaan minoritas seksual karena pada dasarnya semua makhluk itu berkedudukan sama, tidak ada yang tahu salah atau tidak serta beriman atau tidak.

Mengutip dari The Jakarta Post dalam pandangan Nurofiah menyatakan, masyarakat Islam dalam memandang heterogenitas sebagai konstruksi sosial yang berakibat fatal pada pelanggaran hak oleh mayoritas karena bias gender melekat akibat budaya patriarki (Nurofiah, 2008). Minoritas seksual di Indonesia rentan mengalami perlakuan buruk karena tidak diakui dalam masyarakat walaupun begitu, tetap saja mereka sebagai warga negara Indonesia kita harus menghormati hak dasar mereka termasuk identitas seksual seseorang merupakan pernyataan pribadi diri yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain berkaitan dengan perilaku seksual dan orientasi seksual jenis kelamin diluar heteronormativitas. Walaupun dalam kehidupannya LGBTIQ mendapatkan pertentangan keras

pada dasarnya mereka ada namun, keberadaannya tidak mendapatkan tempat karena dianggap tidak sesuai kondisi orientasi seksual manusia lainnya.

Berkaitan dengan perlakuan diskriminatif LGBTIQ tingkat nasional, Dewan PBB melaporkan bahwa kondisi LGBTIQ di berbagai negara terutama Indonesia rentan mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan seperti pembunuhan, perkosaan, penyiksaan atau penghukuman tidak sesuai berperkemanusiaan seperti tindak diskriminatif pada tempat sekolah, pendidikan, kerja, keluarga atas orientasi seksualnya. Indonesia dalam tingkat Internasional sebagai negara dengan penolakan keras terhadap LGBTIQ walaupun belum ada hukum yang jelas menerangkan hal tersebut. Kelompok LGBTIQ dalam memperjuangkan haknya menuntut dengan kondisi orientasi seksual dan identitas seksual Pemerintah tetap memberi dukungan kepada mereka dalam berkarya, mendapatkan akses pelayanan umum, bermasyarakat, berprestasi namun kenyataannya, semua terhambat atas stigma yang melekat pada mereka seperti kurang mendekatkan diri pada tuhan, pelaku kejahatan seksual anak, gangguan kejiwaan, perilaku seksual menyimpang dan rentan mengalami HIV/AIDS.

Penolakan kepada kelompok LGBTIQ dengan tidak mendapatkan perlakuan sama untuk mendaftarkan diri sebagai CPNS di Indonesia karena persyaratan tidak mengalami kelainan orientasi seksual atau LGBTIQ. Polemik mengenai LGBTIQ sangat kompleks memunculkan pro dan kontra kalangan masyarakat bahkan pejabat kementerian menolak tegas keberadaan mereka di Indonesia. Dalam gelombang politik kelompok minoritas tersebut juga disangkut pautkan dengan lontaran pernyataan diskriminatif. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu gerakan hak-hak LGBTIQ di Indonesia merupakan suatu taktik perang modern dengan penyebutan *proxywar* dari negara barat untuk menguasai bangsa tanpa membawa pasukan militer (Erwanti, 2018).

Aktivis LGBTIQ melakukan protes pada Walikota Depok karena penindakan terhadap minoritas seksual dengan mengambil langkah pencegahan penyebaran perilaku LGBTIQ atas kekhawatiran kasus Reynhard Sinaga akan melakukan razia tempat-tempat seperti mall, kos-kosan atau apartemen yang digunakan kelompok tersebut berkumpul (Putra, 2020).

Kekecewaan atas penindakan tersebut dengan mengkriminalkan identitas seksual seseorang berkaitan dengan hak pribadinya sebagai warga negara. Dalam dunia pendidikan kelompok LGBTIQ sangat ditolak keras atas pernyataan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan, kelompok LGBTIQ tidak semestinya berada di lingkungan kampus karena perilakunya bisa merusak moral bangsa dan nama baik kampus (Manafe, 2016). Tidak banyak individu secara terang menyatakan dukungannya kepada LGBTIQ walaupun begitu, mereka menyadari bahwa sesama manusia mereka tetap memperoleh hak dan kewajiban yang sama.

Minoritas seksual di Indonesia membutuhkan perjuangan lama untuk menuntut hak mereka, diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC (Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics) setiap masyarakat dalam sebuah negara memiliki kesamaan hak asasi manusia (Muthmainnah, 2015). Apapun berkaitan dengan orientasi seksual, ras, identitas gender, jenis kelamin, agama, bahasa dan status lain melekat dalam diri individu setiap masyarakat memiliki hak asasi sama tanpa boleh terdiskriminasi pihak manapun. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai dan menghormati hak asasi orang lain terutama hak privasi seseorang menyebabkan keberadaan LGBTIQ mendapatkan penolakan. Hak Asasi Manusia melekat dalam diri seseorang sejak lahir, maka dari itu semua orang berhak atas pemenuhannya. Kewajiban negara dalam melindungi dan memberikan hak asasi manusia kepada warganya tanpa mendiskriminasi.

Masa pandemi Covid-19 kelompok rentan yakni minoritas seksual tidak hentinya mendapatkan perlakuan represif dan diskriminasi mengutip pernyataan dari Ketua Persatuan Waria Semarang Satu (Pewaris) dalam webinar via Youtube bertema obrolan ruang santai komunitas bersama Program Manager Rumah Pelangi Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang bahwasanya pandemi ini menyebabkan terjadinya tindakan represifitas begitu terasa bagi waria (transgender) bekerja sebagai pekerja seks jalanan oleh aparat keamanan dalam hal tersebut Satpol PP dan salah satu korban transgender berprofesi pengamen dipangkas habis rambutnya ketika menyanyi di perempatan jalan Kota Semarang terjadi pada tanggal 14 April, 2020 (Silvy, 2020). Dalam data pemantuan pelaku stigma, diskriminasi dan kekerasan kepada LGBTIQ di Indonesia oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat tahun 2017 hasilnya 27 % dari Organisasi Masyarakat (Ormas) dan 29 % dari aparat penegak hukum kerap kali melakukan pelanggaran hak minoritas seksual menyebabkan memperkuatnya ujaran kebencian dan stigma melekat pada mereka (Zakiah, 2017). Dengan mengusung perjuangan Hak Asasi Manusia dan menuntut kekerasan berbasis Sex Orientation Gender Identity Expression – Sex Characteristic (SOGIE-SC) komunitas LGBTIQ aktif menunjukkan eksistensinya untuk mewujudkan kehidupan nyaman tanpa diskriminasi dan stigma masyarakat.

Di Jawa Tengah kekerasan berbasis SOGIE-SC dapat dikaji melalui kasus diskriminasi terhadap minoritas seksual pada tahun 2019 terjadi pada seorang brigadir Kepolisian Jawa Tengah berinisial TT dipecat dari pekerjaannya usai mengatakan dirinya sebagai gay. Pada kasus dialami brigadir menjadi perdebatan di tengah awamnya pemahaman mengenai orientasi seksual, berdasarkan kasusnya pemecatannya Polri berinisial TT dianggap bertindak tidak sesuai norma agama, kesopanan dan tidak menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Menanggapi kasus tersebut Komisioner Komnas HAM

menyatakan, setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi berdasarkan orientasi seksualnya (Madrin, 2019). Tahun 2019 komunitas LGBTIQ dan aktivis HAM menyoroti peningkatan kasus kekerasan berbasis SOGIE-SC atas perlakuan masyarakat Indonesia terhadap minoritas seksual melakukan pemerasan terhadap penyuka sesama jenis (gay) di Kota Semarang, tiga orang pria mengincar korbannya melalui pemanfaatan aplikasi mengajak berhubungan seksual kemudian, mengancam untuk menyerahkan *smartphone* dan uang Rp 1.500.000 kepada pelaku. Kasus tersebut ditangani dengan baik oleh Kepolisian, pelaku mendekam di penjara dengan hukuman 9 tahun dijera Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan (Purbaya, 2019).

Hal tersebut membuktikan eksistensi minoritas seksual di Indonesia sulit mendapatkan perlindungan bahkan pengakuan tergerus tindak represif dan diskriminasi masyarakat. Dalam laporan 12 tahun persekusi dilakukan Arus Pelangi dalam memperjuangkan hak minoritas seksual di Indonesia dari tahun 2006 hingga 2018 terdapat 1850 kasus yang tidak diselesaikan oleh aparat menandakan isu HAM bagi kelompok minoritas khususnya seksual memang pantas untuk diperjuangkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) PBB pada 17 Mei 1990 dengan mengambil isu minoritas seksual atas pertimbangan penting terurai dalam kertas kerja Komisi HAM (HRC) PBB tanggal 24 September 2014 dengan keputusan tanggal 26 September 2014 mendukung dan mengakui sepenuhnya HAM kaum LGBTIQ sebagai bagian HAM yang universal (Rakhmat, 2016).

Berbicara mengenai kondisi LGBTIQ di Jawa Tengah tantangan mereka yakni diskriminasi dan stigma sehingga *coming out* individu memerlukan dukungan lingkungan dan komunitas walaupun demikian, kondisi mereka dibandingkan dengan LGBTIQ di kota dan provinsi lain di Indonesia cenderung lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peraturan daerah diskriminatif sengaja dimunculkan dalam rangka

menolak dan mempersempit ruang gerak LGBTIQ seperti Jawa Barat dengan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat tujuan dari perda tersebut yakni melarang perzinaan dan pelacuran, baik heteroseksual maupun homoseksual serta Perda Kota Padang Panjang, Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial (Muthmainnah, 2015). Dari Perda tersebut dapat terlihat bahwa daerah tersebut tidak aman bagi keberadaan minoritas seksual, jikalau LGBTIQ berada di wilayah itu tentu mereka cenderung bersembunyi tidak berani *coming out* kepada masyarakat sebagai upaya pertahanan diri mereka.

Wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang komunitas LGBTIQ berani menyuarakan perlakuan diskriminatif dan kekerasan yang dialami seperti pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) digelar Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2019 dihadiri oleh Semarang Gay Community (SGC), Persatuan Waria Semarang (Pewaris) dan Rumah Pelangi Indonesia (Saputa, 2019). Komunitas hadir menyuarakan bahwa mereka kerap mendapatkan diskriminasi dari masyarakat karena keberadaan mereka yang dikesampingkan dan menuntut adanya perlindungan hukum adil bagi minoritas seksual. Kondisi tersebut terlihat bahwa keberadaan mereka diakui dengan kemauan Pemerintah mendengarkan tuntutan komunitas minoritas seksual walaupun, hingga saat ini perlakuan diskriminatif dan kekerasan tetap terjadi seperti kekerasan kerap dilakukan aparat keamanan dan penggrebekan kegiatan diskusi komunitas LGBTIQ karena isunya dinilai mengganggu stabilitas.

Keberadaan kelompok LGBTIQ menjadi urusan negara dengan pemenuhan asasi mereka termasuk memberikan akses sama fasilitas umum dan hukum dalam rangka memberikan perlindungan. Beberapa kasus pelecehan terhadap LGBTIQ di Indonesia seperti pelecehan seksual,

kekerasan seksual, eksekusi diluar hukum, penyiksaan, merazia tanpa mempertimbangkan kemanusiaan dengan melucuti pakaian, stigma negatif, diskriminasi, represi dalam dunia kerja, pendidikan, keluarga, pertemanan dan akses hukum termasuk dalam tindak kekerasan berbasis Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIE-SC).

Berdasarkan data Rumah Pelangi Indonesia selama tahun 2019, terdapat 80 orang yang menjadi korban akibat intimidasi, diskriminasi dan kekerasan berbasis Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIE-SC). Dengan data korban berasal dari kelompok transgender (18) orang, disusul oleh kelompok lesbian (15) orang dan jumlah tertinggi kelompok gay (47) orang. Namun kelompok lainnya yakni biseksual, interseksual dan queer tidak pernah atau jarang terjadi kekerasan terhadap kelompok tersebut di Jawa Tengah. Kekerasan berbasis SOGIE-SC dalam data laporan terjadi di beberapa wilayah yakni Kota Semarang sebagai wilayah dengan data korban terbanyak, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang yang mana dianggap sebagai wilayah intoleran bagi LGBTIQ. Data tersebut bersumber dari laporan murni komunitas Rumah Pelangi Indonesia dalam penanganan kasus korban kekerasan berbasis SOGIE-SC melalui pelaporan langsung dari korban dan cara komunitas dengan menjemput kasus diistilahkan menjemput bola.

Kelompok transgender menjadi paling rentan dalam kekerasan ketika memiliki pekerjaan informal seperti pengamen dan pekerja seks yang mana pekerjaan tersebut sering terdampak patroli aparat keamanan sehingga kerap mengalami kekerasan fisik. Kelompok tersebut tak jarang mendapatkan stigma negatif dengan alasan secara fisik masyarakat dapat mengidentifikasi mereka berdasarkan ekspresi gendernya.. Belum lagi kelompok tersebut tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan tempat tinggal yang layak. Meskipun angkanya tidak sama dengan korban transgender, kelompok lesbian mengalami persekusi dan diskriminasi

terlihat dari perilaku yang diperlihatkan kepada lingkungan sekitar. Angka pada korban gay tertinggi karena mengalami diskriminasi dan kekerasan mereka lebih terlihat berbeda secara perilaku, gaya hidup dan cara berpakaian. Kelompok biseksual, interseksual dan queer tidak pernah atau jarang mengalami diskriminasi karena secara ekspresi gendernya mereka dapat diterima masyarakat namun, secara pribadinya memiliki kecenderungan penyuka sesama jenis. Kekerasan berbasis SOGIE-SC, stigma dan diskriminasi pada LGBTIQ kerap terjadi karena masyarakat berpegang pada heteronormativitas adanya laki-laki dan perempuan saja tidak mengakui gender lain dialami oleh kaum minoritas seksual.

Namun seiring berjalannya waktu dalam rangka memperoleh pengakuan dalam masyarakat, LGBTIQ membentuk kelompok sosial untuk memperjuangkan hak asasi manusia sebagai sesama warga negara Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan minoritas seksual di Jawa Tengah mengusung tema memperjuangkan hak-hak dasar dan menindak kekerasan berbasis SOGIE-SC melatar belakangi Rumah Pelangi Indonesia dibentuk. Berawal dari Komunitas Sobat Semarang kemudian bermetafora menjadi Rumah Pelangi Indonesia pada tahun 2016 dengan tujuan sebagai rumah aman bagi kelompok LGBTIQ di Jawa Tengah. Sejarah Rumah Pelangi Indonesia tidak lepas dari keberadaan Komunitas Sobat Semarang pada masanya berdiri atas inisiasi empat orang gay namun, pada tahun 2016 bermetafora menjadi RPI atas permasalahan internal, sekaligus adanya pengembangan kinerja dan mewadahi kelompok LGBTIQ secara keseluruhan. Maka dari itu, Rumah Pelangi Indonesia berdiri atas inisiasi individu dengan keberagaman gender dan seksualitas. Komunitas Rumah Pelangi Indonesia khususnya Kota Semarang sebagai basis perkumpulan cukup diakui dalam lingkup jaringan sosial atas tujuan utama mereka mengusung isu keberagaman seksualitas dan memberikan rumah aman bagi kelompok LGBTIQ yang mengalami kekerasan berbasis SOGIE-SC. Komunitas LGBTIQ ini berdiri secara independen tidak

berafiliasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) manapun karena seluruh rangkaian kegiatan didanai oleh swadaya.

Rumah Pelangi Indonesia memiliki kegiatan rutin edukasi kepada masyarakat dan jaringan sosial lainnya dalam isu keberagaman berbasis Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIE-SC). Rumah Pelangi Indonesia yang terkenal dengan sebutan RPI tentunya bukan sekedar organisasi atau komunitas berkumpulnya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ), mereka melaksanakan kegiatan lain seperti *gathering*, nonton film, *charity*, turut andil dalam isu reproduksi dan mengadvokasi para LGBTIQ yang menjadi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC. Komunitas ini memiliki peran positif khususnya bagi LGBTIQ karena tidak semua individu dengan kondisi minoritas seksual dapat membuka diri maka dari itu, komunitas berupaya memberi edukasi. Untuk menjalankan program kerjanya Rumah Pelangi Indonesia memiliki kepengurusan yakni Program Manager, Finance, Administrasi dan keanggotaan.

Rumah Pelangi Indonesia memiliki kelembagaan tertuang dalam lima poin yakni organisasi yang menyediakan pelayanan konseling berbasis SOGIE-SC bagi kelompok LGBTIQ membutuhkan pendampingan dipegang oleh ahli psikologi, *pride* Indonesia situs resmi organisasi bergerak dalam media cetak maupun sosial serta website melalui prideindonesia.org, menjadi rumah aman bagi kelompok LGBTIQ membutuhkan pendampingan *support group* di bidang psikologi dan kesehatan, pelangi muda Indonesia ruang pergerakan bagi kelompok LGBTIQ muda didorong untuk aktif dalam berkreasi dan mengaktualisasikan dirinya dalam sebuah organisasi dan gerakan mahasiswa pelangi Indonesia memfokuskan kepada individu yakni mahasiswa yang memiliki kondisi seksualitas di luar hetero normativitas maupun memilih gender atau seks berbeda dari ketetapan sejak lahir.

Organisasi ini memiliki peran positif bagi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan pilar pentingnya yakni pilar psikologi dan kesehatan dalam wujud program *support group*, pilar politik dan hukum dalam wujud program advokasi kebijakan terutama hak-hak minoritas seksual, pilar pendidikan dalam wujud program peningkatan kapasitas bagi mereka mengembangkan kreativitas dan pilar ekonomi dalam wujud pemberdayaan anggotanya dan pilar sosial budaya dalam wujud program media dan kampanye keberagaman mengenai wacana seksualitas di Indonesia.

Penelitian ini mencoba menjelaskan eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang mendasari penelitian ini adalah Pertama, fenomena sosial kekerasan berbasis SOGIE-SC setiap tahun meningkat dialami LGBTIQ sebagai kelompok minoritas seksual di Kota Semarang. Kedua, bagaimana strategi komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan SOGIE-SC. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap LGBTIQ di lingkungan sekitar berkaitan nilai dan norma yang terimplementasi dalam gender terkonsepsikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana interaksi sosial pandangan kelompok LGBTIQ atas dirinya dan alasan kelompok LGBTIQ membentuk sebuah komunitas ?
2. Bagaimana peran yang dilakukan Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang ?
3. Bagaimana strategi Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas pembahasan penelitian ini terkait eksistensi Rumah Pelangi Indonesia. Maka, tujuan terperinci dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui interaksi sosial pandangan kelompok LGBTIQ atas dirinya dan alasan kelompok LGBTIQ membentuk sebuah komunitas.
2. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui strategi Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan implementasi pembelajaran saat berada di bangku perkuliahan dengan mengetahui secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi instansi pendidikan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan dan rujukan ilmu pengetahuan berkaitan dengan eksistensi komunitas LGBTIQ dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok minoritas seksual.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti berikutnya untuk ruang lingkup penelitian yang sama.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bahwa teori konstruksi sosial relevan untuk mengkaji peran komunitas LGBTIQ dalam memperjuangkan hak-hak dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Komunitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan akan pandangan masyarakat dengan adanya kelompok LGBTIQ di Indonesia. Sebagai bahan evaluasi komunitas eksistensi mereka bagi kelompok LGBTIQ Kota Semarang dalam memperjuangkan hak-hak dasar.

b. Bagi Kelompok LGBTIQ

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan bagi kelompok LGBTIQ bahwa keberagaman seksual di Indonesia memang adanya. Saling mendukung dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas keadaannya sebagai minoritas seksual sehingga tidak mengalami diskriminasi dan ketimpangan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan bagi masyarakat dalam mempertimbangkan perlakuannya dan pandangan negatif pada kelompok LGBTIQ atas orientasi seksual mereka dan memahami otoritas pribadi seseorang agar tidak menimbulkan gejolak pelanggaran hak-hak dasar sesama warga negara Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang eksistensi komunitas LGBTIQ (dalam lokasi penelitian penulis Rumah Pelangi Indonesia) memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang merupakan kajian karya tulis pertama yang mengambil fokus tentang komunitas LGBTIQ dalam memperjuangkan hak-hak dasar. Namun, berdasarkan penelusuran peneliti terdapat kajian yang relevan dan mampu mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan kajiannya peneliti mencari data pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan mengembangkan penulisannya yang terbagi ke dalam dua tema tersebut adalah:

1. Komunitas LGBTIQ di Indonesia

Artikel jurnal karya Inestya Kartikaningryani yang berjudul *“Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma”* dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6, No. 2, Agustus 2019. Tujuan daripada penelitian ini mengetahui perjuangan komunitas waria dalam memperjuangkan identitas mereka sekaligus resistensi politik. Pada penelitian tersebut menjelaskan kondisi waria di Yogyakarta dan pembagian citra diri mereka dalam berinteraksi, dengan mengetahui lebih dalam stigmasi yang dialami waria di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengetahui cara komunitas waria mengekspresikan diri dan berperilaku hingga mengasosiasikan ke dalam sebuah komunitas berdasarkan pengalaman mereka dan etnografi feminis posisi waria yang termarginalkan dengan metode memudahkan peneliti memiliki sudut pandang dari informan yang terobsesi istilah *“giving voice”*.

Penelitian tersebut melihat bagaimana waria mengekspresikan dirinya dalam sebuah komunitas dan strategi politik identitas yang digunakan dalam konteks komunitas waria. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan kepada bagaimana LGBTIQ dalam sebuah komunitas mengekspresikan dirinya mendukung individu minoritas seksual Kota Semarang yang belum bisa *coming out* kepada masyarakat dan memfokuskan strategi komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar digunakan komunitas untuk mempertahankan eksistensi mereka di masyarakat.

Artikel jurnal karya I Nyoman Sujana, Komang Arini Setyawati dan Ni Made Puspasutari Ujanti yang berjudul *“The Existence of The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Community in The Perspective of a State Based on Pancasila”* dalam jurnal MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, halaman 127-139. penelitian ini bertujuan mengkaji keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia yang masih dilematis

karena sebagian masyarakat memandang mereka melanggar norma huku, agama dan kesusilaan. Dengan penelitian ini berupaya memahami pandangan Pancasila terhadap keberadaan komunitas LGBT.

Perlakuan diskriminatif masyarakat kepada komunitas LGBT melanggar tujuan utama undang-undang untuk memberikan keadilan. Menggunakan metode penelitian hukum empiris hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komunitas LGBT tidak bisa dihindari karena semua anggotanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara, memperlakukan tidak adil sama saja sesama warga negara melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan komunitas LGBT tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pada penelitian ini peneliti menemukan kesamaan pada kajian pembahasan hak-hak dasar LGBTIQ. Sedangkan perbedaan penelitian ini memfokuskan pada penjelasan bagaimana cara komunitas LGBTIQ memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang melalui edukasi masyarakat terkait isu keberagaman, bekerjasama dengan jaringan sosial untuk mewujudkan rumah aman seperti pelayanan konseling dan kesehatan serta mengadvokasi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC sebagai wujud identitas komunitas mempertahankan eksistensi di Kota Semarang.

Artikel jurnal karya Hendra Fajar Dani Laud, La Ode Monto Bauto dan Suharty Roslan yang berjudul *“Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Kota Kendari”* dalam jurnal Neo Societal Vol. 4, No. 4, Oktober 2019; ISSN: 2503-359X; Hal. 992-999. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Kendari. Individu yang menetapkan dirinya sebagai identitas seksual selain heteronormativitas cenderung menutup diri lebih cenderung berinteraksi dengan sesama LGBT. Dengan memaparkan pengetahuan tentang seksualitas dan konsep LGBT sebagai gambaran umum agar masyarakat lebih terbuka terhadap keberadaan mereka. Dalam penelitian ini peneliti mengamati faktor-faktor penyebab masyarakat memilih

menjadi LGBT antara lain faktor hereditas, faktor lingkungan, faktor kepuasan, faktor keluarga, faktor biologis dan pengetahuan agama yang lemah.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengetahui eksistensi keberadaan komunitas LGBT di Kota Kendari tetap eksis yakni adanya kontrol sosial dan canggihnya teknologi dengan media sosial seseorang mudah mengakses informasi termasuk mengenai LGBT. Sedangkan perbedaan penelitian ini peneliti akan menjelaskan eksistensi Rumah Pelangi Indonesia sebagai komunitas yang aktif memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang dengan cara mengedukasi masyarakat terkait isu keberagaman yang bertujuan agar meleak adanya gender lain diluar norma heteronormativitas, mengadvokasi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC melalui media sosial bahwa mereka minoritas seksual perlu dilindungi haknya dan memberikan layanan bantuan hukum.

Artikel jurnal karya Sri Setiawati yang berjudul "*Jaringan Sosial Organisasi Lesbian, Biseksual dan Transgender: Studi Kasus Organisasi Ardhany Institute di Jakarta*" dalam jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Desember 2016, Vol. 18 (2): 153-171; ISSN 1410-8356. Penelitian ini menjelaskan tentang jaringan sosial organisasi Lesbian Biseksual dan Transgender (LBT) Perempuan Ardhany Institute di Jakarta. Keberadaan LGBT/LBT di Indonesia masih menuai pro dan kontra masyarakat karena anggapan perilaku menyimpang. Dengan menggunakan pendekatan etnografi feminis, dimana hubungan-hubungan global akan mudah dipahami dengan bahan-bahan nyata dengan bertaut erat melalui pertemuan sehari-hari dalam artian praktik dan tindakan sehari-hari menjadi bahan dalam pendekatan etnografi. Walaupun kondisi lingkungan kurang mendukung keberadaan LGBT organisasi berani untuk *coming out* melalui jaringan sosial. Hasil daripada penelitian ini menjelaskan jejaring sosial yang dilakukan organisasi mulai dari

membangun relasi sosial antar aktor/individu sampai dengan lembaga luar negeri dan dalam negeri, termasuk media massa.

Jaringan sosial aktor yang digunakan memberikan efek *struggling* bagi pergerakan organisasi LBT di Indonesia. Ardhanary Institute aktif dalam membangun jaringan sosial dengan organisasi perempuan lainnya dalam bidang kesehatan, rumah aman dan lembaga bantuan hukum. Namun, isu dalam penelitian tersebut hanya mengenai Lesbian, Gay dan Biseksual. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan memfokuskan pada kinerja Rumah Pelangi Indonesia sebagai wadah kelompok LGBTIQ Kota Semarang dan memaparkan kondisi LGBTIQ Kota Semarang terkait pandangan masyarakat mengenai LGBTIQ di lingkungan sosial yang rentan menjadi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC. Relevansi dengan penulisan ini terletak dari bagaimana cara komunitas berjejaring dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan rumah aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

Artikel jurnal karya Bayu Irawati RM dan Nur Hasyim yang berjudul “*Kehidupan Gay dalam Perspektif Interaksionisme Simbolis*” dalam Jurnal Sosiologi Walisongo (JSW) Volume 3, No. 2, Tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan kelompok gay dalam kehidupan sehari-harinya di Palembang dengan menggunakan perspektif interaksionisme simbolik. Kelompok gay di Palembang memaknai dirinya berbeda dengan kelompok waria, secara perilaku seksual mereka menganggapnya sebagai sesuatu kodrati. Namun, secara fisik gay tidak mengalami perubahan atas penampilan fisik dan sifat maskulinitasnya berbeda dengan waria.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mencoba mengeksplorasi kehidupan gay dengan teori interaksionisme simbolik yang mana keseharian mereka tidak lepas dari komunikasi dan simbol. Kelompok gay menunjukkan ekspresi gendernya maskulin untuk menarik perhatian gay lainnya. Sikap masyarakat yang homophobia menjadi ancaman bagi kelompok gay di Palembang. Orientasi seksual dalam interaksionisme simbolik selalu mengalami perubahan tekanan dari

keluarga dan lingkungan sosial membuat gay harus berbohong untuk menghadapi situasi tersebut dan menutupi identitasnya. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah memfokuskan pada kelompok LGBTIQ di Kota Semarang rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan di lingkungan sosial atas masyarakat yang belum menerima keberadaannya dengan alasan perilaku seksual dan ekspresi gendernya. Menjelaskan bagaimana kelompok LGBTIQ di Kota Semarang memutuskan bergabung dengan komunitas sebagai wadah mereka dalam menyalurkan aspirasi dan mendapatkan dukungan dari individu yang menjunjung tinggi keberagaman gender dan seksualitas.

Artikel jurnal karya Windy Wijaya yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Peran Komunitas LGBT dalam Mendukung Pariwisata di Bali-Studi Kasus di Kelurahan Seminyak, Kuta”* dalam Jurnal Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yakni mengetahui persepsi masyarakat dengan keberadaan komunitas LGBT di wilayah Seminyak, Bali terhadap peran mereka dalam mendongkrak pariwisata.

Keberadaan LGBT mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat namun, hal tersebut tak lantas dipedulikan oleh komunitas LGBT di Seminyak, Bali. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mencoba mengetahui persepsi masyarakat dalam teori sikap Doxey digambarkan oleh Fridgen dalam rangka mengetahui peran komunitas LGBT dalam kemajuan sektor pariwisata. Hasil penelitian tersebut terlepas dari stigma negatif yang melekat pada kaum LGBT terdapat sisi positif mereka dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat dengan menyumbangkan kemajuan pariwisata wilayah Seminyak, Bali melalui event komunitas yang sering diadakan membuat wisatawan berdatangan dari penelitian tersebut bahwa sebagian orang mendukung keberadaan mereka atas sisi positif yang diberikan pada sektor pariwisata. Meskipun dalam penelitian tersebut tidak dipaparkan secara terstruktur strategi mempertahankan eksistensi LGBT di Seminyak, Bali namun

masih dapat menarik perhatian masyarakat akan hal positif dalam kemajuan sektor pariwisata. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah memfokuskan kepada kondisi LGBTIQ di Kota Semarang mengenai pandangan masyarakat terhadap minoritas seksual yang rentan mengalami kekerasan berbasis SOGIE-SC kemudian, mereka memutuskan bergabung dalam sebuah komunitas dan mengambil peran sesuai demi berjalannya kinerja komunitas.

2. LGBTIQ dalam Kebijakan Negara

Artikel jurnal karya Meilanny Budiarti Santoso yang berjudul *“LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”* dalam jurnal Pekerja Sosial Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN 2339-0042, halaman 154-272. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memaparkan penegakkan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah yang digunakan komunitas LGBT dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan pembahasan mengenai resolusi atas pengakuan PBB secara spesifik mengangkat isu orientasi seksual dan identitas gender agar kaum LGBT memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi pihak manapun termasuk negara. Pemaparan detail mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Pancasila bahwasanya secara garis besar terdapat enam hak asasi manusia berlaku bagi warga negara Indonesia salah satunya berbunyi “Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintahan” hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti memfokuskan kepada bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami LGBTIQ sebagai warga negara demokrasi dan Rumah Pelangi Indonesia dalam memposisikan peran mereka menjadi rumah aman dengan memberikan pelayanan bagi LGBTIQ di Kota Semarang mendukung terwujudnya eksistensi komunitas.

Artikel jurnal karya Roby Yansyah dan Rahayu yang berjudul *“Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”* dalam Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018. Dalam jurnal tersebut mengkaji isu LGBT perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum Indonesia sebagai langkah menyelesaikan permasalahan tuntutan kaum LGBT. Menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan hukum yuridis-normatif dalam menjelaskan keberadaan kaum LGBT di Indonesia yang menjadi pro dan kontra dalam masyarakat.

Penjelasan mengenai hukum Indonesia mengakui penegakkan HAM yang menandakan setiap orang harus menghormati HAM orang lain kelompok LGBT perlu perlindungan atas pelanggaran HAM yang dialami selama ini agar semua rakyat merasa dihormati keberadaannya dan menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan peneliti adalah memfokuskan kepada LGBTIQ di Kota Semarang apakah sudah mendapatkan pelayanan sama dimata hukum melalui penanganan kasus yang dilakukan Rumah Pelangi Indonesia kepada korban kekerasan berbasis SOGIE-SC. Penelitian dilakukan membahas kelompok LGBTIQ di Kota Semarang seringkali tidak terpenuhi haknya sebagai sesama warga negara dalam mengakses pelayanan umum.

Artikel jurnal karya Yeni Sri Lestari yang berjudul *“Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)”* dalam jurnal Community: Volume 4, Nomor 1, April 2018; ISSN 2477 5746. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan latar belakang keberhasilan sistem demokrasi suatu negara dapat ditandai dengan meningkatkan kebebasan yang dimiliki warga negaranya.

Kondisi yang dialami kaum LGBT tidak dapat mengekspresikan orientasi seksualnya di Indonesia karena pandangan tabu masyarakat

sehingga mengalami diskriminasi sesama warga negara. Keberadaan kaum LGBT di Indonesia semakin meningkat konsep HAM sebagai payung dari keanekaragaman sosial legalitas kaum LGBT masih menjadi perjuangan karena akumulasi norma dan nilai agama serta Pancasila yang dijunjung tinggi namun, pelanggaran terhadap sesama warga negara patut mendapatkan perlindungan dari negara. Sedangkan perbedaan penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada strategi Rumah Pelangi Indonesia mengentaskan isu keberagaman seksual yang dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia dengan cara komunikasi media sosial dan edukasi serta strategi advokasi yang digunakan Rumah Pelangi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Pembahasan mengenai advokasi dan hukum dilakukan penulis bertujuan memposisikan Rumah Pelangi Indonesia sebagai aktivis sosial yang mengakomodir korban kekerasan dan diskriminasi karena kelompok LGBTIQ di Kota Semarang seringkali tidak terpenuhi haknya sebagai warga negara

Laporan karya Kadek Genia Teresia yang berjudul *“Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM”* dalam laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Juli 2019. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yakni mengkaji persoalan HAM terhadap kelompok LGBTIQ yang mendapatkan perhatian dari PBB, Pengadilan HAM dan badan-badan HAM regional. Lembaga tersebut memiliki kontribusi terhadap perjuangan kelompok LGBT dalam pemenuhan HAM dalam rancangan aksi nasional HAM Indonesia tahun 2004-2009 menyatakan bahwa kelompok LGBTIQ harus mendapatkan perlindungan dari negara. Tantangan terbesar kelompok LGBTIQ dalam menghadapi stigma, diskriminasi dan stereotipe atas ketabuan masyarakat Indonesia mengenai isu minoritas seksual sehingga terjadi peningkatan pelanggaran HAM yang dilakukan atas dasar orientasi seksual.

Kesimpulan dari laporan tersebut pelanggaran HAM yang dialami kelompok LGBTIQ perlu diperjuangkan atas dasar sesama warga negara

berhak untuk haknya terpenuhi. Negara seharusnya memberikan jaminan perlindungan HAM tanpa pembedaan, ujaran kebencian dan stigma kerap dialami sebagai kelompok rentan menjadi target persekusi kejahatan kemanusiaan. Meskipun tidak menjelaskan bagaimana cara LGBTIQ dalam mempertahankan eksistensi, namun masih dapat menarik perhatian LGBTIQ dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan SOGIE-SC mereka. Perbedaan laporan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan kepada tantangan komunitas LGBTIQ yakni Rumah Pelangi Indonesia mempertahankan eksistensinya sebagai komunitas LGBTIQ di Kota Semarang yang mewadahi kelompok LGBTIQ dalam memperoleh pelayanan, edukasi dan memperjuangkan hak-hak dasar. Dengan menjelaskan peran Rumah Pelangi Indonesia yang dimaknai anggotanya dalam keterlibatan mereka di komunitas sehingga berperan sesuai tujuan berdirinya komunitas.

Menurut pemaparan kesembilan tinjauan pustaka peneliti yang diambil dari jurnal dan laporan riset sebagai tolak ukur perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dengan judul *“Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan Hak-Hak Dasar Bagi Kelompok LGBTIQ di Kota Semarang”* dengan mengambil fokus fenomena diskriminasi LGBTIQ atas orientasi seksualnya yang berbeda seharusnya dapat terlindungi hak-hak dasar dan SOGIE-SC sebagai sesama warga negara. Dengan menjelaskan strategi komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan kegiatan penanganan kasus dalam rangka eksistensi komunitas LGBTIQ di lingkup Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah inti dalam melakukan penelitian dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan cara-cara tepat melalui pencarian, penyusunan, menganalisis dan menyimpulkan dalam menemukan sebuah data pengetahuan baru sesuai dengan tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu,

peneliti harus menentukan dengan tepat metodologi penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada komunitas minoritas seksual lingkup Jawa Tengah yakni Rumah Pelangi Indonesia. Komunitas LGBTIQ tersebut memiliki sekretariat bertempat di Jl. Jomblangsari IV No. 17, Semarang. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian tersebut melalui pengamatan peneliti kondisi yang dialami kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer (LGBTIQ) di Indonesia dipandang buruk dengan stigma negatif mereka. Keputusan setiap orang dalam menentukan orientasi seksual berbeda terutama di Indonesia penuh tantangan, dampaknya mereka kerap mengalami kekerasan secara fisik maupun psikologis.

Terbentuknya Rumah Pelangi Indonesia dengan mengusung isu keberagaman seksualitas dan rumah aman bagi mereka mengalami kekerasan berbasis SOGIE-SC. Sebagai komunitas dengan tujuan menjadi rumah aman minoritas seksual tentu memiliki tantangan berat terutama pada masyarakat Indonesia yang masih menganggap tabu akan hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menjadikan Rumah Pelangi Indonesia sebagai lokasi penelitian dengan tujuan mengetahui eksistensinya dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan SOGIE-SC bagi kelompok LGBTIQ di Jawa Tengah.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang sudah dipaparkan maka penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional. Jenis penelitian ini dilakukan pada kondisi objek sumber data dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik berupaya melakukan pengamatan mendalam melalui interaksi

sosial peran serta peneliti pada kajian yang akan diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor dengan menggunakan prosedur penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang akan diamati (Moleong, 2016).

Penulis akan berupaya mendeksripsikan tentang eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Dengan mengetahui secara detail strategi eksistensi digunakan komunitas dalam memenuhi kebutuhan kaum minoritas seksual mengamati beragam profesi yang digeluti namun, seringkali mengalami kekerasan dan pengintimidasian atas orientasi seksual mereka. Hasil penelitian berupa uraian deksriptif dan penggambaran yang disajikan dalam bentuk laporan. Data yang diperoleh peneliti bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman dan dokumen resmi lainnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Eilen Kanne dalam metode penelitian ada unsur penting dengan istilah teknik penelitian. Salah satu teknik penelitian tersebut sumber data penting bagi peneliti menentukan jenis sumber data digunakan menggali kedalam informasi yang diperoleh. Sumber data sebagaimana dikatakan Lofland yang dikutip oleh Moleong kata-kata dan tindakan, selebihnya sebagai data tambahan menguatkan hasil penelitian seperti dokumen dan lainnya (Moleong, 2016). Sumber data bermanfaat untuk menggali sumber informasi tepat, lengkap dan sah sehingga menghasilkan simpulan penelitian yang tepat. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif hasil wawancara peneliti dengan informan yang dimintai keterangan atas suatu fakta atau

pengalamannya dianggap selaras dengan kajian yang akan diungkap peneliti. Data primer ini diperoleh dengan cara terjun ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Peneliti akan memilah informan sesuai kriteria yang dianggap bisa menjawab permasalahan diangkat dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara beberapa informan seperti program manager Rumah Pelangi Indonesia, pengurus harian dan anggota komunitas dengan pengalaman kekerasan berbasis SOGIE-SC. Seluruh pengurus dan anggota dari Rumah Pelangi Indonesia memiliki orientasi seksual dan gender berbeda, sehingga tidak ada kelompok dominan dalam melaksanakan kinerjanya. Data observasi yang dilakukan pada sekretariat Rumah Pelangi Indonesia dan serangkaian kegiatan dilakukan bersama jaringan sosial Kota Semarang di peringatan Hari Perempuan Internasional 2020. Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan perjanjian bahwasannya mengenai nama informan menggunakan inisial huruf depan sebagai bentuk kerahasiaan informasi pribadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian digunakan dalam rangka melengkapi atau menguatkan hasil penelitian. Wujud data sekunder dalam penelitian ini data cetak maupun elektronik seperti dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, situs internet, hasil jurnal atau skripsi yang relevan dengan kajian peneliti dan foto-foto yang diambil pada saat di lapangan seperti kampanye Hari Perempuan Internasional yang setiap tahunnya diikuti Rumah Pelangi Indonesia dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar kaum minoritas seksual di Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena-fenomena gejala sosial empirik dengan berbagai bentuk kemudian peneliti melakukan pencatatan (Subagyo, 1991). Teknik observasi dalam rangka menggali sumber data berupa peristiwa, aktivitas, tempat atau lokasi, perilaku, benda dan rekaman gambar. Observasi berperan pasif digunakan peneliti untuk mengamati dan menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi penelitian menurut kondisi sebenarnya (Sutopo, 2006). Peneliti terjun ke lapangan mengamati langsung bagaimana komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar kaum LGBTIQ. Pengamatan dilakukan peneliti mengikuti kegiatan konsolidasi seluruh jaringan Kota Semarang bertempat di sekretariat Rumah Pelangi Indonesia di Jl. Jomblangsari IV No. 17. Dengan dilakukannya observasi peneliti dapat mengamati dan membuat kesimpulan dari sebuah kejadian.

2. Wawancara Mendalam

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan dalam rangka memecahkan rumusan masalah yang diangkat peneliti dengan tujuan tertentu (Mulyana, 2010). Dalam wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan terpilih saja atas sifat khasnya memiliki pengetahuan dan mendalami situasi mengetahui informasi yang diperlukan (Moleong, 2016).

Teknik penggalian data ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara mendalam fenomena LGBTIQ di Indonesia masih dianggap tabu bagaimana komunitas LGBTIQ mempertahankan eksistensinya melalui strategi kinerja mereka dengan melakukan tanya jawab kepada pengurus dan anggota komunitas dengan pengalaman

kekerasan berbasis SOGIE-SC sebagai pelengkap informasi tersebut. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek menguasai permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data akurat. Maka dari itu, proses wawancara dalam penelitian ini dengan bertemu langsung beberapa informan yakni Program Manager Rumah Pelangi Indonesia untuk penggalian data terkait komunitas dan peran mewadahi LGBTIQ di Kota Semarang, 3 informan dari pengurus inti komunitas berkedudukan sebagai finance dan administrasi karena ketiga informan tersebut aktivitasnya berkaitan dengan lapangan komunitas sehingga layak dijadikan sebagai informan terkait strategi eksistensi Rumah Pelangi Indonesia, 3 informan relawan aktif komunitas kerap melakukan monitoring lapangan kasus kekerasan LGBTIQ sehingga layak sebagai informan mengenai pemaparan kondisi LGBTIQ di Jawa Tengah dan 3 informan anggota komunitas dengan pengalaman mengalami kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC. Jadi jumlah total informan ada 10 orang untuk memperoleh informasi berkaitan eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar. Teknik pengumpulan data utama dalam wawancara mendalam dilakukan selama empat bulan dengan terjun ke lapangan.

Tabel 1.1
Daftar Informan

No	Narasumber	Keterangan
1.	GR	Pendiri dan Program Manager Rumah Pelangi Indonesia
2.	AA	Ketua Pelaksana Harian Rumah Pelangi Indonesia
3.	AH	Divisi Pengorganisasian GBQ Rumah

		Pelangi Indonesia
4.	O	Divisi Pendokumentasian
5.	YI	Relawan Aktif Rumah Pelangi Indonesia
6.	AG	Relawan Aktif Rumah Pelangi Indonesia
7.	HJ	Relawan Aktif Rumah Pelangi Indonesia
8.	W	Anggota Rumah Pelangi Indonesia
9.	R	Anggota Rumah Pelangi Indonesia
10.	RK	Anggota Rumah Pelangi Indonesia

Sumber: *Data Primer*

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam rangka memperoleh sumber data melalui penelusuran dokumen (Widodo, 2017). Dokumentasi dan arsip berkaitan dengan aktivitas tertulis suatu kegiatan. Sumber data biasanya berwujud rekaman tertulis, namun juga berupa gambar atau benda peninggalan berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu (Sutopo, 2006). Apabila rekaman bersifat formal dan terencana dalam organisasi bagian mekanisme kegiatan disebut dengan arsip. Sumber data penelitian ini tertulis maupun pengumpulan data peristiwa-peristiwa dilakukan peneliti selama kegiatan. Sumber dokumentasi tersebut akan terlampir dalam laporan penelitian untuk menunjang suatu fakta di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Berkaitan dengan penelitian kualitatif yang akan dilakukan penulis maka, teknik analisis data bersifat induktif karena seluruh simpulan yang dibuat sampai teori yang dikembangkan, terbentuk dari semua data yang

ditemukan dan dikumpulkan dari lapangan. Bogdan dan Biklen (1982) dalam (Moleong, 2016) menyatakan bahwa “teknik analisis data” adalah upaya mengorganisir data, catatan-catatan, hasil rekaman kemudian, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola dengan menemukan apa yang penting dan memaknainya serta memutuskan bagian mana yang akan disajikan dalam hasil karya tulisan. Dalam metode penelitian kualitatif teknik analisis data induktif dalam model interaktif oleh Miles & Huberman relevan dengan penelitian ini terbagi dalam tiga komponen yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sutopo, 2006).

Analisis data model interaktif oleh Miles & Huberman tiga komponen penting, bagi penulis dari langkah awal hingga proses analisis akhir sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Proses dalam reduksi berkelanjutan hingga akhir laporan penulisan. Bahkan dapat dikatakan reduksi data ini sudah terjadi ketika penulis memutuskan pengambilan tema, latar belakang penulis, perumusan masalah dan kerangka kerja konseptual. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan observasi, wawancara informan, kajian pustaka dan pencarian dokumen.

Reduksi data dilakukan dengan menuliskan catatan penting lapangan, pembuatan memo, membuat transkrip wawancara, batasan masalah dan membuat coding. Singkatnya proses reduksi data analisis dengan mempertegas, mempersingkat, membuang fokus, mengambil bagian penting yang relevan dengan kajian penulis sehingga analisis simpulan-simpulan permasalahan dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data disusun berdasarkan pokok dalam reduksi data, disajikan dengan kalimat logis, teratur sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penulisan. Unit dalam sajian data

mengacu pada rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian terinci dalam menjawab perumusan masalah yang telah dirancang penulis. Sajian data berupa narasi yang tersusun dengan rapi menurut pandangan penelitiannya. Selain dalam bentuk narasi, juga berupa matriks, gambar/skema dan tabel pendukung narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis data dengan reduksi dan sajian data, selanjutnya diperoleh kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan belum mencapai proses apabila pengumpulan data belum lengkap/berakhir. Pembuatan kesimpulan harus disesuaikan dengan perumusan masalah dan tujuan yang telah dibuat penulis. Dengan begitu hasil simpulan rincian jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan. Juga melakukan verifikasi membutuhkan ketelitian penulis atas apa yang telah dituliskan dalam hasil laporan.

BAB II

RUMAH PELANGI INDONESIA, LGBTIQ DAN PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis data penelitian. Sebelumnya, penulis akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai definisi konseptual yang berkaitan dengan tema penelitian yakni eksistensi, LGBTIQ, hak-hak dasar dan SOGIE-SC.

A. Definisi Konseptual

1. Eksistensi

Menurut Save M. Dagun dalam Yuliana (2014) konsep eksistensi dalam kehidupan sosial manusia adalah persoalan penting karena terkait dengan konsep atau cara mempertahankan diri. Eksistensi adalah proses dimana manusia tidaklah berada dalam kondisi statis tetapi semakin berkembang menuju lebih baik. Proses dimana segala sesuatu yang mungkin kemudian, pada hari esok akan menjadi kenyataan. Manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan, maka manusia itu akan menunjukkan perkembangannya. Manusia dalam menunjukkan eksistensinya berarti jiwanya berani mengambil keputusan. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah kemampuan manusia dalam mengembangkan dirinya bergantung pada diri dalam mengaktualisasikan potensi-potensi diri.

Eksistensi penting bagi keberlangsungan kinerja komunitas karena terkait dengan pengakuan atas keberadaan mereka. Antara komunitas satu dengan komunitas lainnya memiliki eksistensi berbeda bergantung pada bagaimana strategi mereka dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Hal terpenting dalam eksistensi

komunitas adalah dukungan anggota komunitas. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

2. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ)

Orientasi seksual berkaitan dengan seksualitas, dimana seksualitas mencakup, kepribadian atau sikap perilaku, perilaku seksual dan orientasi seksual. Yolandasari mengatakan bahwa lesbian memiliki orientasi seksual dengan sesama jenisnya (homoseksual), biseksual dapat diartikan seseorang tertarik dengan orang lain secara emosional dan seksual bisa dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenisnya, sedangkan transgender istilah umum merujuk pada seseorang dengan identitas gender berbeda dengan jenis kelamin biologisnya. Mereka terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Homoseksual dengan orientasi seksualnya tertarik dengan sesama jenis baik laki-laki maupun perempuan (Yolandasari, 2015).

Lesbian merupakan seseorang dengan jenis kelamin perempuan memiliki ketertarikan emosional kepada perempuan. Gay merupakan seorang laki-laki dengan kondisi emosional tertarik dan saling jatuh cinta dengan laki-laki. Kebanyakan seorang gay tidak suka disebut sebagai homoseksual, karena identitas tersebut mencerminkan konotasi negatif. Maka dari itu, mereka menyukai penyebutan gay sebagai identitasnya. Biseksual merupakan orang dengan jenis kelamin laki-laki mengalami ketertarikan kepada laki-laki dan perempuan. Transgender merupakan orang-orang dengan perasaan diri sebagai laki-laki namun, postur tubuh dan perilakunya perempuan (Yolandasari, 2015).

Seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai transgender, perilakunya tidak sesuai dengan jenis kelamin. Dengan keinginannya seorang transgender melakukan perubahan jenis kelamin sebagai cara untuk terbuka dan merasa aman. Perubahan yang dilakukan seperti perubahan jenis kelamin, pakaian, perawatan, dokumen identitas, pengobatan hormon dan operasi. Interseksual merupakan individu dengan kondisi diluar norma medis berkaitan dengan karakteristik seksual. Interseksual dipandang sebagai individu dengan jenis kelamin biologis ketiga diantara perempuan dan laki-laki yakni campuran kromosom laki-laki dan perempuan seperti jaringan testis, indung telur dan ciri seksual lain. Queer merupakan istilah baru dalam kelompok LGBTIQ. Queer merupakan kenyamanan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya mereka tidak mau dilabeli berdasarkan orientasi seksual mereka (Henig, 2017).

Namun mereka dengan kondisi di luar heteroseksual, mereka sulit diterima di negara Indonesia karena diskriminasi dan stigma negatif yang melekat pada dirinya. Dengan kondisi minoritas seksual yang rentan, mereka membutuhkan kekuatan dari sesamanya dalam sebuah kelompok sosial (komunitas LGBTIQ) untuk memperjuangkan hak-hak dasar yang tidak terpenuhi sebagai warga negara.

3. Hak-Hak Dasar

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki manusia sejak lahir tanpa adanya pembedaan ras, bangsa, agama, jenis kelamin dan bersifat universal. Leach Levin seorang aktivis hak asasi manusia mengatakan dua pengertian. Pertama, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia dan tidak dapat dicabut maupun dipisahkan. Hak asasi adalah hak-hak moral berasal dari kemanusiaan untuk menjamin harkat martabat setiap manusia (*natural rights*). Kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum yang

dibentuk oleh masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak tersebut adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari warga negara yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah (Muladi, 2005). Hendarmin Hadireksa mengatakan bahwa HAM hakekatnya seperangkat aturan digunakan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Pembatasan HAM dalam rangka melindungi warga negara dari kesewenangan kekuasaan (Muladi, 2005). Sedangkan, kewajiban hak dasar adalah warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum, keamanan negara dan menghormati HAM. Dalam konteks penelitian dapat disimpulkan HAM adalah seperangkat hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan negara wajib melindunginya termasuk hak asasi manusia yang dimiliki oleh kelompok minoritas seksual rentan seperti LGBTIQ dari diskriminasi dan stigma negatif oleh masyarakat dan kesewenangan negara. Beberapa prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi warga negaranya yakni:

1. Kesetaraan

Konsep mengenai kesetaraan menekankan pada penghargaan terhadap harkat martabat seluruh insan manusia tertuang khusus dalam pasal 1 DUHAM sebagai hak dasar berbunyi “Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya” (Direktorat Jenderal Perlindungan HAM , 2006).

2. Tidak diskriminatif

Tidak diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari haknya dalam

perlindungan HAM karena alasan faktor eksternal. Sejumlah faktor yang menyebabkan diskriminasi masuk dalam prinsip hak asasi manusia meliputi: ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain.

3. Universal

Nilai-nilai moral dan etika yang dimiliki seluruh wilayah dunia dan pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui dan menjunjungnya. Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara sama oleh semua orang.

4. Martabat manusia

Prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut dihargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang orientasi seksual, bahasa dan kelas sosial.

5. Tidak dapat direnggut

Hak yang dimiliki individu tidak dapat direnggut, diserahkan atau dipindahkan.

6. *Responsibility*/Bertanggung jawab

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab terhadap hak asasi manusia yang bukan pemberian cuma-cuma dan tidak seharusnya ditahan atau memberikan kepada orang lain apabila hal tersebut terjadi, pemerintah seharusnya bertanggung jawab. Tanggung jawab individu untuk mengajarkan hak asasi manusia, menghargai dan menentang individu atau lembaga yang melanggarnya.

7. *Indivisiblity*/Tidak dapat dipisah-pisahkan

Hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, seperti hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan hak kolektif.

8. *Interdependency*/Saling ketergantungan

Pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan hilangnya salah satu hak dengan mengganggu hak yang lainnya. Memajukan hak asasi manusia suatu wilayah berarti melindungi hak asasi manusia lainnya.

4. **Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIE-SC)**

Gender mencakup identitas gender dan ekspresi gender, sedangkan orientasi seksual tidak termasuk dalam kategorinya. Istilah gender tidak digunakan untuk penyebutan jenis kelamin. Selama ini masyarakat mengalami kekeliruan dalam memahami gender dikaitkan dengan sifat pribadi yang harus melekat seperti laki-laki bersifat tegas, berwibawa dan pekerja keras. Sedangkan, perempuan bersifat lemah lembut, pekerja ringan dan hatinya mudah tersentuh. Gender yakni suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non biologis (Arbain, Azizah, dan Sari, 2015). Pemahaman mengenai feminin identik dengan jenis kelamin perempuan dan maskulin identik dengan jenis kelamin laki-laki hal tersebut dianggap alamiah. Orang-orang dengan kondisi homoseksualitas sulit diterima masyarakat karena anggapan abnormal keluar dari konstruksi gender dan seksualitas terwacana dalam budaya diperkuat dengan kebijakan pemerintah diskriminatif dan stigma masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics* (SOGIE-SC) menjadikan stigma negatif dan tindak represif terus berulang melanggar hak asasi kelompok LGBTIQ. Orientasi Seksual (*Sex Orientation*) adalah kecenderungan seseorang mengalami ketertarikan

dengan orang lain melibatkan emosional, romantis dan seksual bersifat personal dalam menyatakan dirinya termasuk dalam individu yang tertarik terhadap gender/seks berbeda dengannya (heteroseksual), individu yang tertarik terhadap gender/seks yang sama dengannya (homoseksual), individu dengan jenis kelaminnya tertarik terhadap laki-laki dan perempuan (biseksual), individu dengan jenis kelaminnya tertarik dengan gender/seks manapun (panseksual), individu dengan jenis kelaminnya mengalami ketertarikan individu lain didasari perasaan emosi dan romantis yang kuat (demiseksual) ataupun individu dengan jenis kelaminnya mengalami ketertarikan individu lain karena kecerdasannya (sapioseksual) (Kartikaningryani, 2019).

Identitas Gender (*Gender Identity*) adalah identifikasi pribadi seseorang tentang dirinya, apakah sebagai laki-laki, perempuan atau yang lainnya didasari perasaan personal. Heteroseksual/cisgender yakni seseorang menyatakan gender/seksnya sama dengan yang ditetapkan sejak lahir didasari identifikasi personal. Sedangkan, transgender yakni seseorang menyatakan gender/seksnya berbeda dengan yang ditetapkan sejak lahir didasari identifikasi personal. Pembagian transgender menjadi dua yakni transpuan dan transman. Transpuan yakni seseorang berjenis kelamin laki-laki, tetapi mengidentifikasi dirinya melalui sifat dan perilakunya menyerupai perempuan. Transman yakni seseorang berjenis kelamin perempuan, tetapi mengidentifikasi dirinya melalui sifat dan perilakunya menyerupai laki-laki.

Ekspresi (*expression*) adalah cara seseorang dalam menampakkan gendernya melalui penampilan fisik, pakaian, perilaku dan sifat kepada orang lain serta lingkungannya seperti, maskulin, feminin dan androgin. Karakteristik Seksual (*Sex Characteristics*) adalah berkaitan dengan jenis kelamin seseorang seperti organ-organ kelamin reproduksi. Secara umum masyarakat Indonesia hanya

memahami pembagian kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan individu dengan dua jenis kelamin (interseks).

B. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Manusia sebagai aktor yang kreatif dalam realitas sosialnya seluruh tindakannya berdasarkan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku. Manusia di luar kontrol struktur dan pranata sosial memiliki kebebasan dalam dirinya, karena mereka secara aktif dan kreatif mengembangkan dirinya melalui proses respons-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Konstruksi sosial adalah susunan realitas objektif yang telah menjadi kesepakatan bersama terbentuk berdasarkan sebuah realitas oleh pengalaman seseorang dan pengetahuan yang membimbing perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari (Berger dan Luckmann, 1990). Konsep kunci dari konstruksi sosial yakni realitas dan pengetahuan. Suatu kualitas terdapat fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan tidak bergantung pada kehendak individu manusia disebut realitas.

Individu dalam bertindak dimasyarakat menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif. Kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik spesifik disebut pengetahuan. Sehingga konstruksi sosial secara keseluruhan terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan seseorang. Konstruksi Sosial atas Realitas (*Social Construction Theory*) berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial diciptakan individu sebagai manusia bebas (Basari, 1990). Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya yang dalam banyak hal manusia memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya.

Berger dan Luckmann (1990) berpendapat, institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, walaupun masyarakat dan institusi sosial terlihat secara objektif,

namun pada kenyataannya semua dibentuk berdasarkan definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas terjadi dalam wujud berulang-ulang diberikan orang lain dengan memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitasnya yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis universal, yakni pandangan hidup menyeluruh memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya. Individu dalam dunia sosialnya bebas berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang terkonstruksi berdasarkan kehendaknya yang mengartikan bahwa individu bukanlah sosok korban sosial, namun mesin produksi sekaligus reproduksi kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Basari, 1990).

Semua kegiatan yang dilakukan manusia bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Pelembagaan terjadi apabila terdapat pengetahuan yang telah menjadi timbal balik dari tindakan-tindakan terbiasa dari pelaku konstruksi sosial. Konstruksi sosial menekankan pada timbal balik (resiprositas) dari pengetahuan kelembagaan dan sifat tidak hanya tindakan-tindakan, melainkan pelaku-pelakunya dalam lembaga. Pengetahuan baru yang telah menjadi tindakan kebiasaan, kemudian membentuk sebuah lembaga akan menjadi milik bersama. Kenyataan sosial dalam kehidupan ditemukan dalam pengalaman intersubjektif melalui pengalaman ini masyarakat terbentuk secara terus-menerus. Pemahaman dalam proses konstruksi ini pada akhirnya membentuk sebuah pola perilaku individu terhadap suatu objek yakni yang dalam penelitian ini berupa perjuangan komunitas dalam memperoleh hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ. Stimulus didapatkan individu sebagai anggota bagaimana mereka membentuk peran sesuai dan bermanfaat bagi komunitasnya melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi sehingga membentuk sebuah konstruksi. Konstruksi sosial ini kemudian membentuk perilaku individu terhadap tujuan yang menjadi dasar pola perilaku mereka yakni tujuan

berdirinya komunitas. Setiap individu dipandang sebagai pelaku konstruksi sosial dan dianggap bertanggung jawab menaati seluruh aturan yang dijadikan bagian dari pengendali situasi dari kelembagaan untuk membuktikan kompetensi semua individu (Bungin, 2008).

Manusia dengan lingkungannya saling berhubungan menurut Berger dan Luckmann, hal tersebut memungkinkan manusia mengembangkan diri tidak hanya pada lingkungan alam tertentu melainkan berinteraksi dengan tatanan sosial budaya spesifik dihubungkan melalui perantara orang-orang berpengaruh atau *significant other* (Berger dan Luckmann, 1990). Berger dan Luckmann berpandangan bahwa kenyataan dibangun secara sosial, dalam pengertian individu yang telah membangun masyarakat dengan itu pengalaman individu tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial peneliti membahas bagaimana usaha pengurus komunitas menyampaikan peran mereka sesuai dengan visi dan misi yang diusung. Dalam hal ini komunitas berperan subjektif antara pengurus dan pendiri menggapai citra tentang peran komunitas yang didukung pemaknaan yang didapatkan anggotanya. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan, yaitu :

a. Eksternalisasi

Merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia sosialnya, baik dalam kegiatan mental maupun fisik sebagai wujud dirinya mengekspresikan dan menguatkan eksistensinya dalam masyarakat. Tahapan ini sebagai wujud masyarakat dilihat sebagai bentuk produk manusia. Manusia mengungkapkan dirinya melalui proses yang dihasilkan pada suatu keadaan dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam keadaan tertentu. Eksternalisasi ini menunjukkan bahwa suatu realita sosial dapat terbentuk melalui tindakan individu yang diwujudkan melalui suatu interaksi sosial (Bungin, 2008).

Realisasinya dalam interaksi sosial, individu-individu membuat suatu simbol dan benda-benda hasil buaatannya. Komunitas salah satu bentuk lingkungan dibedakan berdasarkan kesamaan hobi atau habita tertentu. Dimana komunitas menjadi salah satu lingkungan pertemanan berperan membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Dalam kehidupan sosial masyarakat lebih menonjolkan stabilitas dengan begitu masyarakat di tahap eksternalisasi mengidentifikasi dirinya melalui peranan sosial yang sudah dilembagakan dalam institusi-institusi didalamnya. Peranan terbangun dalam sebuah pola, dilengkapi dengan lembaga-lembaga mencerminkan pola-pola dari peranan-peranan. Dalam kehidupan sehari-hari individu menyesuaikan diri dengan pola kegiatan peranannya serta ukuran dari pelaksanaan peranan terpilih. Peranan memiliki unit dasar dari aturan-aturan terlembaga secara objektif.

Dalam proses eksternalisasi individu berusaha beradaptasi dengan lingkungan sosialnya mereka menggunakan bahasa dan tindakan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Manusia dalam berinteraksi sosial menggunakan bahasa untuk beradaptasi dengan dunia sosial dan tindakannya juga menyesuaikan dengan dunia sosial. Pada tahap ini terkadang ditemui individu yang mampu beradaptasi dan juga tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan penolakan individu dalam dunia sosialnya bergantung apakah dirinya mampu beradaptasi dengan dunia sosialnya tersebut. Di dalam internalisasi menjadi momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Realitas sosial berada dalam diri individu dengan cara itulah individu teridentifikasi dalam dunia sosialnya.

Dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar dan rumah aman bagi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC dengan anggota kelompok LGBTIQ berdiri memenuhi kebutuhan mereka. Dalam

realitas kehidupan masyarakat terdapat orientasi seksual selain heteroseksual yakni homoseksual. Keputusan diri dalam menentukan orientasi seksual di luar norma heteroseksual sangat berat bagi kelompok LGBTIQ. Indonesia sangat kental dengan budaya patriarki yang hanya melahirkan dua gender binar yakni budaya yang mengakui dua gender saja yakni laki-laki dan perempuan tidak mengakui adanya kelompok gender lain. Dengan begitu fenomena individu menyatakan orientasi seksual sebagai homoseksual dianggap menyimpang norma sosial dan agama di masyarakat. Timbulnya pro dan kontra mengenai keberadaan LGBTIQ interaksi sosial mereka sehari-hari harus menyesuaikan dengan apa yang masyarakat harapkan. Tidaklah mudah bagi kelompok minoritas seksual bertahan terdapat tantangan dan hambatan dari beberapa pihak menolak kondisi dan aktivitas sehingga mereka kesulitan dalam berpendapat.

Stigma dialami kelompok LGBTIQ Indonesia akibat budaya patriarki yang memandang perilakunya abnormal. Hal tersebut berakibat tidak diterimanya kelompok LGBTIQ di lingkungan masyarakat bahkan, mendapatkan perlakuan buruk diskriminasi dan pelanggaran hak-hak dasar. Keputusan individu sebagai LGBTIQ sangat sulit melalui proses pertentangan dari lingkungan keluarga, sekolah, agama bahkan diri sendiri banyak faktor yang membuat mereka membulatkan keputusannya karena kondisi biologis yang berbeda dari norma heteroseksual. Minoritas seksual dengan segala stigma seharusnya tidak lantas menjadikan masyarakat membenci dan menganggap mereka tidak berguna karena setiap individu tentu memiliki potensi dalam mengembangkan karyanya.

Pada proses eksternalisasi individu berupaya mengambil peran di masyarakat dengan mengikuti kegiatan sosialnya,

sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara dirinya dengan masyarakat pada umumnya. Dalam eksternalisasi individu dapat dikatakan dirinya mengidentifikasi dengan lingkungan sosialnya. Tahap ini menjadi proses dimana individu beradaptasi dengan lingkungan melalui bahasa dan tindakan antar pengurus dan anggota berbaur dalam seluruh kegiatan komunitas seperti kampanye, edukasi, *gathering*, mengakses pelayanan kesehatan HIV/AIDS, pelayanan bantuan hukum dan konseling bagi korban kekerasan. Peran komunitas disini pengurus menyampaikan tujuan diadakan kegiatan tersebut menambah wawasan dan mengajarkan hidup sebagai kelompok LGBTIQ di tengah mayoritas masyarakat yang memandang buruk keberadaan mereka. Citra yang ingin disampaikan komunitas kepada anggota dan masyarakat bahwa komunitas LGBTIQ sebagai wadah edukasi, pelayanan dan rumah aman bagi minoritas seksual.

b. Objektivasi

Merupakan hasil yang telah dicapai dari mental maupun fisik dari eksternalisasi manusia, berupa perubahan peristiwa dari sebuah proses konseptual diwujudkan dalam suatu realitas nyata menjadi bagian dari kehidupan individu. Kelembagaan merupakan hasil pembiasaan aktivitas manusia mengalami perulangan dan menjadi pola harapannya dapat digunakan kembali pada masa akan datang. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas objektif atau interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusional. Keseluruhan tatanan kelembagaan harus dimengerti oleh seluruh anggotanya dalam proses kelembagaan yang berbeda. Kemampuan manusia dalam mengekspresikan dirinya mampu menghasilkan objektivasi. Konsep penting dalam objektivasi yakni pembuatan signifikasi berupa tanda atau simbol-simbol. Simbol tersebut memiliki makna-

makna yang mudah dipahami oleh masyarakat. Objektivasi dalam tahap ini kesan apa yang ingin disampaikan kepada anggota komunitas sebagai wadah kelompok LGBTIQ dengan memberikan edukasi terarah. Harapannya ketika bermasyarakat anggota dapat berperan dengan baik, sehingga keberadaan mereka sebagai minoritas seksual tidak mengganggu aktivitas dan tujuan anggota dalam mengembangkan kreativitas di kehidupan berjalan dengan maksimal.

Berger dan Luckmann mengatakan semua aktivitas manusia yang menjadi dalam proses eksternalisasi mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) kemudian membentuk pelembagaan (institusionalisasi). Tindakan yang sudah membentuk kelembagaan merupakan milik bersama. Lembaga mengendalikan perilaku manusia dengan menciptakan pola-pola perilaku. Kegiatan manusia yang telah terlembagakan berarti berada di bawah kendali sosial. Berdirinya komunitas LGBTIQ bukan sekedar wadah berbagi pengalaman dan berkumpul pada waktu tertentu melainkan tempat bagi kelompok LGBTIQ untuk terbuka melihat realitas sosial bahwa dirinya mampu mengembangkan kreativitas dengan keadaan orientasi seksualnya di luar heteronormativitas.

Komunitas LGBTIQ berperan dalam mengkoordinir kelompok LGBTIQ di Kota Semarang dengan mengedukasi, memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan advokasi, pelayanan hukum, mengajak berkampanye dalam menyuarakan hak-hak mereka dan menjadi rumah aman bagi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC. Rumah aman penting bagi kelompok LGBTIQ korban kekerasan berbasis SOGIE-SC menjadi kebutuhan mereka agar tetap berdaya dalam lingkungan masyarakat menetapkan hidupnya lebih bermakna dan bertahan dalam melawan stigma yang menandakan mereka layak untuk memperjuangkan pencapaiannya.

Tahap eksternalisasi anggota kelompok akan mendapatkan arahan dari berbagai pengalaman anggota lainnya dengan begitu komunikasi dan tindakan yang mengalir dalam kegiatan komunitas dapat mempengaruhi satu sama lain terutama bagi anggota baru yang belum *coming out* akan orientasi seksualnya karena ketakutannya mengalami kekerasan dan stigma dari masyarakat yang menolak keberadaan minoritas seksual tersebut. Peran komunitas yang dimaknai anggotanya dengan tujuan membuat mereka berdaya dalam kehidupan bermasyarakat

c. Internalisasi

Merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dunia nyata yang terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Dengan internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat, proses tersebut juga terjadi pada suatu lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Terjadi proses pemahaman secara obyektif bagi individu sehingga menciptakan pemahaman yang timbal-balik dan menciptakan pengertian bersama. Internalisasi sebagai proses penyerapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikan kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam kesadaran dunia subjektif. Kunci dalam internalisasi yakni pemahaman mengenai sesama dan dunia maknawi yang menjadi kenyataan sosial. Dimana dalam tahap internalisasi seorang individu berupaya mengambil peran dalam komunitas, seperti yang kita ketahui setiap komunitas tentu memiliki struktur kepengurusan. Dengan adanya struktur di sebuah komunitas, maka anggota lama akan bergabung dengan komunitas mengambil peran dalam divisi yang memiliki fungsi untuk mengurus dan menyiapkan segala keperluan mendukung kegiatan

komunitas. Dalam proses internalisasi memungkinkan anggota baru dengan anggota lama berbaur mengambil peran dan bertukar informasi berkaitan dengan pengalamannya dalam komunitas tersebut. Tahap internalisasi menjadi akhir dari kunci konstruksi sosial peran komunitas LGBTIQ dalam memperjuangkan hak-hak dasar yang ingin memberikan makna kepada masyarakat tentang keberadaan mereka tidak berkonotasi negatif melainkan sebagai rumah bagi kelompok LGBTIQ agar memiliki arah dalam kehidupan terutama bagi mereka yang terpuruk dalam melawan stigma dan kekerasan membutuhkan berbagai pelayanan seperti akses kesehatan menjadi kebutuhan bagi kelompok LGBTIQ yang mengalami penyakit HIV/AIDS, konseling sangat dibutuhkan agar berdaya dalam hidupnya dan hukum dalam mencari keadilan atas penindasan serta kekerasan yang sulit dicapai apabila individu minoritas seksual tidak berjejaring dalam sebuah komunitas.

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, riset ini kemudian berusaha menghasilkan konstruksi sosial dalam rangka menjelaskan kajian peran komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Konstruksi sosial ini akan memudahkan dalam memahami peran komunitas dimaknai oleh anggota yakni bagaimana mereka berperan dalam komunitas dan apa saja hambatan yang melingkupi pergerakan kinerja komunitas. Berdirinya komunitas sebagai wadah bagi kelompok LGBTIQ agar berdaya dalam kehidupan bermasyarakat karena hidup sebagai minoritas seksual sering kali dipandang negatif mudah mendapatkan stigma dan kekerasan maka dari itu, Rumah Pelangi Indonesia mempunyai peran dalam memperjuangkan hak-hak dasar terutama bagi mereka korban kekerasan serta menjadi rumah aman kelompok LGBTIQ.

BAB III

RUMAH PELANGI INDONESIA SEMARANG

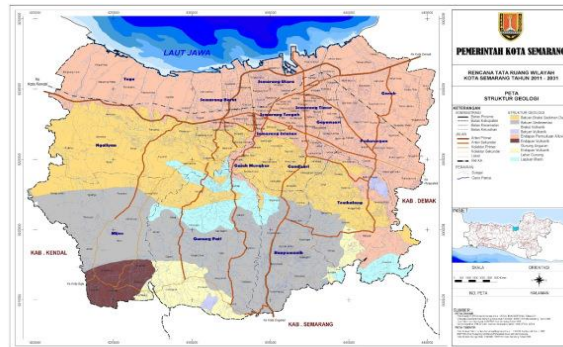
A. Semarang sebagai Basis Perkumpulan dan Ruang Kinerja Rumah Pelangi Indonesia

1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan wilayah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kata “Semarang” secara etimologis diambil dari kata “sem” berarti pohon asam dan kata “arang” yang berarti jarang-jarang. Sehingga, gabungan dari dua kata tersebut yakni “asam yang jarang-jarang”. Asal usul penamaan Kota Semarang dikemukakan oleh Ki Ageng Pandanaran berawal ketika beliau menggarap lahan pertanian bersama pengikutnya sesuatu yang terlihat aneh di antara tumbuh suburnya pohon terdapat pohon asam yang saling berjauhan atau jarang-jarang, dari situlah bermula nama Kota Semarang tercipta. Kota Semarang menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, secara administratif memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang sebelah Barat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kendal. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara berdekatan dengan Laut Jawa. Berikut merupakan kondisi geografis Kota Semarang:

Gambar 1.3

Peta Geografis Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang, 2020

Kota Semarang kini dipimpin oleh Walikota terpilih Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan Wakil Walikota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu yang terpilih dengan masa jabatan periode keduanya pada tahun 2021 hingga 2026. Oleh karena itu, Kota Semarang memiliki visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” dengan visi tersebut akan menjadikan Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang maju memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, meningkatkan perekonomian lokal, menjamin masyarakat yang bebas dalam menjalankan ibadah, maju dalam perdagangan dan jasa yang didukung oleh infrastuktur memadai serta menjadi tempat layak dan kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Adapun misi untuk membangun Kota Semarang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang salah satu kegiatan unggulannya adalah Pengentasan Kemiskinan Terpadu.

2. Kondisi Geografis Kota Semarang

Secara geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomis terletak di antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kendal, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Demak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai $13,6 \text{ km}^2$. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak bujur-lintang	Batas wilayah
Sebelah Utara	$6^{\circ}50'' \text{ LS}$	Laut Jawa
Sebelah Selatan	$7^{\circ}10'' \text{ LS}$	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	$109^{\circ}50'' \text{ BT}$	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	$110^{\circ}35'' \text{ BT}$	Kabupaten Demak

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Ketinggian Kota Semarang terletak diantara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Berdasarkan morfologinya, Kota Semarang secara umum dibagi menjadi dua wilayah yakni Semarang bawah

merupakan dataran rendah dan Semarang atas merupakan dataran tinggi. Semarang bawah menjadi pusat kota dan Pemerintahan, seperti wilayah Jalan Pemuda dan Kauman Lama, sedangkan Semarang atas mengacu pada wilayah Gombel Lama dan Tembalang. Dataran rendah berada pada ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah dataran tinggi di Semarang atas memiliki ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut. Secara administratif wilayah Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 117 Kelurahan.

Luas wilayah Kota Semarang tercatat sebesar 373,70 km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 km² (89,41%) bukan lahan sawah. Kecamatan paling luas adalah Mijen (57,55 km²), diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km², sedangkan kecamatan terkecil di Kota Semarang yakni Kecamatan Semarang Selatan (5,93 km²). Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%) dan hanya sekitar 19,97% nya saja yang dapat ditanami 2 kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah bangunan dan halaman sebesar 42,17% dari total tanah lahan bukan sawah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,928
6	Candisari	6,54

7	Tembalang	44,2
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,177
11	Semarang Timur	7,7
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99
Jumlah Luas Kota Semarang		373,7

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

3. Kondisi Topografis Kota Semarang

Wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua wilayah yakni Semarang atas dan Semarang bawah berdasarkan kondisi topografi Kota Semarang. Secara topografi Kota Semarang memiliki wilayah terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan atau dataran tinggi. Daerah pantai Kota Semarang terletak pada bagian Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa sebesar +1% bagian wilayah Kota. Secara topografi Kota Semarang berbentuk kemiringan. Dengan kemiringan tanah yang dimiliki antara 0% - 2%, sedangkan ketinggian tanah Kota Semarang antara 0 – 0,75 mdpl. Kawasan tengah Kota Semarang merupakan dataran rendah sebagai pusat kota dan pemerintahan kota dengan kemiringan antara 2 – 15 % dan ketinggian antara 0,75 – 3,5 mdpl.

Wilayah Semarang atas merupakan daerah dataran tinggi atau perbukitan berada di bagian Selatan Semarang dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan memiliki kemiringan di atas 40 %.

Daerah dataran tinggi Kota Semarang yakni Gombel Lama, Candisari, Tembalang, Jatingaleh, Mijen dan Gunungpati. Wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan pesisir memiliki potensi yang beragam, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan sektor jasa.

4. Kondisi Demografis

Berdasarkan data penduduk Dispendukcapil Kota Semarang Desember 2020, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sejumlah 1.653.524 jiwa. Berikut penulis memaparkan komposisi data penduduk berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	59 956	57 129	117 085
5-9	62 916	60 072	122 988
10-14	65 339	61 606	126 945
15-19	67 286	63 530	130 816
20-24	65 164	62 662	127 826

25-29	65 090	64 926	130 016
30-34	65 816	66 879	132 695
40-44	65 889	68 271	134 160
45-49	58 527	61 788	120 315
50-54	51 278	55 567	106 845
55-59	43 285	47 881	91 166
60-64	34 843	38 034	72 877
65-69	24 313	27 697	52 010
70-74	11 895	14 301	26 196
75+	9 944	16 346	26 290
Kota Semarang	818 441	835 083	1 653 524

Sumber: BPS Kota Semarang 2020

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada dalam kelompok usia 35-39 tahun dengan jumlah 135.294 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok usia 70-74 tahun dengan jumlah 26.196 jiwa. Sedangkan pada tahun pada Desember 2019 berdasarkan data Dispendukcapil Kota Semarang jumlah penduduk tercatat sejumlah 1.814.110 jiwa dan pada Desember 2018 tercatat sebanyak 1.786.114 jiwa. Dalam kurun waktu 2 tahun (2018-2019) kepadatan penduduk mengalami kenaikan seiring dengan jumlah

penduduk. Namun, kurun waktu 2 tahun (2019-2020) mengalami penurunan sebesar 160.568 jiwa.

Dengan melihat perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kota Semarang dengan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pertumbuhan penduduk jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki yang terdapat di Kota Semarang. Namun, disisi lain penyebaran penduduk di Kecamatan Kota Semarang belum merata. Wilayah Kota Semarang tahun 2020, tercatat kecamatan Candisari memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 11.538 penduduk per km², sedangkan Kecamatan Tugu menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah sebesar 1.033 penduduk km².

Kota Semarang dengan kepadatan penduduknya sangat heterogen yaitu terdiri dari beberapa etnis yakni Jawa, Cina, Arab dan keturunan. Mayoritas penduduk di Kota Semarang memeluk agama Islam, namun demikian terdapat penduduk memeluk agama lain seperti, Kristen, Katholik, Hindhu, Budha. Dengan presentasi data jumlah pemeluk agama di Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Kecamatan	Jumlah Penduduk Agama (Jiwa)						
	Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	Lain-Lain	Jumlah
Jumlah	2.782.052	170.528	234.550	22.846	2.524	844	3.213.344

Sumber: BPS Kota Semarang 2020

Berdasarkan data pada tabel yang disajikan, kita dapat melihat bahwa mayoritas penduduk di Kota Semarang memeluk agama Islam

dengan pemeluk agama lainnya, seperti Kristen, Katholik, Hindhu, Budha juga cukup banyak. Walaupun penduduk Kota Semarang sangat heterogen, jarang terdapat konflik mengenai sosial agama karena toleran antar umat beragama yang begitu tinggi untuk mewujudkan kehidupan yang damai.

B. Sejarah Gerakan LGBTIQ di Indonesia

Pada era modern ini masyarakat Indonesia masih terjebak dalam perdebatan benar atau salah mengenai keberadaan kelompok LGBTIQ. Seiring meningkatnya permasalahan politik, kemiskinan sosial, konservatisme agama dan kesehatan. Disisi lain diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBTIQ semakin meningkat drastis (Amalia, 2019). Sejak lama para aktivis LGBTIQ memperjuangkan hak-hak kelompoknya dengan membentuk gerakan mewadahi kebutuhan minoritas seksual yang keberadaannya mendapatkan penolakan rentan terhadap persekusi dan diskriminasi. Apa yang diperjuangkan kelompok LGBTIQ dan aktivis hak asasi manusia adalah pengakuan atas eksistensi diri mereka oleh negara dan tidak menjadi kelompok termarginalkan dalam kehidupan sosial. Tak hanya itu aktivis dan kelompok LGBTIQ dalam advokasi kebijakannya ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah sebagai sesama warga negara, para LGBTIQ untuk patut dilindungi hak-hak dasarnya atas perlakuan buruk dan tidak menguntungkan dikehidupan.

Berdasarkan sejarah gerakan LGBTIQ di Indonesia, sejak orde baru hingga sekarang, semakin banyak komunitas LGBTIQ yang *coming out* dengan tujuan utamanya untuk mewadahi dan memenuhi kebutuhan para minoritas seksual. Dalam laporan USAID dan UNDP (2014) mengenai sejarah pergerakan komunitas LGBTIQ Indonesia disampaikan bahwa kemunculannya di daerah urban pada awal abad ke-20 dimulai dengan gerakan waria yang muncul di akhir tahun 1960-an (Andina, 2016). Beberapa organisasi di Indonesia yang memperjuangkan isu dan hak-hak kelompok LGBTIQ yakni:

1. Himpunan Wanita Adam (HIWAD)

Pada tahun 1969, berdiri organisasi pertama wadam (wanita adam) yang saat ini diistilahkan waria dengan nama Himpunan Wanita Adam (HIWAD). Deklarasi pendirian HIWAD difasilitasi oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Kemudian, istilah wadam mengalami perubahan pada tahun 1980 menjadi Wanita Pria (Waria) karena anggapan istilah wadam terkesan tidak sopan, sehingga kurang disetujui oleh beberapa pihak (Yansyah dan Rahayu, 2018). Hal ini dikarenakan, istilah wanita adam mengandung nama manusia pertama sekaligus pemimpin dalam Islam yakni seorang nabi (Adam AS).

2. Lambda

Organisasi kedua yang berdiri pada tanggal 1 Maret 1982 diberi nama Lambda sebagai wadah kelompok gay pertama di Indonesia dan Asia yang memiliki sekretariat di Solo kemudian, membentuk cabang baru di wilayah Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lainnya. Sejak berdirinya Lambda tahun 1982 hingga tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBTIQ dan 119 organisasi di 28 provinsi di Indonesia. Pada masa orde baru kelompok homoseksualitas mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai produk gagal dan tidak mampu menerapkan fungsi keluarga.

Dengan pembagian peran gender yang kaku di Indonesia dapat menjadikan keluarga harmonis, sehingga menghindarkan anak pada perilaku homoseksualitas. Setelah reformasi tahun 1998, kelompok LGBTIQ mulai menunjukkan keberadaannya dalam tingkat nasional dengan menjalankan aksi serta kinerjanya di komunitas dan lembaga

yang mendapatkan bantuan dari USAID dengan memperjuangkan wacana HAM di tingkat nasional.

3. Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY)

Organisasi ketiga yakni Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) yang berdiri pada tahun 1985 menjadi wadah kelompok gay di Yogyakarta, kemudian mengubah nama menjadi Indonesia Gay Society (IGS). Namun, pada tanggal 1 Maret 2000 Indonesian Gay Society (IGS) mendeklarasikan Solidaritas Lesbian dan Gay Nasional. Pada bulan November 2000 edukasi HIV/AIDS yang diadakan oleh Solidaritas Lesbian dan Gay mendapatkan serangan dari segerombolan laki-laki dari kelompok yang menyalahgunakan atribut keagamaan melakukan kekerasan dengan melabeli dirinya sebagai oknum Gerakan Anti Maksiat (GAM) dengan membuat onar yang menyebabkan 25 orang luka-luka pada saat kejadian. Keberadaan kelompok LGBTIQ yang dianggap tidak normal dan merusak tatanan negara, menjadi faktor yang melatarbelakangi perlambatan organisasi walaupun, kegiatan tersebut bertujuan untuk edukasi kampanye bertema HIV/AIDS.

4. Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)

Di Daerah Istimewa Yogyakarta organisasi dan kelompok LGBTIQ terus mengalami penambahan, seperti Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) yang berdiri pada tanggal 14 April 1982. Organisasi ini hadir sebagai wadah untuk menampung berbagai kebutuhan, kepentingan dan permasalahan yang

dialami kelompok waria guna mengatasi diskriminasi yang dialaminya. IWAYO berdiri untuk mampu mereduksi stigma kelompok waria sehingga mendapatkan makna dan citra positif dimasyarakat.

5. GAYa NUSANTARA

Pada tanggal 1 Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian mengubah nama menjadi GAYa NUSANTARA (GN) sekarang bertempat di Pasuruan-Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia (Muthmainnah, 2015). Organisasi Gaya Nusantara didirikan oleh Dede Oetomo yang masih aktif hingga saat ini dengan pergerakannya melalui media sosial memberikan edukasi sebagai perkumpulan yang memperjuangkan kepedulian hak-hak LGBTIQ secara terbuka bangga akan jati dirinya tidak mempermasalahkan keragaman gender, seks dan seksualitas. Walaupun, tidak semudah dibayangkan menjadi organisasi mewadahi kelompok LGBTIQ kerap kali mendapatkan penolakan di tiap acara diselenggarakan yang hingga kini dianggap sebagai permasalahan serius bagi organisasi LGBTIQ karena menghambat berjalannya kinerja mereka.

Kekhawatiran masyarakat Indonesia atas keberadaan kelompok LGBTIQ masih tertanam dalam pemikiran, padahal Kementerian Kesehatan pada tahun 1993 telah mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan kejiwaan melalui Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993. Pada bulan Desember 1993 diadakan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLGJ) I bertempat di Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan peserta 40

orang dari Jakarta hingga Ujung Pandang. GAYa NUSANTARA dalam kegiatan tersebut mendapatkan mandat untuk mengkoordinasi Jaringan Gay dan Lesbian Indonesia (Rizal, 2016).

Pertemuan KLGII pada bulan Desember 1995 bertempat Lembang, Jawa Barat diikuti lebih banyak peserta dari pertemuan sebelumnya. Pada tanggal 22 Juli 1996 terdapat Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi partai pertama dengan mencantumkan “hak-hak homoseksualitas dan transeksual” didalam manifestonya. Diadakan kembali KLGIII pada tanggal November 1997 bertempat di Denpasar, Bali. Pertama kalinya diadakan *Gay Pride* Indonesia bertempat di Surabaya melalui kerjasama antara GAYa NUSANTARA, Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) dan Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL).

6. Yayasan Srikandi Sejati

Pada bulan September 1998 muncul organisasi baru diberi nama Yayasan Srikandi Sejati dengan memiliki fokus utama kesehatan orang-orang transgender aktif dalam memberikan kondom gratis pekerja seks di sebuah klinik kesehatan gratis. Kongres Koalisi Perempuan tahun 1998 resmi mengikutsertakan kelompok minoritas seksual komunitas lesbian, perempuan biseksual dan pria transgender ikut andil dalam kegiatan dalam rangka menyuarkan hak mereka. Pada bulan September 1999 diadakan kegiatan Rakernas (Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia) JLGI di Solo untuk kesekian kalinya terdapat ancaman pembubaran kegiatan berupa serangan oleh Front

Pembela Islam Surakarta (FPI), sehingga terpaksa ditiadakan. Pemerintah Indonesia di tahun 2002 memperbolehkan Provinsi Aceh untuk memberlakukan hukum syariat dengan memiliki tujuan mengkriminalkan tindakan homoseksualitas menjadikannya sebagai suatu kejahatan hukum yang berlaku kepada masyarakat Aceh secara keseluruhan. Keberadaan kelompok LGBTIQ sejak dahulu memang menimbulkan perdebatan yang tidak terselesaikan hingga sekarang. Setahun setelah Aceh mengeluarkan hukum syariat mengenai homoseksualitas pemerintah merancang Undang-Undang untuk mengkriminalisasi homoseksualitas beserta kehidupan orang tanpa ikatan pernikahan, perzinaan dan praktik sihir namun, rancangan tersebut gagal disahkan. Jumlah organisasi dan kelompok LGBTIQ setiap tahun meningkat dengan mewadahi beragam individu seperti organisasi secara khusus melingkupi lesbian, gay dan LGBTIQ keseluruhan.

7. Ardhanary Institute

Organisasi yang secara khusus mewadahi lesbian dengan memfokuskan pada persinggungan yang kerap dialami kelompok tersebut berdiri pada tanggal 14 November 2005 dan diberi nama Ardhanary Institute dengan memperjuangkan isu feminisme dan memahami unsur keperempuanan yang dipelopori oleh RR. Sri Agustine dibantu oleh Saskia Wrienga sebagai pusat kajian, penerbitan dan advokasi hak-hak LBT. Ardhanary Institute sebagai organisasi lahir menjadi *crisis center* bagi LBT dengan visi menjadi lembaga membangun terciptanya masyarakat yang menghargai dan melindungi hak-hak seksualitas LBT. Terbentuknya lembaga ini didasari para

perempuan lesbian dianggap lebih rentan dalam kehidupannya ketimbang gay karena paska mengalami kekerasan dalam dirinya terjadi trauma panjang yang sulit disembuhkan. Kemunculan organisasi LGBTIQ memungkinkan para anggotanya lebih percaya terhadap dirinya terutama memaknai hidup dan mengembangkan kreativitas tak heran muncul komunitas-komunitas baru yang menjadi dibentuk oleh anggota organisasi salah satunya yakni Maryani seorang LBT yang mendirikan komunitas Pesantren Waria Senin-Kamis Al Fattah di Yogyakarta.

8. Arus Pelangi

Pada tanggal 15 Januari 2006 dibentuk Arus Pelangi bertempat di Jakarta dengan latarbelakang adanya kebutuhan mendesak oleh kelompok LGBTIQ mendapatkan dan membela hak-hak dasar mereka dalam kehidupan. Arus Pelangi memfungsikan pembentukannya untuk mewujudkan perkumpulan pembela hak-hak LGBTIQ dengan misinya menyadarkan, memberdayakan dan memperkuat mereka yang tertindas dengan berperan aktif dalam proses penyadaran masyarakat. Selain itu, upaya juga untuk menyadarkan keberadaan kelompok LGBTIQ yang hidup di tengah masyarakat notabene menolak keberadaan mereka. Dengan memiliki empat program utama mereka yakni kampanye, pendidikan, pengorganisasian dan advokasi.

Arus Pelangi sebagai organisasi yang mendorong dan memfasilitasi pembentukan semua organisasi LGBTIQ di tingkat daerah disebut mengorganisir organisasi lain yang kemudian tergabung dalam sebuah federasi pelangi Indonesia. Hal tersebut disesuaikan

dengan AD/ART organisasinya dimana bentuk organisasi ini beranggotakan organisasi-organisasi LGBTIQ atau pembela hak LGBTIQ atas kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada kelompok minoritas di tingkat daerah. Seiring bertambahnya organisasi dan komunitas LGBTIQ di tingkat daerah tidak terlepas dari peran aktivis yang secara sukarela bergerak menaungi minoritas seksual di Indonesia. Banyak konsekuensi yang dihadapi aktivis tersebut dalam mengakomodir hak-hak LGBTIQ maupun memberikan pelayanan terhadap mereka. Salah satu konsekuensi menjadi aktivis LGBTIQ yakni mendapatkan stigma yang melekat dalam diri berupa moral dalam segala tindakan dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh GR selaku Program Manager Rumah Pelangi Indonesia melalui wawancara mengenai sejarah pergerakan LGBTIQ Indonesia sebagai berikut:

“Pergerakan LGBTIQ berbicara mengenai sejarah perjuangan orang tua jaman dahulu dimana pergerakan tersebut bisa sangat besar muncul karena diinisiasi lembaga nasional yaitu Arus Pelangi. Jadi Arus Pelangi inilah yang menyebabkan munculnya organisasi maupun komunitas baru terbentuk seperti Suara Kita pada waktu itu muncul bersamaan isu hak asasi manusia dan isu kesehatan reproduksi mengenai HIV/AIDS yaitu GWL-INA lembaga nasional. Itulah akhirnya lembaga dan komunitas mulai tersebar luas di seluruh daerah Indonesia.

Kenapa bisa muncul karena kita melihat bahwa kawan-kawan minoritas seksual dan gender mereka tidak memiliki ruang aman sebuah *space* yang benar-bener nyaman bebas berekspresi, menyatakan pendapat, mengemukakan pikiran, terlebih untuk berkomunitas. Untuk itulah muncul aktivisme yang ada di Indonesia gara-gara menjawab kebutuhan teman-teman LGBTIQ Indonesia dimana mereka tidak memiliki ruang untuk berkomunitas, berekspresi, ruang aman dan nyaman.”(GR, 14 Februari, 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut, keinginan membentuk ruang aman dan berekspresi secara bebas oleh aktivis LGBTIQ tidak mendapat dukungan dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang menanamkan norma hetero. Berdampak pada anggapan masyarakat kepada aktivis LGBTIQ yakni mereka memperjuangkan kelompok yang tak seharusnya ada di kehidupan masyarakat. Tak sedikit dukungan kecuali dari kelompok gerakan perempuan dan akademisi yang memahami kondisinya, aktivis LGBTIQ harus membangun organisasi mereka dari awal hingga mampu mencapai kinerjanya.

9. Suara Kita

Pada tanggal 30 September 2009, Hartoyo salah satu pendiri Suara Kita mendaftarkan secara resmi organisasinya ke akta notaris. Suara Kita diinisiasi oleh empat orang gay yang memiliki kesepakatan untuk mengemban organisasi sebagai wadah membangun kesadaran kritis pada kelompok LGBTIQ dan publik atas hak sebagai sesama warganegara. Suara Kita menunjukkan kinerjanya melalui pengembangan media sebagai alternatif dekonstruksi wacana mengenai seksualitas bagi publik melalui website resminya suarakita.org.

Latar belakang mengapa suara kita harus berjuang hingga sekarang yakni negara Indonesia dengan sebagian besar penduduknya beragama muslim dan menjalankan sistem pemerintahan demokrasi seharusnya setiap orang sama, termasuk LGBTIQ berhak bertarung dalam ruang politik, baik formal maupun non formal pada relasi kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya masih banyak

kelompok LGBTIQ hidup dalam bayang-bayang ketakutan dalam kehidupan sosial karena stigma berdosa, merusak moral dan bersalah dalam keputusannya menjadi manusia sehingga sebagian besar mereka memilih untuk diam dan menutup diri.

Suara Kita memiliki hambatan pada kinerjanya sebagai organisasi LGBTIQ dibenturkan dengan nilai-nilai fundamental sebuah gerakan sosial. Selain perkembangan organisasi LGBTIQ di Indonesia beberapa hasil dari perjuangan mereka adalah peringatan *International Day Against Homophobia dan Transphobia (IDAHO-T)* pertama di Indonesia pada tahun 2008. Kinerja organisasi LGBTIQ tak hanya mengenai menuntut hak-hak dasar mereka tentu setiap organisasi memiliki fokus masing-masing seperti advokasi, rumah aman, wacana keberagaman seksualitas, federasi organisasi tingkat daerah maupun edukasi umum seperti HIV/AIDS memiliki fungsi aksi damai dan diskusi publik mengurangi jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia.

Pada tanggal 6-9 November 2006, Indonesia menjadi tuan rumah seminar internasional dengan agenda besar membahas sebuah dokumen berkaitan pengimplementasian undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki setiap orang yakni orientasi seksual dan identitas gender. Dokumen tersebut dikenal dengan *Yogyakarta Principle* (Prinsip-Prinsip Yogyakarta) pihak penting menandatangani dokumen yakni para petinggi PBB untuk HAM, Produser Khusus PBB dari 29 negara di dunia. Latar belakang dokumen tersebut menjadi bagian dari pembahasan serius memiliki tujuan menerapkan standar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional untuk mengatasi

pelecehan seksual terhadap kalangan individu maupun kelompok LGBTIQ. Prinsip tersebut dibicarakan, didiskusikan dan dikembangkan pada pertemuan Ahli Hukum Internasional, para pakar dan penggiat Hak Asasi Manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang semua dimusyawarahkan diadopsi dari suara keseluruhan peserta, bersama dengan rekomendasi dari pemerintah, lembaga tingkat daerah dan masyarakat sipil. Prinsip dibuat oleh beberapa pihak penting dari seluruh dunia dan masyarakat sipil tersebut belum mengikat secara hukum tertuang dalam hukum hak asasi manusia internasional. Para pihak yang menandatangani Prinsip Yogyakarta memiliki tujuan mempromosikan prinsip tersebut agar diadopsi sebagai sebuah standar hukum internasional universal yang mengikat semua negara untuk mematuhiya meskipun beberapa negara menyatakan keberatan dengan tujuan tersebut.

Pada tanggal 13-14 Juni 2013, diadakan dialog komunitas LGBTIQ nasional Indonesia bertempat di Nusa Dua, Bali yang dihadiri oleh 71 peserta dari 49 lembaga terdapat perwakilan dari berbagai organisasi LGBTIQ di 15 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dengan tujuan memprakarsai “Hidup Sebagai LGBT di Asia” pembahasan dalam forum tersebut yang kemudian dituangkan dalam kajian literatur dikumpulkan oleh badan donor Amerika Serikat USAID, dari berbagai negara di Asia sebagai sebuah inisiatif dalam rangka menyadarkan keadaan hak-hak LGBT Asia. Kajian literatur tersebut membahas mengenai kondisi kelompok LGBTIQ yang sering mendapatkan penolakan, diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya perlu menjadi pembahasan penting oleh berbagai

negara. Pada tahun yang sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan LGBTIQ menjadi bagian penting dalam topik diskusi pleno untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun. Walaupun, permasalahan LGBTIQ telah masuk dalam pembahasan diskusi HAM sepertinya tidak menuaikan hasil lebih baik di Indonesia kondisi LGBTIQ masih sama kerap mendapatkan diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual yang terus meningkat.

C. Sejarah Rumah Pelangi Indonesia

Terbentuknya organisasi dan komunitas LGBTIQ tingkat daerah diinisiasi oleh Arus Pelangi yang mewadahi kelompok LGBTIQ di Indonesia dengan membentuk federasi yang memungkinkan berkembangnya pergerakan lain di berbagai daerah. Aktivisme LGBTIQ di Indonesia menyebarkan pergerakannya sebagai wadah kelompok minoritas seksual dan gender dengan mendirikan ruang dalam berpendapat, berkomunitas, mewujudkan ruang aman dan nyaman. Sejarah mulanya terbentuk Rumah Pelangi Indonesia tidak terlepas dari sejarah komunitas LGBTIQ lain di Kota Semarang yakni Persatuan Waria Kota Semarang (PEWARIS) dan Semarang Gaya Community (SGC). Berdasarkan sejarahnya pergerakan aktivisme LGBTIQ pertama di Kota Semarang telah lama ada sejak tahun 1960 dengan munculnya sebuah lembaga yang eksis pada tahun 1960-1990 diberi nama GUCHI merupakan sebuah singkatan dari “Gabungan Cowo Homo Indonesia”. Pergerakan komunitas kedua mewadahi kelompok transpuan di Kota Semarang yakni PEWARIS fokus daripada aktivisme mereka menyesuaikan kebutuhan waria mengenai isu kesehatan reproduksi mengentaskan permasalahan HIV/AIDS, komunitas ini eksis hingga sekarang kerap melakukan pertemuan edukasi anggota dan bantuan pengobatan waria positif HIV/AIDS berjejaring aktif dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kemudian, lembaga minoritas seksual dan

gender ketiga di Kota Semarang mewadahi kelompok gay yakni Semarang Gaya Community (SGC) namun, pergerakan lembaga ini dinilai lamban karena tidak mampu menjawab kebutuhan kelompok minoritas seksual secara keseluruhan. Beberapa faktor yang menyebabkan lembaga tersebut semakin mundur dalam pergerakan karena tidak mengedepankan isu hak asasi manusia dan mereka ada karena program saja tidak menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan kedepan pada akhirnya hanya menjadi tempat berkumpul kelompok gay. Sejarah mulanya Rumah Pelangi Indonesia tidak lepas dari berdirinya Komunitas Sobat Semarang pada tahun 2009.

Komunitas Sobat Semarang dahulunya didirikan oleh empat orang individu gay yang kerap kali tergabung dalam pertemuan dan aksi sosial kelompok minoritas di Kota Semarang, mereka mengawali sebuah pergerakan di Kota Semarang pada tahun 2005 diinisiasi dari gathering group Boyz Forum Indonesia yang berulang tahun pada 9 Agustus. Keempat orang gay tersebut kerap mengadakan diskusi mingguan tentang problematika kelompok muda yang berkeinginan untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa adanya keresahan dalam diri mereka apabila perkumpulannya tidak menghasilkan manfaat bagi orang lain maka dari itu, mereka membentuk komunitas dan mencoba memberikan ruang untuk teman-teman lain dalam berkomunitas dan mendapatkan ruang aman. Pada 2007 diinisiasi sebuah grup Facebook yang disetting rahasia dengan nama Komunitas Sobat Semarang hingga pada tahun 2009 penggabungan dengan kawan-kawan perempuan korban kekerasan berbasis gender sekaligus *gathering* bersama menyatukan visi sebagai anak muda di Kota Semarang.

Disisi lain, faktor yang melatarbelakangi terbentuknya komunitas karena teman-teman gay belum memahami apa yang didapatkan merupakan sebuah kekerasan mereka terkurang dalam rumah tidak dapat diterima keluarga, mendapat cacian sehingga tidak bisa berekspresi terlebih berkomunitas sehingga membentuklah Sobat Semarang wadah berkumpul teman-teman gay untuk berbagi informasi pribadi maupun pekerjaan. Komunitas Sobat Semarang saat itu lebih terfokus pada penggalangan dana untuk kemanusiaan serta kegiatan *gathering* yang bersifat *entertainment* hingga pada 2013 mendapatkan penawaran untuk mengikuti program (*Scaling Up of Most-at-Risk Populations*) SUM I untuk penjangkauan penanggulangan HIV dan AIDS. Hal ini diperjelas GR selaku Program Manager pada saat penulis melakukan wawancara mendalam, sebagai berikut:

“Terbentuknya Rumah Pelangi Indonesia tidak lepas dari Sobat Semarang pada tahun 2009 namun, komunitas ini nggak bertahan lama tahun 2015 bermetafora menjadi Rumah Pelangi Indonesia. Alasan kami mengubah kelembagaan yang pada waktu itu bernama Sobat Semarang karena kami tidak bisa merangkul secara keseluruhan. Kami melihat yang melekat hanya teman-teman gay saja lalu bagaimana dengan waria, lesbian, trans dan biseksual terlebih queer mereka juga butuh ruang apabila mengalami kekerasan. Lalu kami mengambil inisiatif perubahan nama menjadi Rumah Pelangi Indonesia tidak mengubah nama saja tetapi juga ruang lingkup lebih luas di Jawa Tengah dengan mempunyai basis di setiap daerahnya kita punya koordinator wilayah Salatiga, Rembang dan Tegal.” (GR, 9 Maret 2020).

Periode 2014 atas bantuan dari Kementerian Sosial yang dikumpulkan dari 4 orang menghasilkan *basecamp*, pendirian unit usaha *Laundry* dan berganti menjadi Rumah Pelangi Indonesia. Pada tahun 2015 Sobat Semarang mengubah nama dikarenakan permasalahan internal dan keinginan memperluas kinerja dan pergerakan mereka sehingga pergerakan komunitas dihentikan. Pada masa terbentuk Sobat Semarang

berwujud komunitas belum ada struktur kepengurusan yang terdapat individu bertanggungjawab dalam kinerjanya. Komunitas Sobat Semarang kemudian bermetafora menjadi Rumah Pelangi Indonesia pada tahun 2015 bertujuan membentuk ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Jawa Tengah dengan ruang kinerja dan jaringan sosial yang mendukung lembaganya berada di Kota Semarang.

D. Profil Rumah Pelangi Indonesia

Rumah Pelangi Indonesia merupakan sebuah lembaga mewadahi minoritas seksual dan gender di Jawa Tengah dengan basis kinerjanya di Kota Semarang dengan memiliki sekretariat sebagai ruang kerja sekaligus sebagai shelter atau rumah aman bagi kelompok LGBTIQ bertempat di Jalan Jomblangsari IV. No. 17, Kota Semarang. Berdasarkan pemilihan nama komunitas ini memiliki keinginan untuk membuat yakni rumah tempat berteduh, berlindung bagi para anggotanya komunitas ada bagi mereka membutuhkan kapan saja. Pelangi menjadi simbol dari kelompok minoritas seksual dan gender seluruh negara di dunia dan Indonesia karena posisinya berada di negara Indonesia.

Rumah Pelangi Indonesia memiliki sosial media aktif yakni Facebook (Rumah Pelangi Indonesia) dan Instagram ([rumahpelangiindonesia.official](https://www.instagram.com/rumahpelangiindonesia.official)). Komunitas ini juga memiliki sarana pesan elektronik melalui email dengan alamat official.rumahpelangiindonesia@gmail.com. Rumah Pelangi Indonesia telah memiliki Akta Notaris No 5, SUGIHARTO, SH, 13 Juli 2016 dan SK Kemenkum & HAM Nomor AHU-0068330.AH.01.07.Tahun 2016. Tujuan dari legalitas komunitas ini yakni sebagai bentuk pengakuan keberadaan dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada negara. Setelah mendapatkan legalitas pada tahun 2016 Rumah Pelangi Indonesia membentuk struktur kepengurusan, AD/ART dan beberapa SOP seperti keuangan, penanganan kasus, pendaftaran keanggotaan serta penelitian.

Rumah Pelangi Indonesia memiliki beberapa jaringan sosial yang turut membantu dalam kinerja komunitas di Semarang seperti LBH Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, LRC KJHAM, PKBI Kota Semarang, LBH APIK Kota Semarang, ELSA Semarang serta jaringan sosial lainnya. Tujuan dibentuknya RPI memiliki misi dimana komunitas memerlukan inklusifitas mereka ingin dipandang bahwasanya, kegiatan mereka bukan mengarah pada perilaku negatif melainkan memenuhi kebutuhan khususnya bagi kelompok LGBTIQ yang tidak diakui keberadaannya dan mendapatkan kekerasan dari pihak keluarga komunitas bersedia membantu dalam menangani kasus serta memberikan peningkatan kapasitas melalui pendidikan gencar diberikan. Misi mengembangkan kapasitas menjadi tujuan utama komunitas ini melalui pengembangan keanggotaan dalam berbentuk pertemuan rutin diskusi dan pengembangan dari luar mengikutsertakan anggota dalam pertemuan nasional berguna dalam mengasah pola pikir dan membentuk jaringan dengan individu lainnya. Isu yang diakomodir oleh Rumah Pelangi Indonesia berkaitan dengan kelompok minoritas seksual dan gender mengenai pemenuhan hak asasi manusia, kekerasan berbasis SOGIE-SC, perburuan dan kesehatan reproduksi.

Rumah Pelangi Indonesia memiliki visi dan misi. Visi dari komunitas ini yakni “Terciptanya masyarakat yang inklusif di Indonesia dan menjunjung tinggi keberagaman gender dan seksualitas”. Sedangkan misi dari komunitas yakni memberikan edukasi terkait kesetaraan gender dan hak kesehatan reproduksi kepada kelompok muda, mendirikan dan menyelenggarakan pusat layanan konseling dan hak kesehatan reproduksi,

mengembangkan kepeloporan kelompok muda sehingga percaya diri untuk hadir di masyarakat dan menjunjung tinggi keadilan khusus, memimpin dan terlibat aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak kesehatan reproduksi, serta meningkatkan peran kelompok muda dalam pembangunan bangsa terutama dalam isu kesetaraan gender dan hak kesehatan reproduksi.

Rumah Pelangi Indonesia memiliki nilai yang dijunjung tinggi oleh pengurus dan anggotanya yakni pertama, *humanism* artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kedua, *safe space* artinya menjadi ruang aman dan nyaman bagi semua kelompok. Ketiga, *independence* artinya komunitas tidak terpengaruh oleh stigma dan intimidasi. Keempat, *egalitarianism* artinya menjunjung tinggi kesetaraan dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Kelima, *inclusive* artinya organisasi ini terbuka untuk semua lembaga dan individu yang memiliki kesamaan visi dalam isu-isu keberagaman gender dan seksualitas. Keenam, *voluntary* artinya gerakan komunitas didasarkan atas kebutuhan bersama dalam melakukan aktivitasnya. Ketujuh, *accountable* artinya lembaga memiliki tanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan aktivitasnya.

Sebagai sebuah lembaga formal dan berbadan hukum, Rumah Pelangi Indonesia memiliki struktur organisasi yang jelas dan sangat dipertanggungjawabkan. Dalam struktur tersebut terdapat divisi-divisi di dalam internal RPI termasuk pengurus yang mendapatkan amanah di dalamnya. Pembentukan struktur kepengurusan ini berguna agar organisasi

dalam mewujudkan visi dan misinya serta kinerjanya memiliki arah sehingga adanya organisasi ini dapat bermanfaat bagi anggotanya maupun khalayak umum. Penentuan divisi dan pengurus disesuaikan dengan AD/ART lembaga yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat lima divisi atau sub bagian kerja yang tercantumkan di dalam struktur organisasi Rumah Pelangi Indonesia, yaitu sebagai berikut:



Lebih lanjut setiap sub bagian atau divisi memiliki satu orang penanggungjawab kerja yang nantinya masuk ke dalam struktur kepengurusan. Tugas dari penanggungjawab tersebut pada tiap-tiap bagian atau divisi dipilih berdasarkan kinerja dan komitmennya dalam melakukan perlindungan terhadap minoritas seksual dan gender di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Kota Semarang pada khususnya. Sementara itu, terdapat perbedaan dalam pemilihan direktur program kerja dipilih berdasarkan suara terbanyak dari staff RPI serta keanggotaan dan kinerjanya dalam lembaga.

Struktur kepengurusan tersebut pada dasarnya tidak memiliki batasan waktu terkait dengan masa periode menjabat selama aktivis penanggungjawab dan masuk ke dalam struktur kepengurusan dirinya layak untuk berkontribusi dalam mengemban amanah kepengurusan melakukan kinerjanya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan membantu korban kekerasan berbasis *Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics* (SOGIE-SC) maka akan tetap berada pada kepengurusan. Sistem kepengurusan dalam Rumah Pelangi Indonesia bersifat demokratis partisipatif yang menjunjung tinggi profesionalitas. Terkait dengan struktur kepengurusan, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan pembagian kerja antar divisi dan tugas masing-masing penanggungjawab yang masuk dalam struktur kepengurusan. Berikut adalah pemaparan mengenai tugas dan kewajiban dalam struktur kepengurusan :

1. Direktur

Direktur dalam kepengurusan Rumah Pelangi Indonesia juga disebut Program Manager memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur pengurusan. Tugas dari direktur memastikan apakah lembaga yang dipimpin bergerak sesuai dengan kesepakatan yang telah terbentuk di AD/ART. Direktur dalam memimpin kepengurusan bertanggungjawab terhadap kinerja yang dilakukan bagi anggotanya. Posisi direktur dalam RPI dipegang oleh GR berdasarkan pilihan anggota dan pengurusan lembaga dengan dibuktikan kinerjanya dalam membantu perlindungan teman-teman minoritas seksual dan gender di Jawa Tengah dirinya telah tergabung lama dan turut dalam membangun RPI dari awal kepengurusan tahun 2015. Akhirnya GR direkomendasikan menjadi direktur di Rumah Pelangi Indonesia.

2. Sekretaris Eksekutif

Pihak yang mendapatkan amanah dalam kepengurusan untuk mencatat dan bertanggungjawab atas segala hal berkaitan dengan administrasi serta turut membantu dalam berjalannya kegiatan di Rumah Pelangi Indonesia.

3. Bendahara Eksekutif

Pihak memiliki tanggungjawab sebagai pengelola keuangan Rumah Pelangi Indonesia dan membantu pengurusan donor apabila mendapatkan suntikan dana dari pihak lain.

4. Divisi Pengorganisasian GBQ

Pihak ditunjuk oleh lembaga dalam membawa amanah kepengurusan berkaitan dengan pendampingan kasus, paralegal dan edukasi terhadap kelompok Gay, Biseksual dan Queer (GBQ) di Kota Semarang.

Memiliki tugas dan kewajiban menangani kasus apabila ada korban datang melapor seperti cepat tanggap, pencatatan kronologi, menghubungi jaringan hukum, membentuk tim advokasi dan penanganan kasus di ranah hukum.

5. Divisi Pengorganisasian LBQ

Pihak ditunjuk oleh lembaga dalam membawa amanah kepengurusan berkaitan dengan pendampingan kasus, paralegal dan edukasi terhadap kelompok Lesbian, Biseksual dan Queer (LBQ) di Kota Semarang. Memiliki tugas dan kewajiban menangani kasus apabila ada korban datang melapor seperti cepat tanggap, pencatatan kronologi, menghubungi jaringan hukum, membentuk tim advokasi dan penanganan kasus di ranah hukum.

6. Divisi Pengorganisasian Trans

Pihak ditunjuk oleh lembaga dalam membawa amanah kepengurusan berkaitan dengan pendampingan kasus, paralegal dan edukasi terhadap kelompok Trans (Transpuan dan Transman) di Kota Semarang. Memiliki tugas dan kewajiban menangani kasus apabila ada korban datang melapor seperti cepat tanggap, pencatatan kronologi, menghubungi jaringan hukum, membentuk tim advokasi dan penanganan kasus di ranah hukum. Divisi pengorganisasian trans sering melakukan advokasi dikarenakan kekerasan terhadap transpuan terbilang cukup banyak secara ekspresi dan postur tubuh mengalami perubahan sehingga

tim divisi kerap melakukan pendampingan.

7. Divisi Media dan Kampanye Kreatif

Pihak yang memiliki tugas dan kewajiban dalam setiap kegiatan melakukan pendokumentasian, membuat pamflet dan flayer dalam peringatan hari raya keagamaan dengan memposting pada media sosial Rumah Pelangi Indonesia serta memegang kendali media sosial kelembagaan.

8. Divisi Pendokumentasian Kasus

Pihak yang memiliki tugas dan kewajiban dalam pendokumentasian kasus dilakukan apabila ada korban melapor terjadi kekerasan dan melakukan monitoring pada media online mengenai kasus terjadi di setiap daerah kemudian melakukan pencatatan pembukuan kasus.

E. Kelembagaan Rumah Pelangi Indonesia

Rumah Pelangi Indonesia memiliki kelembagaan yang digunakan acuan dalam kinerjanya yakni pertama, layanan konseling komunitas dengan mengedepankan perlindungan pada minoritas seksual dan gender memberikan ruang konseling berbasis *Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics* (SOGIE-SC) yang dipegang oleh tim psikologi memberikan pendampingan psikologis kepada mereka yang membutuhkan tidak hanya dari keanggotaan komunitas saja tetapi keseluruhan LGBTIQ sesuai keinginan mereka. Konseling dilakukan tidak hanya permasalahan ketika individu mengalami kekerasan tetapi juga konseling kesehatan reproduksi dan konseling transisi terutama bagi seorang transgender. Kedua, *pride* Indonesia bulan dimana kelompok minoritas seksual dan gender seluruh dunia melakukan perayaan atas pencapaian mereka dalam memperjuangkan hak-hak dalam dunia sosialnya. Kelembagaan ini memiliki fungsi kebutuhan komunitas

mengenai kampanye dalam dunia sosial maupun virtual informasi disajikan mengenai isu hak asasi manusia, keperempuanan, kekerasan, perburuan dan kesehatan reproduksi. Ketiga, *sobat pelangi* atau *shelter* rumah aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang memiliki tujuan tempat berteduh bagi mereka yang tidak mendapatkan tempat tinggal atau tidak bisa diterima oleh keluarga setelah menyatakan tentang orientasi seksualnya. Rumah aman ini dapat diakses oleh kelompok LGBTIQ sesuai dengan SOP *shelter* dengan masa waktu menginap kurun 1-2 minggu saja. Keempat, gerakan mahasiswa pelangi Indonesia pergerakan komunitas terhadap anggotanya seorang mahasiswa LGBTIQ dengan mengedepankan pengembangan kapasitas pendidikan sekaligus menguatkan jalinan kerjasama mereka.

Mengembangkan kepeloporan komunitas marginal sehingga memiliki sikap berani tampil ditengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keadilan. Meningkatkan peran serta komunitas marginal dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan atau pemerintah. Mendorong terciptanya kesetaraan bagi semua komunitas marginal dan berperan aktif dalam membangun jejaring dengan komunitas-komunitas lain untuk mensosialisasikan kesetaraan gender dan hak kesehatan reproduksi.

F. Pilar Penting dalam Kelembagaan Rumah Pelangi Indonesia

1. Pilar Psikologi dan Kesehatan

Pilar utama dalam pembangunan aktualisasi diri melalui edukasi kesehatan reproduksi, hak-hak kesehatan reproduksi, peningkatan pelayanan dan perluasan akses layanan kesehatan, pendampingan, membuka pusat layanan informasi dan konseling serta mitigasi dampak salah satunya adalah pendampingan kekerasan berbasis gender. Komunitas

menyadari akan meningkatnya kekerasan dan diskriminasi yang dialami kelompok LGBTIQ di Kota Semarang setiap tahunnya sehingga layanan konseling berguna mengatur emosi dan memecahkan masalah yang mungkin dibutuhkan ketika individu tidak dapat mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Akses layanan kesehatan diberikan kepada anggota kelompok LGBTIQ seperti pemeriksaan VCT untuk status HIV/AIDS, terapi hormon dan terapi HIV/AIDS apabila anggota terkonfirmasi menderita penyakit tersebut. Komunitas menyadari akan pentingnya kesehatan bagi manusia terutama kelompok LGBTIQ maka dari itu, anggota diberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi serta meningkatkan kesadaran hak-hak reproduksi manusia.

2. Pilar Politik, Hukum dan HAM (Advokasi)

Pilar untuk ikut terlibat secara aktif, membangun, merencanakan, memantau dan mengawal segala kebijakan yang terkait dengan kesetaraan gender dan hak kesehatan reproduksi. Advokasi yang dilakukan Rumah Pelangi Indonesia menggunakan dua cara yakni pertama, menekan pada pemerintahan untuk melakukan perubahan kebijakan yang dinilai merugikan kelompok LGBTIQ sebagai minoritas seksual terutama hak asasi manusia dan kedua, masyarakat berupa kampanye untuk mengenai keberagaman gender dan seksualitas serta meningkatkan waspada HIV/AIDS memberikan pendidikan mengenai hak-hak reproduksi manusia.

3. Pilar Pendidikan

Pilar pembangunan kesetaraan dibidang pendidikan, peningkatan kapasitas, dan skill untuk menunjang akses pekerjaan yang lebih layak.

Peningkatan kapasitas berguna mengembangkan pola pikir anggota agar berkembang dan menambah pengetahuan serta melatih kesadaran mereka akan sebuah tanggung jawab dalam komunitas. Dalam mewujudkan pilar ini komunitas berjejaring dengan federasi nasional yakni Arus Pelangi untuk penambahan kapasitas anggota komunitas akan diikutsertakan dalam kegiatan nasional dengan komunitas lain memungkinkan menambah jaringan dengan pihak lain kerjasama komunitas dan berbagi pengalaman mengenai keadaan kelompok LGBTIQ di daerah masing-masing terutama mengenai pelanggaran diskriminasi dan kekerasan meningkat setiap tahunnya.

4. Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi komunal untuk saling membantu dan menguatkan, diharapkan kedepannya dapat membangun koperasi komunitas yang profesional untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan mendapatkan bantuan modal usaha selain membangun unit usaha untuk menopang kegiatan-kegiatan kelembagaan agar pergerakan terus berjalan dan makin kuat. Pilar ekonomi berguna meningkatkan kapasitas dan kreativitas pembekalan anggota dalam mengembangkan bisnis sehingga mereka nantinya dapat membuka usaha pribadi untuk menambahkan pemasukannya.

1. Pilar Sosial dan Budaya

Pilar pergerakan dibidang sosial dan budaya baik membangun pemahaman terhadap kekayaan budaya Indonesia yang ramah terhadap kesetaraan gender dan hak kesehatan reproduksi, membentuk budaya literasi bagi kelompok muda sebagai salah satu alat perjuangan,

membangun portal informasi alternatif dan pengembangan minat dan bakat. Pilar sosial dan budaya berguna mengembangkan kapasitas di tiap individu komunitas ini mengaktifkan kinerjanya melalui kampanye, memberikan materi pendidikan kesehatan reproduksi dan keberagaman gender seksualitas dirasa penting bagi setiap manusia.

Dalam pergerakannya Rumah Pelangi Indonesia mengukung beberapa program dan kegiatan untuk anggota yang bertujuan mewujudkan visi dan misi komunitas yakni:

1. Paralegal

Paralegal merupakan kegiatan dimana anggota komunitas belajar mengenai pendokumentasian kasus dan penanganan kasus kekerasan berbasis SOGIE-SC. Anggota komunitas mendapatkan pelatihan dari pemateri yakni pengurus mengenai bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan ketika mengalami perlakuan buruk dan tidak menguntungkan. Mereka diajarkan oleh pengurus ketika pelatihan paralegal untuk selalu menuliskan kronologis kasus sesuai 5 W + 1 H yang dapat mempermudah tim pengadvokasian kasus Rumah Pelangi Indonesia dalam pelayanan hukum ketika anggota ingin menyelesaikan kasus di Pengadilan.

2. Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS

Kegiatan ini merupakan edukasi dan pelayanan yang didapatkan anggota dalam komunitas mengenai reproduksi serta HIV/AIDS. Kerentanan kelompok LGBTIQ terhadap

permasalahan reproduksi dan penyakit menular membuat edukasi penting dilakukan maka dari itu, komunitas menjadikannya sebagai program kerja rutin. Dalam kegiatan edukasi komunitas bekerja sama dengan PKBI Kota Semarang mengenai bagaimana menghindari perilaku menular seksual dan melakukan hubungan seksual aman. Kegiatan pelayanan konseling rutin pengecekan status HIV/AIDS oleh komunitas kepada anggotanya berupa pemeriksaan VCT dengan kerja sama pada Dinas Kesehatan Kota Semarang.

3. Kampanye

Merupakan salah satu program kerja komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar kelompok LGBTIQ. Kampanye yang dilakukan bisa secara langsung (offline) maupun tidak langsung (online). Kampanye langsung dilakukan Rumah Pelangi Indonesia dalam keterlibatannya pada peringatan Hari Perempuan Internasional di Kota Semarang bersama jaringan sosial dan komunitas lainnya, kampanye peringatan *International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia* (IDAHOBIT) dan *pride* Indonesia. Sedangkan, kampanye online komunitas diwujudkan melalui penyebaran pamflet dan gambar kejadian di sosial medianya mengenai tuntutan atas kekerasan dan perlakuan diskriminasi yang dialami kelompok LGBTIQ.

4. Diskusi dan Pelatihan

Merupakan bentuk edukasi komunitas kepada anggotanya mengenai sebuah topik yang dapat memperluas wawasan. Seperti, pada masa pandemi ini komunitas aktif membuat webinar mengenai kondisi dialami kelompok LGBTIQ masa pandemi dan keberadaan LGBTIQ dalam perspektif hukum dan agama. Sedangkan pelatihan, dalam bentuk pengembangan soft skill anggota seperti, pelatihan *leadership* dan pelatihan keterampilan yang dilakukan bekerja sama dengan jaringan sosial.

BAB IV

INTERAKSI SOSIAL DAN ALASAN LGBTIQ MEMBENTUK KOMUNITAS

A. Interaksi Sosial Kelompok LGBTIQ Pandangan terhadap Kehidupan Sosialnya

Pada dasarnya kelompok LGBTIQ di kota-kota besar seperti Kota Semarang memiliki mobilitas tinggi tetapi keseluruhan mereka mendapatkan respon negatif masyarakat karena pemberitaan-pemberitaan negatif media mengenai keberadaannya (Nurcahya, 2020). Kehidupan kelompok LGBTIQ di Kota Semarang berada pada posisi dilematis, disatu sisi mereka dapat diterima, tetapi pada satu sisi yang lain mereka diujat dengan penolakan secara besar-besaran oleh masyarakat. Kelompok minoritas seksual dianggap sebagai seseorang dengan kondisi menyimpang dan faktor lingkungan buruk menyebabkan mereka terjerumus pada orientasi seksual penyuka sesama jenis. Padahal kehidupan mereka kerap kali mendapatkan kekerasan fisik (pemukulan), kekerasan psikis atas stigma yang melekat dalam diri mereka, kekerasan ekonomi penelantaran dan pemecatan kerja serta diskriminasi dilingkungan sosial. Terutama bagi kelompok transpuan penindasan yang dialami berlapis, yakni tidak hanya terekslusifkan dalam kehidupan masyarakat saja, tetapi juga mereka berasal dari kelompok miskin sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses layanan publik dengan maksimal.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat sulit menerima LGBTIQ yang bersumber pada ungkapan informan dalam wawancara penelitian ini. Pertama, secara keseluruhan masyarakat memandang perilaku penyuka sesama jenis dilarang oleh agama/Tuhan. Ketika seorang LGBTIQ mencoba untuk *coming out* kepada orang terdekatnya mereka

dipandang mengkhianati Tuhannya. Oleh karena itu, masyarakat merasa tidak perlu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada LGBTIQ. Kedua, LGBTIQ dianggap sebagai kebiasaan buruk karena sebuah *lifestyle* yang bisa diubah apabila individu tersebut berkeinginan kuat dalam mengubah perilakunya. Perilaku seksual *anal sex* atau sodomi dipandang sebagai cara hidup yang aneh karena bertabrakan dengan norma-norma masyarakat. Kelompok LGBTIQ dipandang salah dalam pergaulan, sehingga mereka terjebak pada kehidupan sosial menyimpang. Ketiga, masyarakat belum memahami keragaman gender dan perlindungan hak asasi manusia terhadap keseluruhan orang tanpa memandang suatu apapun terutama tidak boleh mendiskriminasi dan melakukan kekerasan terhadap LGBTIQ. Walaupun, pemerintah telah menggolongkan minoritas seksual di luar orang dalam gangguan kejiwaan tetap saja sulit bagi masyarakat menerima mereka. Seperti yang dikatakan salah satu informan dalam wawancara penelitian mengenai LGBTIQ yang sulit diterima di kehidupan masyarakat sebagai berikut:

“Menjadi LGBTIQ susah ya, selama saya kecil dari SD sudah menjadi transpuan menurut saya masyarakat masih pada taraf yang kolot tidak mau menerima pengetahuan baru dan ketika tidak mau tahu itu malah melakukan kekerasan dan membenci. Kalau di Jawa sendiri memang susah ya, karena budaya patriarki yang mengakar pandangan feminin dan maskulin. Laki-laki harus seperti ini dan perempuan harus begini kalau beda itu dianggap aneh dan itu sudah turun-temurun kami itu ditolak nomor satu karena agama intinya agama gabisa menerima kami padahal, mau bagaimana kita beriman dan bertuhan itu urusan masing-masing pasti setiap manusia punya cara masing-masing dan kami masih bertuhan.”(R, 24 Februari 2021).

Keempat, kelompok LGBTIQ tidak ingin orientasi seksualnya diketahui oleh banyak orang terutama orang tua mereka karena takut akan timbul konflik dalam keluarga. Bahkan banyak diantara mereka diusir dari rumah saat menyatakan dirinya sebagai LGBTIQ. Rasa malu orang tua ketika memiliki anak dianggap menyimpang secara seksual oleh masyarakat pada umumnya, menjadi kekhawatiran sehingga seringkali para orang tua mengusir anaknya dari rumah. Ketidakdilan yang dialami

kelompok LGBTIQ dalam kehidupan sosial tidak terlihat oleh khalayak, sehingga perlakuan buruk atas persoalan mereka tidak dianggap suatu hal yang *urgent* dalam perdebatan isu sosial, berbeda dengan isu etnis, agama dan perempuan yang tampak secara fisik di depan mata dan terekspos dalam media. Alasan tersebut mendasari mengapa banyak pihak menolak dan tidak ingin menerima LGBTIQ sebagai manusia yang memiliki hak setara dengan individu lainnya. Dalam penelitian ini akan diungkap interaksi sosial bagaimana pandangan kelompok LGBTIQ terhadap dirinya sebagai berikut:

a. Ranah Sosial Kemasyarakatan

Tidak banyak orang di lingkungan masyarakat yang mampu menerima LGBTIQ. Oleh karena itu, kelompok LGBTIQ sangat menjaga sikap di lingkungan sosial, mereka tidak ingin terjadi konflik akibat keberadaannya. Terutama, ketika dirinya diketahui memiliki orientasi seksual yang berbeda sehingga terdapat kekhawatiran jika masyarakat tidak mau menerimanya. *Coming out* dan *coming in*, dua istilah yang mempengaruhi LGBTIQ dalam menjalankan kehidupan. Istilah pertama, *coming out* yakni sikap membuka diri kepada masyarakat atas orientasi seksualnya meskipun terdapat pertimbangan berat bagi seseorang LGBTIQ karena resiko dari tindakan tersebut mungkin keluarga dan masyarakat tidak bisa menerima. Kedua, *coming in* yakni sikap seseorang LGBTIQ menerima bahwa dirinya berbeda dengan orientasi seksual heteroseksual (Galink, 2013). Istilah yang kedua terbilang penting bagi minoritas seksual, karena ketika dirinya tidak bisa menerima kondisi akan timbul depresi dan berakibat fatal pada kesehatan dirinya. Hal ini diperjelas oleh YI seorang gay dalam mengambil sikap di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya sebagai berikut:

“Sampai saat ini aku masih menutupi identitasku sebagai gay malah yang tau itu pakdeku. Aku cenderung terbuka kepada teman-teman di luar kalau untuk keluarga aku menghindari soalnya takut menjadi contoh yang buruk

untuk adiku. Untuk menutupi perbedaanku, aku cenderung mencari kesibukan di luar jadi di rumah ngobrol seperlunya aja. Kalau yang menerima sih beberapa temanku dia seorang dokter psikolog aku pernah konsultasi sama dia dan selalu dia menyamangati aku dan pilihlah jalan terbaik untuk dirimu apapun yang dirasa nyaman.”(YI, 23 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, YI mengatakan sebagai seorang gay dia harus menjaga sikap untuk menghindari konflik dengan keluarga dan masyarakat lingkungannya. Masyarakat sekitar YI cenderung cuek terhadap sikap/perilaku orang lain tidak ada interaksi sosial aktif antar masyarakat lingkungannya walaupun demikian, hingga saat ini dia tidak bisa sepenuhnya terbuka dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Hal berbeda dialami oleh RK seorang transman mengambil sikap sebagai berikut:

“Sebetulnya aku cuek aja dengan orang di sekitar tempat tinggalku. Aku ya berpenampilan layaknya pria dengan tubuh dan jenis kelamin perempuanku. Dibidang *coming out* secara terbuka kepada orang-orang belum tapi, orang-orang mungkin sudah bisa menilai aku bagaimana melalui penampilan dan cara bicaraku. Cuma mamah kadang khawatir, jadi dulu aku seringnya disuruh main di dalam karena takut diomongin orang-orang soalnya aku sering bawa temen-temen kebanyakan cewe ke rumah.

Kalau aku sama orang tua udah *coming out*, respon pertamanya aku dimarahin ditanya kenapa bisa begitu ya aku jawab sebetulnya udah lama mah sejak SD cuma aku belum bisa memahami kondisiku yang seperti itu. Respon orang tua aku pernah di bawa ke tempat ruqiyah dibacain doa-doa dijelasin tentang tingkatan neraka juga dibawa ke dukun dibacain mantra suruh naruh sesaji di perempatan. Ya aku bilang ke mama ndak usah lah ma, itu ndak ngefek mending uangnya buat kakak aja.”(RK, 28 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, RK mengatakan dia cenderung cuek dengan sikap dan perilaku dirinya mungkin masyarakatnya sekitarnya sudah bisa menilai sendiri tentang perilakunya. Pertama kali orang tua mengetahui orientasi seksual RK mendapatkan penolakan secara ucapan dan mengupayakan tindakan penyadaran untuk sang anak melalui jalan ruqiyah dan dukun yang

tidak membuahkan hasil sesuai. Tindakan orang tua RK dengan mengajak anak ke dukun dan ruqiyah disebut dengan terapi konversi. Praktik terapi konversi bertujuan mengubah seseorang dari non-heteroseksual ke heteroseksual atau dari ragam gender ke cisgender (identifikasi pribadi bahwa gender/seksnya sama dengan yang ditetapkan sejak lahir) melalui pendekatan seperti, psikoterapi, medis dan agama. Terapi konversi biasanya dilakukan dengan pendekatan mempermalukan, merendahkan dan diskriminatif yang mengakibatkan rasa malu, bersalah dan jijik terhadap diri sendiri. RK mengatakan, dirinya cenderung cuek dan tidak mempedulikan tanggapan orang lain serta tidak mengurangi interaksi sosialnya di masyarakat, walaupun identitas gendernya berbeda dari heteronormativitas (Wawancara dengan RK, 28 Maret 2021). Berbeda dengan informan R mampu *coming out* mengenai identitasnya kepada masyarakat sebagai berikut:

“Dari kecil aku sudah terbuka kepada keluarga, saudara dan masyarakat. Sejak kecil aku sudah suka berpenampilan perempuan dan aku punya teman masa kecil juga seorang transpuan. Dari dulu aku suka pakaian perempuan, cara jalan perempuan, sehingga masyarakat di tempat tinggalku sudah pada tau dan suka nyinyir sama ekspresi genderku. Cuma cuek dalam menyikapinya, menurutku kenapa kita harus membodohi dan menipu diri untuk membuat diri kita sesuai keinginan mereka. Kita sebagai manusia biasa juga ingin saling membantu, ingin kehidupan normal kalau bisa orang yang suka mendiskriminasi tunjukan saja hal positif kita.”(R, 23 Februari 2021)

Tidak semua LGBTIQ terbuka mengenai identitasnya kepada khalayak umum. Ada ruang tertentu yang membuat mereka mampu mengungkapkan jati dirinya. Seseorang akan cenderung melihat apakah lingkungannya kondusif menerima keberadaannya. Jika dilihat lingkungan tersebut kurang mampu menerima kehadirannya, dia akan cenderung menutupi jati dirinya. Hal ini juga disampaikan oleh W dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Kalau aku belum *coming out* sama keluarga dan lingkungan kecuali, adiku dan respon dia cenderung itu

jalanmu yang dipilih semoga kamu nyaman. Aku cenderung menutup diri dari lingkungan masyarakat, aku suka menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku juga jarang sih kak, bawa teman laki-laki ke rumah karena aku sendiri terakhir pacaran sama laki-laki waktu SMP dan itu bikin nggak nyaman.

Tapi mungkin secara tidak langsung tetanggaku tau karena kesalahanku tinggal sama mantanku yang transman di rumah orang tua selama beberapa bulan sejak saat itu beda aja gitu karena banyak tetangga yang bertanya-tanya kenapa ngijinin cewe tomboy tinggal bareng anaknya. Di lingkungan masyarakat memang aku jarang berinteraksi, terlebih semanjak masyarakat banyak yang merespon buruk aku merasa banyak yang mengucilkan aku jarang diajak kumpulan sama remaja. Sebetulnya kalau diajak aku ya mau aja apalagi kalau akunya bermanfaat secara tenaga maupun pikiran. Respon terakhir masyarakat, waktu bangun rumah ada yang nyindir, mereka sukanya nyindir ke orang tua bilanganya mana calon mantumu coba sini suruh buka baju kalo berani.”(W, 27 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, W mengatakan belum bisa *coming out* di keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, perilaku W yang tidak pernah membawa teman laki-lakinya ke rumah, tetapi mengajak teman perempuannya tinggal serumah dengan orang tua menyebabkan masyarakat sekitar rumah bertanya-tanya dan menimbulkan pergunjungan di belakang mengenai identitasnya. Berbeda informan penelitian AA mengenai pandangan perilaku dirinya kepada keluarga dan masyarakat:

“Aku nggak pernah menutupi penampilan femininku dari masyarakat. Hal tersebut yang akhirnya membuat aku ketahuan itu karena tetangga sukanya julid, ya kita baik aja dijulidin apalagi buruk. Sebenarnya orang tuaku nggak begitu memperlmasalahkan tapi ketika tetangga udah ngomong yang enggak baik kaya kok anakmu cowo tapi kaya cewe sih. Orang tua secara tidak langsung sudah paham sebelumnya, tapi mungkin nggak bilang aja. Orang tua suka mengingatkan jangan pakai baju itu ntar dikira kamu perempuan, tapi aku sukanya bandel nggak suka aja pakai baju kelihatan maskulin. Walaupun, masyarakat sudah bisa menilai seperti apa diriku, namun aku selalu menjaga sikap untuk tidak terjadi konflik di masyarakat maupun keluarga mengenai identitas genderku.”(AA, 16 Februari 2021)

Berdasarkan paparan AA, dirinya tidak pernah menutupi penampilan femininnya di masyarakat maupun keluarga. Hal tersebut pada akhirnya membuatnya harus *coming out* kepada keluarga karena munculnya berita burung yang tidak mengenakan, sehingga AA terpaksa *coming out* dengan keluarga. Sedangkan, dirinya belum bisa *coming out* seutuhnya kepada masyarakat karena takut tidak bisa diterima. Dalam wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat masih sangat menolak keberadaan kelompok LGBTIQ, beberapa informan merasa pihak yang paling mendukung dan menerima dirinya adalah keluarga selain itu pihak lain seperti LSM, komunitas dan teman-teman yang bisa menerima kondisinya.

Sebagai seorang minoritas seksual di Indonesia memang sangat sulit bagi mereka bisa diterima di masyarakat salah satu cara agar bisa diterima semakin menunjukkan hal positif dalam dirinya seperti, kepintaran ilmu akademik, pekerjaan yang memadai seorang transpuan terkenal dipekerjaan *make up artist*, salon dan *master of ceremony* (MC) serta banyak membantu orang sekitar sehingga kehidupan mereka dipandang positif harapannya masyarakat bisa berfikir dibalik keburukan mereka mengenai orientasi seksual, secara perilaku lain masih bisa diterima dan dibutuhkan orang lain. Kesimpulan dari pandangan kelompok LGBTIQ mengenai dirinya di lingkungan sosial, sebagian besar dari mereka cenderung menutup diri untuk menghindari konflik mengenai identitas gendernya. Padahal respon positif dari masyarakat sangat perlu, karena ketika banyak masyarakat yang mendukung dan menganggap dirinya kehidupan mereka akan terasa aman dan nyaman dalam melakukan segala aktivitas.

b. Ranah Pendidikan

Dalam dunia pendidikan kelompok LGBTIQ khususnya gay, lesbian, interseks dan queer cenderung menutup diri. Pendidikan tempat menimba ilmu belum sepenuhnya menghargai keberagaman gender dan seksualitas. Kondisi kelompok LGBTIQ dalam satu

kampus mungkin teman-teman dapat mendukung dan menganggap cuek atas orientasi seksual seseorang. Namun, terdapat pula kampus yang menganggap penyuka sesama jenis bukan hal yang wajar. Sehingga, institusi tersebut tidak bisa menerima kehadiran kelompok LGBTIQ dalam dunia pendidikan. Seperti dalam wawancara penelitian informan YI yang mengatakan temannya bernama NY diketahui gay oleh pihak kampus langsung diberhentikan dari pendidikan kuliahnya oleh salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang hal yang membuat miris adalah ketika dia sudah sampai tahap pembuatan tugas akhir (Wawancara dengan YI, 23 Februari 2021). Alasan kelompok LGBTIQ menutup identitas gendernya dari lingkungan pendidikan karena kekhawatiran mendapatkan penolakan dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dunia pendidikan tempat menimba ilmu dengan segala pengetahuan yang didapatkan oleh individu didalamnya nyatanya belum bisa menerima seseorang dengan orientasi seksual di luar heteronormativitas. Pengalaman informan AA dalam wawancara mengenai sikap dirinya di dunia pendidikan sebagai berikut:

“Setahun yang lalu aku mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang, mengenai identitas dengan teman-teman aku terbuka aku bilang aku trans, kalau kalian mau berteman dengan aku silahkan. Respon teman-teman sih baik ya karena aku juga tergolong orang yang berprestasi jadi mengenai aku sebagai trans tidak dianggap sebuah hal aneh dan menjadi permasalahan berkepanjangan. Aku nggak menutupi identitas genderku dengan teman-teman, karena aku yakin pasti bisa menjadi pribadi baik dengan segala kemampuanku.

Kalau sejak aku SD sampai SMA aku sering mengalami pembullying seperti dikatain bencong, melambai sampai namaku AA ini adalah hasil dari bullying teman-teman aku, mereka mengejek sekaligus memberi nama ya aku berdoa semoga namaku menjadi berkah. Kalau di pendidikan aku sering sih dapat pelecehan seksual seperti dipegang pantatnya dan ditowel payudaranya.”(AA, 14 Februari 2021)

Menjadi seorang LGBTIQ berarti seseorang harus berani menerima resiko terburuk dialami ketika identitasnya diketahui banyak

orang. Hal ini diperjelas oleh pandangan AG mengenai interaksi sosialnya di dalam dunia pendidikan sebagai berikut:

“Pada waktu itu teman-teman tahu kalau aku seorang LGBTIQ lebih tepatnya seorang transpuan respon mereka sangat buruk pernah waktu aku selesai pulang mata kuliah aku jalan didekat taman kampusku ada beberapa teman duduk dari belakang dia melempari pakai cabe dan ngatain banci-banci. Aku sangat menjaga sikap dan menunjukkan versi terbaik dari diriku. Di kampus aku cukup beprestasi namun, sangat disayangkan aku nggak bisa daftar beasiswa prestasi dengan alasan identitas genderku. Aku kecewa sih waktu itu. Aku sudah berusaha bilang ke pihak kamu tapi, tetap nggak bisa padahal aku sudah berusaha memiliki akademik yang bagus namun ekspresi genderku tidak bisa diterima oleh lingkungan pendidikan.”(AG, 1 Maret 2021)

Dalam hasil wawancara dengan informan terlihat bahwasanya kelompok LGBTIQ belum bisa diterima dalam dunia pendidikan, padahal keinginan seseorang untuk menimba ilmu pendidikan tidak lain mengembangkan kapasitas dirinya yang mungkin terpendam. Ketika dunia pendidikan tidak bisa menerima kelompok LGBTIQ sangat disayangkan bakat anak muda tidak bisa tersalurkan. Hal berbeda dialami O seorang gay dalam ranah pendidikan sebagai berikut:

“Kalau saya di lingkungan kampus sejauh ini bisa diterima terutama dengan teman-teman. Ya ada sih beberapa teman yang nggak suka, dengan alasan saya sendiri kan kuliah jurusan teologi kenapa kok bisa memutuskan dengan orientasi seksual non heteroseksual. Cuma ya sejauh ini masih bisa diterima, nggak ada cibiran yang merendahkan. Di lingkungan pendidikan aku cukup aktif di beberapa organisasi kampus, aku juga sering mengisi materi berbagi ilmu lah sama teman-teman bagiku pendidikan penting apalagi lingkungan yang nyaman sangat berguna untuk mengembangkan kapasitasku. Aku juga tidak menutup diri dari teman-teman selagi aku berguna secara tenaga dan pikiran untuk mereka.”(O, 28 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, O mengatakan lingkungan pendidikannya cenderung bisa menerima kondisinya, tetapi ada juga beberapa teman yang menyesalkan keputusan O ini dengan

alasan bidang perkuliahannya yakni teologi seharusnya lebih memahami kaitan agama dan orientasi seksual. Namun demikian, beberapa kelompok LGBTIQ dalam proses wawancara menyesalkan lingkungan pendidikan formal yang kurang menyediakan pendidikan mengenai seksualitas. Institusi pendidikan menganggap pembelajaran tersebut kurang penting pasalnya akan menjerumuskan individu pada perilaku seks pra-nikah. Hal ini menyebabkan, orang dengan orientasi seksual di luar heteronormativitas dianggap tidak wajar karena ketabuan pengetahuan serta sebagian besar pihak mengasosiasikan perihal seksualitas dengan moralitas agama. Pengalaman YI dalam melakukan konseling RPI di instansi pendidikan ketika seorang guru SD swasta di Kota Semarang meminta bantuan RPI untuk mengedukasi perihal resiko gay. Hal ini disampaikan oleh YI dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Waktu itu ketika saya dimintai tolong dari pihak sekolah saya langsung datangi sekolahnya dan pihak sekolah langsung menceritakan kronologisnya. Lalu saya mencoba bicara dengan anak itu selama melakukan proses konseling aku bilang sama si anak apa yang menyebabkan kamu terbuka menjadi gay, kamu paham apa nggak resikonya, masih di bawah umur lebih baik fokus ke pendidikan aja dan pikirkan matang-matang untuk menjadi seorang gay itu berat lho. Saya memberikan konseling tapi keputusan itu kembali ke anak khawatirnya kan masih di bawah umur.”(YI, 23 Februari 2021)

Hasil wawancara peneliti dengan informan bahwasanya ada kekhawatiran dalam dunia pendidikan ketika seorang anak belum memahami betul apa itu kelompok LGBTIQ dan dampak apa yang diterima dalam kehidupannya kedepan. Individu LGBTIQ dalam kampus dan sekolah tidak lain bertujuan menuntut ilmu, namun keberadaan mereka masih saja dipandang negatif, seperti kekhawatiran bermesraan di kampus dan sekolah tak jarang timbul cibiran dan perlakuan diskriminatif diterima individu LGBTIQ. Dengan demikian, lingkungan pendidikan masih dipandang buruk dan tidak aman bagi

kelompok LGBTIQ. Fenomena tersebut tidak lain karena, kekhawatiran masyarakat konsep laki-laki dan perempuan yang terbangun berbanding terbalik pada kelompok LGBTIQ dianggap tidak bisa mengadopsi sifat feminin dan maskulin seutuhnya.

c. Ranah Pekerjaan

Kelompok LGBTIQ di ranah pekerjaan amat menjaga sikap. Hal tersebut dilakukan menutupi identitas gendernya dari rekan kerjanya. Individu LGBTIQ yang mendapatkan diskriminasi atau tidak diterima di lingkungan pekerjaan akan berdampak pada menurunnya tingkat kreativitas akibat dari perlakuan tersebut psikis seseorang akan terpengaruh rentan mengalami ketepurukan. Menurut beberapa informan dalam wawancara penelitian pada dasarnya kelompok LGBTIQ dalam dunia pekerjaan bisa diterima asal menunjukkan perlakuan wajar. Berbeda dengan seorang transpuan untuk mendapatkan pekerjaan formal sulit. Secara ekspresi gender seorang trans berbeda dengan jenis kelaminnya, sehingga banyak pihak menolak kondisi tersebut. Hal ini diperjelas oleh pengalaman AA seorang transpuan *fresh graduate* sebagai berikut:

“Aku setelah setahun lulus kuliah ini udah ada pekerjaan tapi, modelnya LSM kalau untuk mendaftar di sektor formal rasanya sulit ya apa ada pihak yang mau menerima kondisiku takutnya malah aku mendapatkan kekerasan. Di lingkungan tempat bekerja aku sekarang nyaman karena sama-sama memperjuangkan kelompok marginal aku suka hal tersebut, menjalin banyak relasi dengan orang lain, bertemu dengan lingkungan baru dan tempat kerjaku sekarang aku kerap menjadi pemateri sehingga ilmuku bisa bermanfaat untuk orang lain rasanya sebuah kebanggaan tersendiri.”(AA, 14 Februari 2021)

Informan lain yakni GR dan AH adalah seorang dengan orientasi seksual penyuka sesama jenis yakni biseksual. Menurut AH, ada beberapa pekerjaan di Kota Semarang yang aman bagi kelompok LGBTIQ karena mereka hanya mementingkan *skill* dan

pengorganisasian seseorang tanpa mempedulikan identitas gendernya (Wawancara dengan AH, 18 Februari 2021). Hal tersebut diperjelas penyampaian RK seorang transman di ranah pekerjaan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau aku sendiri belum pernah ya mengalami kejadian buruk, mungkin kalau kerja sama orang kadang pemilik bilang kamu tu cowo apa cewe ko penampilannya kaya gini. Ya aku bilang maaf ya bu, saya pakaiannya seperti ini aja lebih nyaman dan untungnya pemiliknya memahami. Cuma ada beberapa teman transman mengalami kejadian buruk dipecat dari pekerjaan. Kalau transman yang dijaga itu penampilannya. Kita kan penampilannya cowo, cuma secara tubuh cewe jadi merasa risih kalau pakai lipstick sama rok.”(RK, 28 Maret 2021)

Dalam lingkungan pekerjaan, orang dengan kondisi biseksual, lesbian dan gay cenderung bisa diterima dalam lingkungan pekerjaan asalkan tidak secara terbuka mengatakan kalau dirinya penyuka sesama jenis. W mengatakan, kelompok trans cenderung menutup diri di lingkungan pekerjaan agar tidak terjadi konflik mengenai identitas gendernya. Hal tersebut dialami mantan kekasihnya seorang transman berupaya menutupi identitas namun, ketahuan oleh rekan kerjanya melalui akun media sosialnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Dalam interaksi sosial W dengan rekan kerjanya terjalin dengan baik dia terbuka mengenai identitas gendernya hanya, saja beberapa teman suka membullyan dirinya karena menyukai orang dengan gender/seks sama dengannya (Wawancara dengan W, 27 Februari 2021). Berikut pengalamannya dalam dunia pekerjaan dalam hasil wawancara mendalam dengan informan GR sebagai berikut:

“Aku sempat menjadi guru di sekolah swasta, waktu itu nggak ada yang aneh dan mempertanyakan identitasku tapi aku keluar aja takut ada masalah dikemudian hari. Untuk saat ini aku jadi karyawan di perusahaan swasta kota Semarang dan AH juga jadi koki di *restaurant* yang cukup terkenal di Semarang selama ini sih, kalau biseksual aman saja karena secara postur tubuh dan perilaku nggak ada keanehan jadi aman.”(GR, 14 Februari 2021)

Menjadi seorang LGBTIQ memang rentan dalam kehidupannya tidak hanya permasalahan tidak bisa diterima dalam keluarga, tetapi juga ranah pekerjaan yang tidak bisa menerima perbedaan sehingga mereka rentan kehilangan pekerjaan apabila identitasnya diketahui banyak orang. Kelompok LGBTIQ dengan segala stigma dan diskriminasi yang dialami, seharusnya tidak menjadikan mereka terpuruk terus berlatih dalam mengembangkan keterampilan melakukan hal-hal positif dan pemajuan ekonomi.

Pandangan masyarakat mengenai kelompok LGBTIQ berkaitan dengan hegemoni budaya patriarki, narasi feminin dan maskulin dalam akar penindasan patriarki digunakan masyarakat untuk menolak ekspresi gender seorang penyuka sesama jenis. Menurut Gramsci, faktor pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi yang diciptakan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan dan membentuk pola pikir masyarakat (Ridu, 2019). Dalam hegemoni budaya patriarki, secara tidak langsung pemikiran mengenai kebenaran atas ekspresi gender laki-laki harus maskulin dan perempuan feminin akan mengakibatkan kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ. Hegemoni masyarakat mengenai maskulin dan feminin ketidaksengajaan yang dilakukan berupa cacian kepada LGBTIQ dengan unsur spontanitas.

Adapun alasan mengapa masyarakat terus mendominasi kelompok LGBTIQ adalah perilaku maskulin dan feminin mereka yang tidak sesuai dengan postur tubuh dianggap sebagai tidaknormalan. Sosok laki-laki terkonstruksi dimasyarakat sebagai pribadi yang tegas, berwibawa, memakai celana, tidak suka merawat wajah dan menjadi pelindung wanita yang hal tersebut tidak bisa ditemukan pada laki-laki feminin yang seolah berbanding terbalik dengan kodratnya lelaki, tetapi berperenampilan dan berperan layaknya wanita dalam masyarakat. Konstruksi gender tentang perempuan feminin dan laki-laki maskulin dianggap normal. Sehingga, ekspresi gender yang berbeda terkesan tabu akibatnya seolah-olah mereka dikucilkan dalam masyarakat. Hal ini diperjelas oleh argumentasi GR dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Masalah laki-laki ada dikonstruksi masyarakat gambaran laki-laki seperti ini itu dianggap aneh sama dengan perempuan, sehingga timbul diskriminasi berupa cacian laki-laki ko cengeng, laki-laki ko senenge dandan, laki-laki ko perawatan, laki-laki ko ora tau pacaran karo wong wedok, laki-laki ko pendek kui wedok opo lanang.”(GR, 14 Februari 2021)

Dalam pengakuan GR mengenai hegemoni budaya patriarki feminin dan maskulin, terdapat kekhawatiran terutama transpuan dan transman yang terlihat berbeda secara fisik dan penampilannya. Ketika mereka memberikan kebebasan dalam diri mengenai ekspresi gender, muncul ketakutan timbul apabila ditolak dalam masyarakat dan diasingkan dalam kehidupan sosial (Wawancara dengan GR, 14 Februari 2021). Maka dari itu, jarang sekali seorang trans *coming out* kepada masyarakat karena rentan terhadap pembullying. Pandangan seksualitas mengenai manusia dimana heteroseksual dianggap sesuatu normal dan alami mengakibatkan terjadinya hegemoni yang memandang heteronormativitas sebagai konsep seksualitas normal, sedangkan sub kultur seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual dan queer dianggap non normatif (Nurussalikhah, 2015). Perspektif dan konstruksi masyarakat mengenai kelompok LGBTIQ adalah non normatif, sehingga keberadaan mereka dianggap sebagai bentuk penyimpangan, melabelkan buruk dalam diri mereka dan menjadikannya sebagai korban stigmatisasi. Tidak hanya masyarakat di lingkungan sosial, lingkungan pertemanan di sekolah juga menjadi sarana pembullying yang dialami kelompok LGBTIQ. Hal tersebut disampaikan oleh AH dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Waktu SMP saya sering diolok-olok karena saya nggak suka main bola jadi dikatain bencong dan lemah.”(AH, 20 Februari 2021)

Pandangan masyarakat mengenai lelaki feminin menyebabkan mereka terusik karena dipermalukan di depan umum. Bahkan, hal tersebut menjadi sebuah kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperjelas oleh R seorang transpuan di Kota Semarang mengenai pengalamannya sebagai berikut:

“Pandangan masyarakat mengenai transpuan masih buruk saya sering didiemin dulu ga diajak ngobrol dan dikatain koe lanang ko

nganggo katok dowo ora nggo rok wae. Sering dicemooh dan dipertanyakan femininitas dan maskulinitas bahkan, saya dianggap punya kepribadian ganda padahal menurut saya gaya berpakaian jaman sekarang perempuan juga pakai celana ada juga yang merokok. Dulu waktu saya masih sekolah sering dikatain koe ki lanang kenopo rambute dowo, kenopo koe klambine ketat-ketat kaya wong wedok. Dulu kan saya suka nonton sailor moon, dikatain tuh lanang ko tontonane wedok wong lanang ki nontone tinju karo bal-balan.” (R, 23 Februari 2021)

Identifikasi diri seseorang apakah dirinya seorang laki-laki atau perempuan tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan karena memiliki sifat *fluid* dan beragam (Arivia dan Gina, 2015). Ketika kita menyederhanakan berarti mengeksklusifkan bahkan mendiskriminasi identitas diri seseorang. Pemahaman mengenai jenis kelamin, orientasi seksual dan ekspresi gender penting ketika seseorang berusaha memahami dan mencari tahu akan membuat dirinya lebih arif dalam mengambil keputusan mengenai identitas seseorang dan toleransi terhadap individu di lingkungan sosialnya. Masyarakat yang tidak mau menyadari kekompleksitas tersebut akan cenderung menolak dengan menghasilkan pandangan homofobia, seksisme dan transfobia.

B. Faktor Pendorong Terbentuknya Komunitas LGBTIQ di Kota Semarang

Terbentuknya komunitas LGBTIQ tidak lepas dari keberanian dan tekad para LGBTIQ. Menjadi seorang aktivis LGBTIQ penuh dengan tantangan stigma yang melekat tidak hanya secara personal dalam kehidupan pribadi, tetapi upaya mewadahi minoritas seksual kerap mendapatkan pertentangan dari banyak pihak. Perbedaan yang sangat mencolok ketika seseorang harus membangun organisasi pada bidang pemberdayaan keterampilan dengan pemberdayaan kelompok LGBTIQ. Akan terlihat bagaimana stigma moral tidak dilekatkan ketika seseorang mengakomodir kelompok keterampilan yang dipandang sebagai kelompok “*hetero*”, tetapi bila seseorang menjadi perintis sebuah wadah bagi kelompok minoritas seksual stigma moral dilekatkan pada keseluruhan tindakan.

Konsekuensi yang harus diterima ketika seseorang memutuskan menjadi aktivis LGBTIQ, bahkan akan kehilangan kehidupan sosialnya. Hanya segelintir pihak yang memiliki wawasan terbuka dengan serta merangkul dan membantu kebutuhan organisasinya. Berdirinya komunitas LGBTIQ di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Solo, Jakarta, Tegal, Salatiga dan Semarang tidak lain untuk memenuhi kebutuhan minoritas seksual yang mencari ruang aman atas berbagai tindakan. Seperti, diskriminasi, stigma dan kekerasan karena status LGBTIQ yang dianggap menyimpang. Atas perlakuan buruk dan tidak menguntungkan dialami kelompok LGBTIQ sulit bagi mereka mendapatkan akses pelayanan yang sama sebagai warga negara. Berdirinya komunitas LGBTIQ tidak lain sebagai jembatan bagi minoritas seksual mendapatkan hak layak seperti akses menuntut keadilan.

Selama ini individu LGBTIQ sulit dalam mengakses pelayanan hukum karena adanya kekhawatiran atas perlakuan buruk yang akan diterima karena kesalahan penyimpangan yang dilakukan. Sehingga, sering kali mereka tidak direspon baik oleh aparat hukum ketika membuat pelaporan korban. Seorang individu membentuk komunitas dengan membangun relasi sosial atau sebuah kerja sama yang memungkinkan anggotanya dapat terpenuhi kebutuhannya, serta mendapatkan dukungan secara fisik dan psikis ketika seseorang tergabung dalam komunitas. Akan terwujud ruang aman bagi kelompok LGBTIQ ketika mampu mensosialisasi diri di lingkungannya dan berani menerima kondisinya menjadi kunci utama untuk memperkuat komunitas, sehingga tidak menjadikan dirinya lemah dimata masyarakat. Hal ini disampaikan oleh GR mengenai sejarah terbentuknya komunitas Sobat Semarang (nama lain dari Rumah Pelangi Indonesia) sebagai berikut:

“Pada waktu itu beberapa kelompok gay berkumpul dalam perayaan IDAHOT di alun-alun simpang lima Kota Semarang. Setelah beberapa kali pertemuan mereka sering berkumpul ada rasa aneh kalau mereka hanya bertemu ketika pertemuan aja, lalu

mereka berinisiatif membentuk komunitas yang mengakomodir teman-teman gay seperti, memberi edukasi, berkumpul, berbagi pengalaman dan sharing kasus yang dialami di tempat tinggalnya.”(GR, 14 Februari 2021)

Jika dilihat dalam tiga tahap proses konstruksi sosial milik Peter L. Berger proses konstruksi sosial ini berlangsung dalam proses tiga momen simultan yakni proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pertama, eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Kedua, objektivasi yaitu interaksi sosial yang terjadi di dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusional. Ketiga, internalisasi yaitu proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya (Bungin, 2008). Adapun proses konstruksi sosial kelompok LGBTIQ dalam membentuk komunitas yakni sebagai berikut:

1. Eksternalisasi

Perlakuan buruk yang diterima kelompok LGBTIQ di lingkungan sosialnya merupakan proses eksternalisasi dimana seseorang berusaha bangkit untuk membentuk sebuah komunitas saran bagi mereka mencurahkan dan mengekspresikan dirinya ke dalam lingkungan sekitar. Eksternalisasi menunjukkan bahwa suatu realita sosial dapat terbentuk melalui tindakan individu yang diwujudkan melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam eksternalisasi terbentuk suatu ciri khusus dari interaksi sosial yaitu individu-individu tersebut.

Kelompok LGBTIQ rentan mendapatkan perlakuan buruk dalam kehidupan sosial seperti lingkungan keluarga yang tidak bisa menerima ketika anaknya diketahui sebagai gay, lesbian atau transpuan. Dampak terburuk dari terbukanya identitas kelompok LGBTIQ antara lain mendapatkan pengusiran dari rumah. Tidak diakui dalam keluarga, kehilangan tempat tinggal dan tidak mendapatkan

pengakuan dari negara pada saat pembuatan KTP. Lingkungan sekolah tidak menjadi ruang aman, ketika individu terbukti sebagai penyuka sesama jenis. Hal ini diperjelas oleh penyampaian GR melalui pengalamannya didunia pendidikan sebagai berikut:

“Sebelumnya teman-teman udah tau kalau aku gay, tetapi lama kelamaan respon mereka menjadikan keterbukaanku sebagai sebuah bahan pembicaraan ada yang ga terima juga. Yaudah, tanpa berfikir panjang aku bilang ke dekan bagian kemahasiswaan kalau aku gay dan sampai ke rektor juga permasalahannya akhirnya aku di skorsing. Jadi waktu itu aku tinggal skripsi aja sebetulnya gaboleh tapi aku gapeduli walaupun aku gabisa akses buku di kampus aku bisa cari ke tempat lain, sampai masa skors selesai aku selesai skripsi aku serahin dan diterima eh, malah lulus jadi wisudawan terbaik.”(GR, 14 Februari 2021)

Dalam wawancara penulis dengan informan ketika dirinya mendapatkan penolakan dari kampus beberapa minggu kemudian, dia mendapatkan kenalan komunitas LGBTIQ yakni Sobat Semarang kemudian diperkenalkan dengan anggota dari komunitas. Selain itu, individu tersebut juga mengikuti beberapa kegiatan dan mendapatkan saran dari komunitas untuk mengakses advokasi atas kasus yang diterima. Keberadaan komunitas LGBTIQ di Kota Semarang sebagai wadah bagi kelompok minoritas menjadi ruang aman karena menjadi sebuah tempat yang bisa menerima kondisinya. Tempat berlindung ketika mendapatkan penolakan dan mendapatkan bantuan dukungan secara psikis serta fisik dalam menuntut keadilan. Maka dari itu, alasan mengapa kelompok LGBTIQ membentuk komunitas adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika mendapatkan diskriminasi, tidak diterima dan mendapatkan kekerasan dari keluarga. Menurut beberapa informan dalam wawancara, komunitas dipandang sebagai ruang yang aman karena disana mereka bisa diterima dan didukung ketika mengalami keterpurukan. Hal ini diperjelas oleh pengalaman HJ seorang gay dalam wawancara sebagai berikut:

“Alasan mengapa kelompok LGBTIQ membentuk komunitas aku pahami ketika mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari keluarga. Jadi waktu itu aku diketahui sebagai gay oleh orang tua, mereka tidak bisa menerima aku tanpa membawa sehelai pakaian dari rumah aku diusir saat itu aku menghubungi temanku seorang lesbi dan aku ditampung di shelter RPI.”(HJ, 1 Maret 2021)

Keberadaan komunitas LGBTIQ dipandang baik dimata beberapa orang terutama anggotanya atas edukasi, pelayanan dan relasi sosialnya. Namun, tidak sedikit masyarakat yang memandang berdirinya wadah tersebut justru dianggap sebagai penyebar perilaku seks bebas di lingkungan sekitar. Membentuk komunitas LGBTIQ memerlukan kerjasama dan komitmen dengan individu lain, karena memperjuangkan isu minoritas seksual di Indonesia tidaklah mudah fenomena kekerasan dan diskriminasi mewarnai kinerja mereka. Pandangan komunitas dengan perilaku negatif melekat dalam pemberdayaan advokasi kelompok LGBTIQ. Tujuan dari sekelompok individu membentuk komunitas LGBTIQ tidak lain untuk menyatukan orang-orang dengan kondisi yang sama. Sehingga, mereka bisa saling mendukung dan membantu.

Beberapa individu LGBTIQ memandang kondisi perbedaan yang dialami tidak dirasakan oleh orang lain. Sehingga, sulit bagi mereka menjalin relasi dengan anggapan kondisinya tidak bisa diterima. Maka dari itu, dibentuknya komunitas LGBTIQ tidak lain untuk menjalin sillaturahmi dan untuk memahamkan individu bahwa kondisi yang dialaminya tidak lantas menjadikannya dirinya terpuruk dan semakin memaknai hidup dengan melakukan hal-hal positif bagi dirinya. Dalam komunitas diperlukan adanya komunikasi yang baik antar anggota sehingga banyak pihak mendukung satu sama lain. Menjaln relasi dengan anggota lain dalam komunitas penting untuk membangun hubungan baik ketika satu sama lain anggota dalam komunitas saling menjaga sillaturahmi akan terwujud kesolidan

didalamnya. Hubungan sillaturahmi baik menghasilkan seperti, hubungan bisnis, informasi pekerjaan dan kerjasama menguntungkan lainnya. Hal ini disampaikan oleh AG anggota dari Rumah Pelangi Indonesia sebagai berikut:

“Tujuan individu membentuk komunitas LGBTIQ tidak lain untuk menjalin sillaturahmi sehingga banyak pihak yang saling menguatkan. Banyak sih dari anggota awalnya mengira dirinya seorang LGBTIQ sendiri ketika tergabung oh ternyata banyak ya, mereka ketakutan kalau banyak orang yang tidak bisa menerima kondisinya.”(AG, 1 Maret 2021)

Hidup menjadi minoritas seksual tidaklah mudah, karena mereka tidak hanya mendapatkan penolakan dari keluarga tetapi juga masyarakat sekitar. Kehidupan kelompok LGBTIQ penuh pertanyaan apakah mereka akan bahagia dengan orientasi seksualnya yang rentan mendapatkan penolakan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh W seorang lesbian di Kota Semarang sekaligus anggota RPI:

“Kalau saya disuruh milih saya gamau menjadi lesbian saya inginnya menjadi orang normal tapi kembali lagi saya harus menerima diri saya karena semakin memberontak semakin terpuruk. Yang bisa menerima saya, ya diri saya sendiri saya harus bahagia kunci utamanya adalah *coming in* dengan orientasi seksual saya, nggak ada yang bisa menerima aku kecuali diriku dan mungkin komunitas karena banyak teman-teman saling menguatkan.”(W, 23 Februari 2021)

Seorang filsuf bernama Aristoteles mempunyai pandangan mengenai *eudaimonia* yang dalam bahasa Yunani berarti kebahagiaan (Arivia dan Gina, 2015). Menjadi *eudaimon* artinya hidup dengan baik dan daimon yakni hidup dengan jiwa yang damai. Kebahagiaan seseorang menjadi hal yang utama dibandingkan kepemilikannya atas materiil dan sebagainya. Atas penolakan dirinya oleh sebagian besar masyarakat lantas apakah menjadi minoritas seksual mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya. Hidup menjadi kelompok LGBTIQ tidak lepas dari kekhawatiran atas tindakannya, sehingga kurang

mendapatkan kenyamanan hidup dan tidak berhenti dari rasa takut dan bersalah.

Dengan seseorang membentuk komunitas LGBTIQ semakin banyak pihak memiliki kondisi yang sama untuk saling mendukung atas kejadian yang dialami. Kebanyakan orang menginginkan hidup sempurna dengan banyak pihak yang menerima, sehingga timbul rasa aman, berkeluarga dan eksistensinya diakui dalam negara serta dihormati sebagai manusia. Pandangan manusia secara umum tersebut rasanya sulit dimiliki kelompok minoritas seksual rasa aman yang bermula dari keluarga akan berubah seketika menyadari dirinya seorang LGBTIQ. Kekhawatiran disalahkan dan tidak bisa diterima menyebabkan dirinya tidak menceritakan pertama kali perbedaannya kepada keluarga, rasa aman dalam sebuah komunitas menyebabkan rasa bersalahnya sirna.

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia sebelumnya. Hasil itu berupa realitas objektif yang dijadikan sebagai suatu aktivitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata) dan menyebabkan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu dalam kelompok tersebut. Tindakan ini akan menjadi suatu kebiasaan bagian mereka dan menjadi bagian yang tetap dalam realitas mereka.

Faktor kelompok LGBTIQ membentuk komunitas salah satunya memudahkan mendapatkan pelayanan. Hal tersebut didapatkan ketika komunitas memiliki relasi sosial dengan beberapa pihak yang bisa membantu dalam mengakses pelayanan di masyarakat. Pertama, komunitas bisa membantu anggota untuk mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini dikarenakan, kerentanan kelompok LGBTIQ

terhadap penyakit HIV/AIDS sehingga membutuhkan jembatan dalam mengakses pelayanan konseling dan pengambilan obat di fasilitas kesehatan. Kelompok LGBTIQ yang tergabung di komunitas mendapatkan edukasi cara merawat organ reproduksi, melakukan hubungan seksual yang benar dan pemakaian alat pengaman. Kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan reproduksi menjadi faktor penting, banyak komunitas LGBTIQ terbentuk dan mendapatkan dukungan dari pemerintah apabila tujuannya untuk mengurangi peningkatan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS tersebut.

Kedua, komunitas yang membantu kelompok LGBTIQ dalam mengakses pelayanan hukum. Kelompok rentan minoritas seksual merasa terbantu ketika mendapatkan permasalahan dengan keluarga, seperti jika mendapatkan kekerasan secara fisik. Ketika kelompok LGBTIQ sebagai korban membutuhkan konseling psikolog komunitas akan menyediakan dengan tujuan memudahkan mereka dalam menghadapi kondisi dialami apa yang sebaiknya dilakukan setelah mengalami kejadian tersebut. Permasalahan diskriminasi pekerjaan yang dialami kelompok LGBTIQ komunitas akan memberikan pertimbangan kepada anggotanya apakah individu tersebut akan mengakses pelayanan hukum atau tidak. Adanya komunitas secara tidak langsung membantu kelompok LGBTIQ dalam mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, mereka akan mendapatkan saran mengenai jalan apa saja yang bisa ditempuh ketika menginginkan jalur hukum. Hal ini diperjelas oleh AA yang pernah mengakses pelayanan advokasi di komunitas LGBTIQ Semarang sebagai berikut:

“Waktu itu aku pernah mendapatkan diskriminasi di kelurahan tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) disitu waktu kami sekelompok mengadakan kegiatan bakti sosial aku dipermalukan di depan umum begini kata pak lurahnya, coba

lihat dia itu cewe apa cowo dari depan cowo tapi kalau dari belakang cewe jalanya juga melenggak lengkok seperti cewe. Aku saat itu malu sekali ya, soalnya dihadapan banyak orang tepatnya di atas panggung saat itu. Setelah kejadian itu, aku cerita ke temen-temen RPI yaudah coba kamu advokasi ke Pemerintah Kota Semarang nanti kami kasih rujukan lewat LBH Semarang dan LRC KJHAM. Tapi kejadian itu sama pihak kampus suruh menutup aja gausah di besar-besarin, menurut aku sama aja aku diakhir dapat diskriminasi gabisa akses dalam menuntut keadilan.”(AA, 14 Februari 2021)

Akses pelayanan penting bagi kelompok LGBTIQ yang mendapatkan perlakuan buruk, seperti mendapatkan masalah kekerasan ingin melaporkan ke jalur hukum komunitas bisa membantu. Namun, tak sedikit kelompok LGBTIQ enggan melaporkan kejadian buruknya kepada aparat dengan alasan mendapatkan diskriminasi terdapat hambatan ketika melaporkan kasus dialami tidak ada respon baik dari kepolisian. Aparat hukum cenderung menyalahkan penyimpangan orientasi seksual seseorang dan alasan kelompok LGBTIQ tidak berani melapor adanya ketakutan terbuka identitas gendernya oleh orang tua. Tujuan dari terbentuknya komunitas LGBTIQ, menjadi ruang berbagi pengalaman baik maupun buruk memberikan pertimbangan kepada anggota dengan bekerja sama lembaga hukum dan jaringan sosialnya ketika anggota menginginkan penyelesaian kasus langkah apa yang sebaiknya ditempuh. Ketika individu tergabung dalam komunitas mendapatkan perlakuan buruk, seperti saat mengakses pelayanan kesehatan tim pengadvokasian komunitas akan bertindak. Hal ini diperjelas oleh YI dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:

“Waktu itu saya akses di layanan kesehatan tepatnya puskesmas ingin VCT tes apakah positif HIV/AIDS atau tidak. Disitu saya mendapatkan perlakuan buruk si konselor malah memaki-maki saya kata-katanya makanya mas kamu tu tobat jangan hubungan sama laki-laki. Setelah kejadian itu saya cerita sama teman-teman di komunitas dan langsung diadvokasi layanannya dan dokternya alhasil bulan kedepan saya konseling petugas itu ga diikutin lagi.”(YI, 23 Februari 2021)

Dari hasil wawancara diatas keberadaan komunitas memang penting bagi kelompok LGBTIQ karena mereka mendapatkan ruang aman dalam mengekspresikan kondisinya, mendapatkan dukungan karena memiliki nasib yang sama, mampu menghasilkan silaturahmi bermanfaat seperti hubungan kerja dan bisnis serta kemudahan bagi individu dalam mengakses pelayanan. Dengan membentuk komunitas akan melatih seseorang dalam kemampuannya mengorganisasi bagaimana cara membina hubungan kerja, kesesuaian pembagian kerja dan kemampuan dalam mewujudkan visi misi yang sesuai dengan terbentuknya komunitas. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat menolak keberadaan komunitas LGBTIQ atas dasar kekhawatiran tujuan dari komunitas tersebut sebagai sarana perilaku seksual yang tidak bisa diterima di masyarakat.

Berjalannya sebuah komunitas tentu didukung oleh keberadaan dan kerjasama anggota. Rumah Pelangi Indonesia melingkupi kelompok LGBTIQ di Provinsi Jawa Tengah, namun seluruh kinerja, basis perkumpulan dan jaringan sosialnya berada di Kota Semarang. Dalam proses perekrutan anggota baru, komunitas ini mengadakan kegiatan yang bersifat umum, seperti gathering, paralegal dan kesehatan reproduksi HIV/AIDS. Perekrutan dalam komunitas ini mudah dengan syaratnya yakni individu LGBTIQ dan rutin mengikuti kegiatan komunitas tiga kali seseorang sudah dianggap tergabung dengan Rumah Pelangi Indonesia. Penentuan mengikuti pertemuan selama tiga kali sebagai wujud keseriusan seseorang tergabung dalam komunitas kemudian, akan masuk dalam grup media sosial Rumah Pelangi Indonesia. W selaku anggota Rumah Pelangi Indonesia mengatakan, saat awal tergabung komunitas melalui tahapan tersebut yakni seorang LGBTIQ dan aktif mengikuti tiga kali kegiatan komunitas. Pertama kali W bergabung dengan RPI pada tahun 2017 melalui media sosial Facebook mendapatkan informasi *gathering* di

kota lama adanya ketertarikan bagaimana komunitas mewadahi LGBTIQ pertama kali mengikuti *gathering* mengenai SOGIE-SC (Wawancara dengan W, 27 Februari 2021).

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan proses pemahaman untuk memahami proses subjektif orang lain agar memiliki makna bagi kita. Dalam proses internalisasi terdapat dua macam yang dilakukan untuk menemukan pemahaman yaitu dengan cara sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer ini terjadi dalam lingkup keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder diperankan oleh sebuah organisasi sosial atau komunitas yang sengaja dibentuk untuk menyebarkan pemahaman yakni tergabungnya individu dalam komunitas sebagai wadah aspirasi dan ruang aman bagi kelompok LGBTIQ. Manusia makhluk sosial membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam kelompok maupun di luar kelompok. Komunitas menjadi salah satu kelompok non formal digunakan seseorang untuk menyalurkan aspirasi dan berinteraksi baik dengan individu lainnya. Ada beberapa alasan anggota Rumah Pelangi Indonesia tergabung dalam sebuah komunitas yakni :

- a. Rasa aman, merupakan salah satu alasan seseorang tergabung dalam komunitas, seseorang akan merasa dirinya mendapatkan perlindungan lebih ketika bersama dengan orang yang memiliki nasib sebagai minoritas seksual sehingga timbul rasa aman. Kita ketahui kelompok LGBTIQ dalam kehidupan sosial rentan mendapatkan diskriminasi, stigma dan kekerasan atas keberadaannya tidak bisa diterima masyarakat ketika dia berada dalam komunitas banyak pihak yang mendukung seseorang ketika mendapatkan perlakuan buruk tersebut. Hal

ini disampaikan oleh R seorang transpuan anggota RPI dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Rumah Pelangi Indonesia bagi anggota komunitas menjadi ruang aman bagi kita semua. Karena banyak dari teman-teman di luar komunitas juga dibantu RPI seperti pekerja seks yang diperas oleh polisi komunitas membantu untuk advokasi. Maka dari itu, aku berupaya gabung ke komunitas menurutku menjadi LGBTIQ harus bergabung dengan komunitas selain mendapatkan ruang aman dia inginkan juga mendapatkan edukasi lebih yang tidak didapatkan ketika kita individualis.”(R, 23 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, anggota merasa terbantu dengan adanya Rumah Pelangi Indonesia. Sesuai visi dan misinya Rumah Pelangi Indonesia ingin menjadi ruang aman bagi minoritas gender dan seksual Kota Semarang yang mendapatkan diskriminasi dan kekerasan untuk bangkit, berdaya dan memaknai hidupnya.

- b. Interaksi dan afiliasi, bergabung pada kelompok akan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi kepada orang lain. Sebagian besar individu LGBTIQ berpandangan kondisinya hanya dialami dirinya sendiri namun, ketika tergabung dengan Rumah Pelangi Indonesia dia baru menyadari banyak sekali individu minoritas seksual yang semua memiliki latar belakang beragam sehingga memungkinkan adanya komunikasi terjalin dengan baik hubungan persahabatan dan tali silaturahmi dalam satu kelompok. Selain sebagai lingkungan untuk menambah pertemanan, dengan mengikuti komunitas individu mendapatkan jalan mencapai tujuannya, yakni mendapatkan edukasi yang belum dia dapatkan di luar keterlibatannya di komunitas.
- c. Menguatkan, orang yang tergabung dalam sebuah komunitas menjadi lebih kuat dibandingkan ketika dia sendirian karena

bergabung dengan kelompok ketika mengalami permasalahan satu sama lain akan saling menguatkan, ketika orang lain mendapatkan masalah banyak individu lain dengan jumlah besar mendorongnya dan menguatkan dari belakang.

- d. Mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan individu dan komunitas seseorang harus bersatu bersama dalam sebuah kelompok, karena tujuan individu akan lebih mudah tercapai apabila disertai kesepakatan dan usaha bersama termasuk mencapai perjuangan hak-hak LGBTIQ yang selama ini kerap terlanggar akibat stigma negatif sehingga timbul perlakuan buruk masyarakat berwujud spontanitas merugikan minoritas seksual di Kota Semarang.

Komunitas pada dasarnya sebagai salah satu lingkungan dimana seseorang dapat melakukan interaksi, berkumpul dan menambah wawasan dengan orang baru. Berdirinya Rumah Pelangi Indonesia menjadi daya tarik kelompok LGBTIQ dimana mereka mendapatkan ruang aman dengan berkumpul, berinteraksi, mengembangkan kapasitas dan komunitas memperjuangkan hak-hak mereka sebagai LGBTIQ yang kerap terlanggar sehingga membatasi dirinya dalam dunia sosial. Hal ini disampaikan oleh YI mengenai kontribusinya dalam komunitas sebagai berikut:

“Keterlibatan saya dalam komunitas berbagi ilmu mengenai kesehatan HIV/AIDS karena saya kebetulan relawan dalam menanggulangi penyakit tersebut. Menyumbangkan ilmu HIV/AIDS kepada teman-teman komunitas karena mereka dianggap rentan dan apabila mereka melakukan kegiatan beresiko pasti dampaknya mudah terkena IMS. Selain itu, saya ikut bantu-bantu kalau ada mau ada kegiatan berupa pemesanan tempat, pembuatan pamflet dan ikut menyebar undangan serta membantu menjadi pemateri kalau ilmu saya ada cukup saya bagikan.”(YI, 23 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara penelitian dengan informan anggota komunitas bahwasanya Rumah Pelangi Indonesia telah menjadi ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang selain individu

mendapatkan jalinan pertemanan yang luas, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan baru tidak didapatkan apabila tidak kelompok LGBTIQ tidak bergabung komunitas, mendapatkan dukungan dari banyak pihak ketika mendapatkan permasalahan menguatkan satu sama lain serta dukungan dari komunitas terbuka membantu apabila individu ingin mengakses beberapa pelayanan yang dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan. Rumah Pelangi Indonesia merupakan salah satu komunitas yang ada di Kota Semarang mewadahi kelompok LGBTIQ. Di dalam komunitas tergabung dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan yang terkait pengembangan kapasitas maupun permasalahan penting yang layak untuk dicari jalan tengah dialami minoritas seksual di Indonesia. Dengan adanya komunitas LGBTIQ, anggota merasa terbantu atas pelayanan yang diberikan ketika tidak bisa diterima dalam lingkungan sosial.

Rumah Pelangi Indonesia terbentuk atas kesadaran individu sebagai minoritas kerap kali mendapatkan perlakuan buruk yang tidak semua kelompok LGBTIQ memahami bahwa itu sebuah kekerasan sehingga, terbentuklah ruang aman bagi kelompok LGBTIQ. Ruang aman tercipta bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang mengekspresikan diri dalam sebuah komunitas, menjalin pertemanan dan bertukar pikiran dengan difasilitasi oleh pengurus melalui beberapa pelayanan advokasi, edukasi, hukum dan kesehatan yang pencapaian tujuan komunitas mengembangkan kapasitas LGBTIQ dan menciptakan ruang inklusif bagi sehingga menjadi LGBTIQ dalam masyarakat bukan lagi sebagai pribadi yang eksklusif dan termarginalkan.

C. Identitas Rumah Pelangi Indonesia

Identitas digunakan untuk menyatakan siapakah dirinya dalam kehidupan sosial. Identitas dapat berupa atribut fisik, keyakinan, tujuan,

harapan, prinsip moral atau gaya sosial (Kartikaningdryani, 2016). Dalam melihat strategi politik identitas komunitas LGBTIQ, menurut Jamson (2016) berpendapat :

“Strategi politik identitas berkaitan dengan mekanisme pengorganisasian (politik maupun sosial) sebagai sumber daya dan sarana mengklaim rekognisi. Strategi tersebut berupa klaim politik bentuk rekognisi dengan cara pengalihan perhatian publik, ataupun upaya-upaya kekuatan atas identitas mereka, menegaskan spesifikasi dari kelompok mereka dan menegaskan nilai dari spesifikasi tersebut. Sebagai cara komunitas dalam mempromosikan deferensiasi kelompok” (Jamson dan Ulya, 2016).

Identitas dalam komunitas LGBTIQ digunakan untuk merekonstruksi cara pandang masyarakat mengenai citra mereka yang dianggap menjadi akar penindasan dan perampasan hak-hak mereka. Tindakan positif dalam komunitas sebagai simbol sebuah modal untuk mempertegas identitasnya. Tindakan simbolis dalam komunitas untuk mempertegas identitas dalam rangka mempertahankan individu atau kelompok di kehidupan masyarakat. Melalui tindakan-tindakan tersebut baik LGBTIQ dalam komunitas maupun individual dalam rangka menegaskan identitas mereka. Komunitas LGBTIQ dalam membentuk identitasnya tidak semudah yang dibayangkan, karena pandangan negatif yang melekat mengenai penyimpangan dan melanggar norma terus melingkupi pergerakan kinerja komunitas. Sama halnya dengan sebuah identitas sebagai pengetahuan yang dibentuk Rumah Pelangi Indonesia tentang ruang aman bagi kelompok LGBTIQ melalui tahap kesepakatan bersama untuk dijadikan ideologi. Melalui proses konstruksi sosial dalam berdialektika dengan diri (*self*) dan dunia sosiokultural ini berlangsung dalam proses tiga momen simultan. Adapun proses pembentukan identitas dalam Rumah Pelangi Indonesia sebagai berikut:

a) Eksternalisasi

Merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia sosialnya, baik dalam kegiatan mental maupun fisik sebagai wujud dirinya mengekspresikan dan menguatkan eksistensinya dalam masyarakat. Tahapan ini sebagai wujud masyarakat dilihat sebagai bentuk produk manusia. Manusia mengungkapkan dirinya melalui proses yang dihasilkan pada suatu keadaan dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam keadaan tertentu. Eksternalisasi ini menunjukkan bahwa suatu realita sosial dapat terbentuk melalui tindakan individu yang diwujudkan melalui suatu interaksi sosial (Bungin, 2008). Oleh karena itu anggota Rumah Pelangi Indonesia menunjukkan identitas dalam bentuk interaksi sosial, seperti kepekaan untuk mendukung kelompok LGBTIQ yang memiliki nasib sama dengannya.

Realisasinya dalam interaksi sosial, individu-individu membuat suatu simbol dan benda-benda hasil buatanya. Komunitas salah satu bentuk lingkungan dibedakan berdasarkan kesamaan hobi atau habita tertentu. Dimana komunitas menjadi salah satu lingkungan pertemanan berperan membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Pada proses eksternalisasi, dimana terjadi proses usaha kelompok LGBTIQ tergabung dalam komunitas untuk memiliki peran sosial positif di masyarakat dan mendukung minoritas seksual lain di Kota Semarang. Selama ini masyarakat menempatkan LGBTIQ pada posisi yang minor karena dipandang sebagai individu berbeda dan harus dihindari dalam seluruh kegiatan masyarakat.

Pandangan tersebut menyebabkan pengembangan kapasitas anggota LGBTIQ sulit didapatkan karena kurangnya

masyarakat yang memahami kondisi mereka. Eksklusifitas menyebabkan kelompok LGBTIQ semakin terpuruk, bukan hanya tidak bisa menerima kondisinya, tetapi juga kesulitan untuk dapat melakukan hal-hal positif yang terpendam dalam dirinya. Komunitas LGBTIQ menginginkan adanya inklusifitas karena akan menambah kesempatan bagi mereka untuk *show up* kepada masyarakat sekitar. Tempat ramah dan aman bagi seseorang untuk melindungi dirinya (rumah dan sekolah) kenyataannya menjadi lembaga yang sistematis melakukan kekerasan bagi LGBTIQ. Itulah mengapa individu dengan identitas seksual diluar heteroseksual melawan dengan keluar dari rumah dan mencari penghidupan lainnya untuk mewujudkan eksistensinya sebagai homoseksual. Masyarakat seringkali keliru atas perilaku transgender dengan ekspresi gendernya merasa jijik dan tidak mau bergaul karena takut tertular penyakit kejiwaan. Bahkan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia beberapa menerapkan perda-perda diskriminatif membuat eksistensi LGBTIQ di Indonesia terancam.

Kondisi tersebut melatarbelakangi Rumah Pelangi Indonesia mewujudkan ruang aman bagi kelompok LGBTIQ, karena adanya keinginan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendiskriminasi hak-hak dari minoritas seksual tersebut. Identitas tersebut dapat diwujudkan melalui konsolidasi jaringan sosial, memobilisasi masa dan aksi untuk berhadapan langsung dengan permasalahan atau kelompok tandingan. Ketika keberadaan mereka diterima upaya yang lebih besar dan positif dapat dilakukan bersama dengan komunitas. Strategi yang digunakan komunitas LGBTIQ dengan melakukan kegiatan bersama melibatkan individu dengan jumlah banyak, mengambil lokasi perkumpulan berpindah serta menjalankan

kegiatan bersama kelompok hetero tidak lain bertujuan mengurangi eksklusifitas dalam komunitas. Rumah Pelangi Indonesia memiliki visi dan misi menciptakan inklusifitas dalam komunitasnya. Komunitas LGBTIQ yang mewujudkannya anggota akan mendapatkan pengembangan kapasitas yang berguna menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan dapat diwujudkan melalui kerjasama jaringan sosial.

b) Objektivasi

Objektivasi adalah proses manifestasi diri atau bentuk pengungkapan kenyataan subjektif ke dalam bentuk-bentuk kegiatan yang bisa diketahui oleh orang lain dengan unsur-unsur dari dunia bersama. Proses awal terbentuknya identitas Rumah Pelangi Indonesia dalam eksternalisasi diri oleh tiap anggota RPI bentuk penerimaan diri mengenai identitas gendernya. Ketika seseorang telah mampu menerima kondisinya akan terasa mudah untuk melakukan aktivitas dan berinteraksi sosial dengan khalayak.

Strategi yang digunakan komunitas LGBTIQ yakni dengan menggunakan *counterframing* dimana mereka mengubah pandangan buruk masyarakat yang dilekatkan pada LGBTIQ (Kartikaningdryani, 2016). Misalnya, ketika masyarakat memandang kelompok LGBTIQ sebagai penyimpangan seksual, kelainan jiwa dan merusak moral namun, pada kenyataannya dibalik pandangan buruk tersebut banyak hal positif yang mereka miliki baik secara individual maupun ketika membentuk komunitas seperti kegiatan Rumah Pelangi Indonesia dilakukan secara mingguan edukasi, adanya layanan kesehatan bagi untuk mengurangi penularan

HIV/AIDS menekan angka ODHA dan memberikan pelayanan hukum serta advokasi yang dibutuhkan anggota komunitas. Upaya Rumah Pelangi Indonesia untuk mewujudkan inklusifitas yaitu bekerjasama dengan jaringan sosial lainnya, seperti LBH Semarang, PKBI Kota Semarang, LRC KJHAM, Layanan Kesehatan dan Komunitas Keagamaan di Kota Semarang. Identitas dalam sebuah komunitas penting, karena menyangkut bagaimana mereka akan membentuk pergerakan kinerjanya melalui tindakan fisik, pandangan dan tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama dengan dukungan dan dorongan anggota. Hal ini diperjelas oleh AH selaku divisi pengorganisasian GBQ dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Identitas yang ingin diwujudkan oleh Rumah Pelangi Indonesia lebih pada tempat ruang aman bagi kelompok LGBTIQ dan memperjuangkan hak-hak setiap anggota. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari anggota komunitas Rumah Pelangi Indonesia untuk terlibat secara aktif baik dalam kegiatan edukasi, pelayanan dan advokasi. Perjuangan hak-hak kelompok LGBTIQ melalui advokasi dalam aksi sosial kampanye harus ada komitmen seperti teman-teman komunitas yang bekerja formal mengkampanyekan hak-hak mereka secara online share pamflet melalui facebook, instagram dan twitter hal ini dilakukan mengurangi pandangan negatif mengenai teman-teman trans dianggap sampah masyarakat.”(AH, 20 Februari 2021)

Dalam wawancara penulis dengan informan di atas dapat diketahui bahwa keinginan Rumah Pelangi Indonesia untuk mewujudkan identitas mereka sebagai ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Ruang aman menjadi tempat bagi kelompok LGBTIQ merasakan dukungan penuh dari berbagai pihak yang memiliki kesamaan nasib dengan dirinya sehingga saling menguatkan satu sama lain. Terwujudnya ruang aman bukan hanya tempat berlindung bagi

LGBTIQ yang mendapatkan perlakuan buruk atau tidak menguntungkan saja, tetapi ketika mereka terlibat dalam komunitas mendapatkan beberapa hal positif seperti edukasi HIV/AIDS, edukasi SOGIE-SC, edukasi paralegal, edukasi leadership, edukasi media dan akses pelayanan lain berguna mengembangkan kapasitas dirinya di masyarakat.

Fenomena di masyarakat menganggap LGBTIQ sebagai sampah yang harus basmi, penyakit kejiwaan menular dan penyimpangan seksual. Dalam memperoleh akses publik mereka mendapatkan diskriminasi bahkan institusi pendidikan tidak memiliki toleransi kepada keberadaan mereka. Masalah dalam mendapatkan pekerjaan bagi LGBTIQ untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ketika menyatakan identitas gender dan ekspresi gendernya mendapatkan penolakan keras dengan alasan gendernya tidak diakui di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh AG dalam pengalaman pribadi pada wawancara penelitian sebagai berikut:

“Dengan adanya Rumah Pelangi Indonesia cukup membantu aku ketika aku mengalami masalah dengan keluarga. Waktu itu aku ketahuan identitasku sebagai transpuan ada beberapa tetangga yang mencurigai aku dari cara berjalan dan berpakaian seperti perempuan, lalu aku disidang aku jujur saja dan waktu itu aku melarikan diri bertemulah dengan anggota komunitas aku menenangkan diri di shelter Rumah Pelangi Indonesia untuk sementara waktu.”(AG, 1 Maret 2021)

Kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan dan pelayanan umum menjadi kenyataan pahit bagi individu yang belum diakui orientasi seksual, seperti individu interseks di Indonesia pada pencatatan sipil menyebabkan aksesnya diberbagai bidang terhambat. Dengan terwujudnya ruang aman dalam komunitas kelompok LGBTIQ diberikan kemudahan

dalam mengakses pelayanan kesehatan. Perlu diakui terkadang beberapa instansi kesehatan mendiskriminasi kondisi LGBTIQ dengan menguatkan stigma buruk kepada mereka tugas daripada komunitas melakukan advokasi pada pelayanan kesehatan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai kebutuhan dan lebih terbuka mengenai keberagaman gender. Beberapa individu dengan kondisi interseks terpaksa tetap menikah dengan lawan jenis untuk mendapatkan pengakuan dalam masyarakat. Dalam konteks gerakan, menurut Jamson (2016) pola gerakan digunakan dalam klaim identitas oleh komunitas mengalami transformasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya konsolidasi berbasis kelas ekonomi, kesehatan dan gerakan masyarakat lainnya.

Terlihat dari jaringan yang dibentuk Rumah Pelangi Indonesia melakukan advokasi bersama LBH Semarang atas diskriminasi terjadi pada pelayanan publik, jaringan berfungsi sebagai *back up* dari komunitas. Dalam mewujudkan inklusivitas bagi kelompok LGBTIQ, Rumah Pelangi Indonesia tergabung dalam perencanaan kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional bersama jaringan sosial di seluruh Kota Semarang. Tergabungnya komunitas LGBTIQ dalam kegiatan tersebut secara tidak langsung turut mengakomodir terhadap isu sosial lainnya seperti, isu buruh perempuan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, menolak omnibus law, mendukung kelompok minoritas Papua di Semarang dan permasalahan lingkungan hidup secara tidak langsung dalam rangka menuntut keadilan menciptakan ruang aman tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa, strategi yang dibangun komunitas bukan semata-mata berdiri atas permasalahan kolektivitas kelompok yang mengandung

ketidakadilan sehingga membutuhkan pengakuan identitas. Dengan kolektivitas berbasis kelas ekonomi dan sosial bersama kelas tertindas lainnya yang memiliki visi misi mengakhiri ketidakadilan kelas senada dengan nilai terkandung pada Rumah Pelangi Indonesia yakni ruang aman bagi semua kelompok. Disampaikan oleh YI selaku relawan aktif Rumah Pelangi Indonesia sebagai berikut:

“Kenapa kita membentuk jaringan karena keinginan hubungan kerja yang baik adanya konsolidasi saling menguntungkan satu sama lain. Utamanya untuk membentuk ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang seperti, kalau kami membutuhkan advokat hukum dari LBH Semarang bisa menyediakan dan apabila pihak sana membutuhkan kami sebagai informan kami bisa menyediakan. Kami dari Rumah Pelangi Indonesia tidak mengakomodir satu isu saja tetapi juga isu buruh perempuan, kekerasan seksual, pendidikan dan lingkungan kami juga kerja sama dengan WALHI terkait permasalahan lingkungan.”(YI, 23 Februari 2021)

Pembahasan mengenai identitas bagi komunitas merupakan pergulatan memperebutkan kekuasaan dalam sebuah identitas demi mengubah cara pandang masyarakat mengenai anggotanya. Klaim identitas semakin jelas bila dikaitkan dengan kemampuan individu untuk menempatkan identitasnya pada posisi strategis.

c) Internalisasi

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dunia nyata yang terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Dengan internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat, proses tersebut juga terjadi pada suatu

lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Terjadi proses pemahaman secara obyektif bagi individu sehingga menciptakan pemahaman yang timbal-balik dan menciptakan pengertian bersama. Dalam proses internalisasi terdapat dua macam yang dapat dilakukan untuk menemukan pemahaman, yaitu dengan cara sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer terjadi di lingkup keluarga. Tidak mudah bagi seseorang mengungkapkan identitas seksualnya terutama kepada orang tua karena akan timbul perasaan bersalah dalam mendidik anak dan kurang menanamkan ajaran agama sehingga tak jarang dalam menyikapinya orang tua mengambil jalan ruqiyah dan memasukkan ke lembaga pendidikan keagamaan (seperti pesantren). Keluarga merasa malu dengan kondisi anak terutama dalam menghadapi tekanan sosial dari tetangga. Beberapa kelompok LGBTIQ mendapatkan penolakan dari keluarga mengenai identitasnya, namun ada pula orang tua yang perlahan menerima kondisi anaknya dengan alasan bagaimanapun anak tersebut adalah anak yang telah dia rawat sejak lahir dan dibesarkan oleh kasih sayang. Pengalaman AA tentang respon orang tuanya kalau dirinya seorang transgender mungkin awalnya menolak, tetapi seiring berjalannya waktu orang tua bisa menerima dengan peringatan harus menjadi pribadi berperan positif dan terus membantu masyarakat yang kesulitan (Wawancara dengan AA, 14 Februari 2021). Berdasarkan tanggapan orang tua AA yang disampaikan dalam wawancara, semakin meyakinkan AA untuk bergabung dan mengambil peran positif di komunitas. Diperjelas oleh GR selaku program manager Rumah Pelangi Indonesia sebagai berikut:

“Tujuan dari berdirinya Rumah Pelangi Indonesia sebagai wadah menampung aspirasi anggota dan saling mendukung kelompok minoritas seksual di Kota Semarang. Maka dari itu, diwujudkan ruang aman agar kelompok LGBTIQ lebih percaya diri mengenai identitas gendernya sehingga tidak merasa tereksklusifkan di masyarakat.”(GR, 14 Februari 2021)

Tidak semua komunitas LGBTIQ dapat mewujudkan posisi sesuai identitas mereka, karena tidak keseluruhan dari pemimpin komunitas memiliki strategi dan modal untuk menjalin relasi dengan stakeholder lain. Keberadaan program manager sangat menentukan akan dibawa kemana fungsi dan visi misi komunitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun apakah mereka bisa mempertahankan keterlibatan anggota untuk mewujudkan ruang aman yang dicita-citakan komunitas. Identitas memainkan peran penting dalam mempertahankan solidaritas dan komitmen anggota. Hal ini disampaikan GR selaku Program Manager Rumah Pelangi Indonesia dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Identitas penting sama seperti tujuan dari berdirinya Rumah Pelangi Indonesia yakni ruang aman. Kami tahu kelompok LGBTIQ membutuhkan ruang aman tempat mereka berbagi tidak hanya pengalaman suka cita tetapi pengalaman buruk kami terima karena kami tahu menjadi minoritas tidak mudah keinginan kami satu mereka bisa nyaman dan menjadikan komunitas tempat berlindung memecahkan segala permasalahan dan saling mendukung satu sama lain terpenting.”(GR, 14 Februari 2021)

Banyak kelompok yang terbelah hanya karena mempermasalahakan identitas dan mendekonstruksi mengungkapkan menjadi hal yang tidak stabil, cair dan terekonstruksi (Kartikaningdryani, 2016). Sementara itu, ketika identitas komunitas menjadi permasalahan internal dalam pengorganisasian jejaring dari luar memahaminya sebagai sebuah ancaman yang membingungkan publik. Ketidakcocokan

dan kurangnya dukungan dari anggota komunitas dalam menjalankan identitas dan kinerjanya lambat laun akan membuat komunitas yang dibangun vakum. Hal tersebut akan menyia-nyiakan apa yang telah dibangun dari bawah untuk membentuk sebuah komunitas identik dengan perjuangan panjang individu-individu didalamnya sangat disayangkan apabila komunitas berhenti karena tidak adanya dukungan. Perjuangan Rumah Pelangi Indonesia dalam mewadahi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang memang bukan perjuangan mudah membutuhkan kesolidan dan komitmen membangun bersama ruang aman mereka untuk melawan ketidakadilan yang bukan perjuangan instan, melainkan diperlukan basis kekuatan bersama seluruh elemen komunitas.

Dengan adanya proses tersebut menciptakan realitas sosial bahwa kenyataan mengenai kelompok LGBTIQ tidak berdaya dan kelainan kejiwaan tidak benar mereka nyatanya mampu berperan positif dan beraspirasi dalam komunitasnya. Seperti pada kolaborasi kegiatan antar komunitas, jaringan sosial untuk mewujudkan ruang aman, pengembangan kapasitas dan pelayanan yang membuat kelompok LGBTIQ mendapatkan ruang yang melindungi keberagaman gender dan seksualitas. Oleh karena itu, setiap anggota memiliki kesan empati dan simpati terhadap minoritas seksual di Kota Semarang karena menjadi individu dengan identitas gender berbeda kerap termarginalkan di masyarakat.

BAB V

PERAN RUMAH PELANGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DASAR BAGI KELOMPOK LGBTIQ

A. Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi Kelompok LGBTIQ di Kota

Semarang

Homoseksualitas di Indonesia mulai terasa keberadaannya sekitar empat puluh tahun lalu tepatnya sejak kasus pernikahan kedua perempuan Jossie dan Bonnie, kasus keduanya menjadi bahan perbincangan sebagai lesbian pertama mengakui hubungan kisah cinta mereka dan mengikatkan dalam tali pernikahan Mei 1981 dengan melangsungkan pesta pada sebuah bar, di Jakarta Selatan (Yulius, 2016). Namun, perilaku homoseksualitas ini sebetulnya telah ada sejak lama tanpa memberikan label yang jelas dalam menyatakan identitas seksualnya. Kelompok LGBTIQ dalam lingkungan keluarga dan masyarakat masih cenderung menutup diri, hal ini dikarenakan orientasi seksual yang diungkapkan kepada keluarga belum bisa diterima begitupula masyarakat menolak keras keberadaan penyuka sesama jenis tersebut.

Adanya ketakutan kelompok LGBTIQ ketika menyatakan orientasi seksualnya kepada keluarga, masyarakat maupun orang terdekatnya karena LGBTIQ tidak diakui di Indonesia dan stigma yang melekat dalam dirinya membuatnya para LGBTIQ mengurungkan niat. Dalam lingkungan tempat tinggal, mereka cenderung menutup diri membatasi pergaulan sosial dengan berupaya bersikap layaknya laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya dihadapan masyarakat sekitar dan keluarga besar meskipun berdampak pada tekanan dalam psikisnya. Hal ini diungkap oleh AH seorang gay dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Aku belum terbuka sama keluargaku, takut aja mereka belum bisa menerima kondisiku ya walaupun aku sudah menjalin hubungan serius dengan seseorang tapi ada ketakutan tersendiri dalam diriku. Maka dari itu, waktu orang tua bertanya soal pernikahan aku sedikit takut kalau dipaksa jadinya sering mengalihkan pembicaraan kearah positif seperti masih pengen kerja dulu, mengejar cita-cita dan kuliah lagi kalau bisa.”(AH, 18 Februari 2021)

Kelompok LGBTIQ tidak bisa menyalahkan sepenuhnya penolakan terhadap kondisinya. Hal ini dikarenakan, masyarakat memiliki sistem nilai yang menjadi sebuah keharusan untuk dijalankan sesuai peran dan fungsi anggotanya. Masyarakat kita memiliki *sex role* atau peran jenis artinya individu harus berperan sesuai dengan jenis kelamin kaitannya dengan penampilan fisik dan perlakuan sosial terhadap tampilan keadaan fisiknya serta peran lain yang dimiliki masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat Indonesia secara tidak langsung mendukung dan mengakui keberadaan kelompok LGBTIQ tetapi masih banyak kalangan profesionalisme yang telah mempelajari gender, seksualitas dan kesehatan jiwa serta faktor lain dalam posisi penyuka sesama jenis tersebut masih saja sulit menerima keberadaan LGBTIQ dalam lingkungan sosial karena anggapan buruk mengenai dirinya ketika menyetujui keberadaan penyuka sesama jenis. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan keberadaan kelompok LGBTIQ di lingkungan masyarakat dan khususnya keluarga belum seutuhnya menerima dengan baik. Manusia dalam kehidupannya menempatkan agama atau ketuhanan-Nya paling utama, ketika narasi keagamaan dan tokoh agama secara luas menolak keberadaan kelompok LGBTIQ anggapan itu diterima dan terimplementasikan ketika bertemu dengan individu penyuka sesama jenis itu. Hal ini diperjelas oleh YI dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Saya sering disadarkan lewat narasi agama cuma masih gakuat aja ketika masuk grup kok lebih Islami sedangkan, saya sendiri melakukan pelanggaran. Saya pastikan saya akan berubah tetapi jangan terus memojokan kondisi padahal kita sendiri gatau seperti apa Tuhan menilai kita, banyak kok orang jahat tapi tahajudnya kenceng baiknya memang baik semua.”(YI, 23 Februari 2021)

Menurut Kartono (dalam Wahyuni, 2012) masyarakat adalah hakim yang keras dan kejam terhadap tingkah laku kelompoknya dan cenderung

tidak memberikan toleransi mengenai penyimpangan terhadap norma-norma pada umumnya. Manusia diberikan kebebasan dalam bertindak di kehidupan sosialnya tanpa batas apapun bila apa yang dilakukan dinilai rasional dari kelompoknya, kemudian mereka akan menjadikan sebuah percontohan dan penghargaan dari ekspresi tersebut. Namun, individu yang melakukan perbuatan menyimpang dan radikal menyebabkan kekacauan pada individu lainnya di lingkungan mereka mendapatkan kecaman tidak hentinya.

Anggapan pribadi abnormal dan berkepribadian ganda melekat pada kelompok LGBTIQ, ketika kodratnya tidak dijalankan sesuai dengan ekspresi gender dan perilaku seksual seharusnya kita sebagai masyarakat yang baik turut mendorong mereka agar memberi dukungan untuk memaknai setiap perbuatan dan menjadi pribadi yang lebih baik apabila dimungkinkan adanya perubahan. Indonesia adalah negara dengan konsep heteronormatif mengenai seksualitas yang mana hakikat dari adanya pernikahan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan dianggap normal serta, konsep keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak menjadi hasil dari pernikahan mereka. Konsep ini mendukung kuat pandangan feminin dan maskulin di masyarakat. Pandangan menarik dari hasil konsep budaya patriarki yang ditolak kuat aktivis kesetaraan gender mengenai peran perempuan identik dengan ranah domestik merepresentasikan budaya heteronormatif di Indonesia. Apabila kelompok LGBTIQ diakui di Indonesia akan mengalami perubahan dalam seluruh tatanan, terutama mengenai aturan pernikahan sesama jenis kelamin yakni perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki yang sulit diterima oleh masyarakat karena dianggap abnormal. Kriminalisasi dan diskriminasi kelompok LGBTIQ menjadi bukti bahwa keberadaan mereka tidak disetujui masyarakat padahal ini berdampak serius pada permasalahan lain seperti, pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS.

Kelompok LGBTIQ dalam kehidupan sosial kerap mengalami kekerasan baik kekerasan fisik dan non fisik dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dalam hidup manusia meliputi,

keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan dan identitas bila tidak terpenuhi atau mengalami tekanan menyebabkan konflik kekerasan di permukaan sosial (Susan, 2009). Tidak bisa dipungkiri keberadaan kelompok LGBTIQ telah menguat sejak 1960 melalui perjuangan aktivis untuk diakui eksistensinya dan menuntut pelanggaran hak yang dialami minoritas seksual.

Kemunculan individu LGBTIQ yang melakukan *coming out* secara tidak langsung menjadi daya tarik kelompok lainnya melakukan pergerakan sama hingga kemunculan di tiap daerah di Indonesia termasuk Kota Semarang. Lalu apakah kelompok LGBTIQ berada di kota tersebut mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan sosial atau tidak karena yang kita pahami sendiri menjadi minoritas seksual dan gender di Indonesia tidak bisa diterima pemerintah maupun sebagian besar masyarakat. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5

Jumlah Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Kelompok LGBTIQ di Kota Semarang

No	Tahun Kasus Kekerasan	Jumlah
1.	2017	20 orang
2.	2018	40 orang
3.	2019	45 orang
Jumlah		105 orang

Sumber : Pendokumentasian Kasus di Kota Semarang Rumah Pelangi Indonesia Tahun 2017-2019

Dengan melihat tabel di atas jelas sekali bahwa kekerasan dialami kelompok LGBTIQ di Kota Semarang sangat tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Semarang memiliki mobilitas penduduk tinggi tetapi, sebagian besar dari mereka belum bisa menerima kelompok

LGBTIQ dengan alasan menyimpang agama, kelainan jiwa, salah pergaulan dan penyimpangan seksual pandangan tersebut melekat dalam kehidupan sosialnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bentuk kekerasan menurut Simon Fisher yang dialami kelompok LGBTIQ di Kota Semarang :

a. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang mampu melukai perasaan orang melalui perkataan dikeluarkan tanpa menyentuhnya secara langsung (fisik) (Fisher, 2001). Kekerasan verbal bukan hal normal karena mampu berdampak mematikan bagi orang tersebut perkataan kecil yang dilontarkan bagaikan pedang menusuk perasaan orang apabila terus dilakukan akan membunuh jiwa orang disudutkan. Bullying atas orientasi seksual yang berbeda biasanya dialami kelompok transpuan dalam kehidupan sosial mendapatkan pertentangan, ketika mereka berperilaku buruk maupun baik tanpa menyatakan identitas tetap saja secara penampilan fisik masyarakat tidak bisa menerima kondisi tersebut hingga menimbulkan pergunjungan spontan. Hal ini disampaikan oleh R dalam pengalaman menjadi transpuan sebagai berikut:

“Masyarakat itu memandang trans sosok negatif tidak hanya mengolok-olok secara personal tetapi juga menyasar ke orang tua. Makanya orang tua saya terutama bapak mewanti-wanti urusan pakaian ga boleh ketat, pakai celana panjang dan jangan lenggak lenggok kalau jalan. Pernah tetangga waktu saya SD sampai nyinyir begini ke orang tua anakmu kok balike bengi-bengi, ojo-ojo melu mangkal neng Kampung Kali. Ya walaupun, pada akhirnya saya juga jadi pekerja seks karena memenuhi kebutuhan keluarga sampai dipekerjaan pun saya juga kerap mengalami kekerasan biasanya pelanggan belum tau kalau aku trans. Ketika dia tau aku sampaikan kalau trans, langsung aku dijoroke namanya juga manusia punya rasa sakit hatilah.”(R, 23 Februari 2021)

Hal ini dapat dilihat kelompok LGBTIQ kerap mengalami kekerasan yakni, berupa kekerasan fisik, gunjingan, cemoohan dan kekerasan seksual. Kehidupan sosial kelompok LGBTIQ tidak lepas dari kekerasan fisik maupun non fisik walaupun demikian, manusia tidak seharusnya berbuat merugikan orang lain terlebih mengganggu

keberlangsungan seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang mengakibatkan seseorang tidak bisa mengembangkan jati diri dan kemampuan lain dimiliki masing-masing.

Stigma yang melekat pada kelompok LGBTIQ sebagai tanda aib seseorang memiliki perbedaan dari orang lain mengarahkan pada kekerasan. Stigma yang diberikan ketika seseorang dilabeli oleh perilaku, identitas maupun ciri lain tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Kelompok LGBTIQ di Kota Semarang dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun pekerjaan tidak hentinya mendapatkan perlakuan buruk dan tidak menguntungkan. Sikap dan keyakinan negatif mengenai kelompok ini menciptakan prasangka tindakan negatif dan diskriminasi. Stigma dari masyarakat menimbulkan pandangan bahwa permusuhan, diskriminasi dan kekerasan dibenarkan dalam rangka memerangi keberadaan kelompok LGBTIQ di lingkungannya, sebagaimana layak dan perlu untuk dilakukan. Kelompok LGBTIQ juga kerap mengalami diskriminasi ketika mengakses pelayanan kesehatan, tempat mereka untuk melakukan konseling bulanan menjadi tidak nyaman karena perlakuan buruk seperti, cemoohan dan gunjingan dimuka umum atas perilaku menyimpang seksualnya yang dilakukan.

b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat berupa kekerasan seksual maupun kekerasan non seksual. Kekerasan seksual adalah kekerasan terjadi mengandung unsur seksual dipaksakan dari pelaku dan mengakibatkan terjadinya kekerasan yang tidak diinginkan korban. Jenis kekerasan seksual yang dialami oleh para LGBTIQ meliputi perkosaan, pelecehan seksual, ancaman perkosaan, perkosaan disertai pembunuhan dan perkosaan disertai kekerasan. Individu yang mengalami kekerasan seksual mengalami penderitaan berupa trauma yang sulit dihilangkan. Kondisi tersebut kerap dialami seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai transpuan kekerasan seksual yang dialaminya dianggap sebagai aib. Hal

ini disampaikan oleh AH seorang gay yang mengalami kekerasan seksual sebagai berikut:

“Dulu saya pernah mengalami kekerasan seksual, maka dari itu ketika saya mengadvokasi anggota RPI korban kekerasan seksual masih terngiang-ngiang gimana kejadian yang dialami saya waktu itu.”(AH, 18 Februari 2021)

Seorang perempuan maupun laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan kerugian fisik dan trauma mental karena sulitnya melupakan kejadian tersebut. Pelecehan seksual pernah dialami AA seorang transpuan dalam dunia pendidikan hal ini disampaikan pada wawancara penelitian sebagai berikut:

“Kalau dulu waktu sekolah dari SD sampai SMA memang sering dapat pelecehan seksual berupa colekan gitu dipayudara sama pantatnya ditabokin. Gacuma itu aja sering dikatain banci, bencong sama laura udah biasa sih.”(AA, 14 Februari 2021)

Perilaku seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban dipandang sebagai perampasan tubuh. Sehingga timbul pemikiran korban tidak bisa menjaga tubuhnya dari pelaku kekerasan. Pengalaman ini dialami oleh R seorang transpuan saat berada di lingkungan sekolah dilakukan seorang temannya, sebagai berikut:

“Dulu saya pernah diajak hubungan seksual sama teman laki-laki. Kejadiannya setelah selesai olahraga saya biasanya ganti pakaian sendiri misah sama teman laki-laki ya ada rasa risih lah. Waktu itu datanglah salah seorang teman laki-laki ternyata udah membututi dari belakang kemudian memojokan di kamar mandi intinya ngajak ML, tapi saya gak maulah terus saya tendang aja dia sampe terpojok di kamar mandi saya lari aja.”(R, 24 Februari 2021)

Termasuk dalam kategori kekerasan fisik dan psikologis, pelecehan seksual dapat mengakibatkan trauma bagi diri korbanya akibat ucapan dan perbuatan berdampak pada hilangnya percaya diri serta kemampuan seseorang dalam bertindak sehingga cenderung tidak berdaya pada saat kejadian berlangsung. Hal ini disampaikan YI bahwasanya seseorang menjadi gay disertai beberapa faktor, yakni kekerasan seksual, faktor lingkungan membuat individu terbawa arus, disakiti dan ditinggalkan kekasihnya. Pengalaman seorang teman menjadi gay karena waktu tidur

digesekan kemaluannya sang kakak kandung ada juga teman memutuskan perilaku seksual lelaki seks lelaki karena ustadznya waktu kelas 2 SMA mengajak hubungan seks di dalam kamar (Wawancara dengan YI, 23 Februari 2021).

Dalam wawancara tersebut dapat diartikan keputusan seseorang menjadi gay salah satunya akibat kekerasan seksual dialami pada masa lalu. Maka tidak jarang, kehidupan mereka jauh dari orang tua dan lingkungan melarikan diri dari tempat tinggalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Hal ini disampaikan oleh O seorang gay dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Dulu saya pernah diperkosa sama orang tidak dikenal waktu SMP. Orang tua sampai saat ini belum tau kejadian tersebut, kalau untuk trauma pada waktu itu pastilah. Namun, saat itu saya belum paham ternyata ada orang yang suka sama laki-laki.”(O, 28 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, pengalaman kekerasan seksual yang dialami O saat remaja membuatnya trauma terdapat perasaan tidak bisa menjaga diri dari pelaku yang merenggut hak tubuhnya. Perlakuan buruk yang dialami narasumber sangat disayangkan dengan melihat umur O yang baru menginjak remaja belum memahami perihal seksualitas menyimpang. Kekerasan non seksual yang dialami kelompok LGBTIQ yakni pertama, kekerasan domestik dalam bentuk penganiayaan sering dialami transpuan yang tidak diterima keberadaannya dalam lingkungan keluarga. Adanya perasaan bersalah menjadi orang tua tidak bisa mendidik anaknya berakibat timbulnya kekerasan fisik merugikan sang anak. Kekerasan domestik pernah dialami oleh seorang transpuan berinisial AG mendapatkan kekerasan oleh kakaknya sendiri berupa tamparan ketika dirinya melakukan pengakuan tentang orientasi seksualnya (Wawancara dengan AG, 1 Maret 2021).

Berdasarkan pengalaman AG mengenai kekerasan domestik dialaminya di lingkungan keluarga berdampak pada penurunan psikis seperti, memburuknya mental seseorang atas tindakan dilakukan membuat

konflik dalam keluarganya dan kecenderungan untuk menutup diri dari pergaulan disekitar tempat tinggal. Kekerasan domestik yakni kekerasan yang dilakukan anggota keluarga baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini diperjelas oleh R seorang transpuan dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Dulu sebetulnya saya sering dipukulin sama bapak karena gak bisa terima kalau anaknya transpuan. Sampai suatu hari memuncak ketika saya SMK masih jamannya tawuran antara SMK 4 dan SMK 5 Semarang di Jalan Perintis, lha masa kejadian itu saya tu takut kena sasaran orang tawuran makanya mampir ke saudara di daerah Gombel Lama bapak saya salah paham dikira saya main sama teman transpuan. Sore-sore waktu ngrapiin buku nyiapin buat besok, tau-tau dari belakang dipukul sama sapu di kepala sampai sapunya patah pusing banget kepala saya terus diseret keluar rumah diusir terserah saya mau tinggal dimana kata bapak saya.”(R, 24 Februari 2021)

Berdasarkan penjelasan informan mengenai pengalamannya menjadi transpuan di lingkungan keluarga sulit dan bahkan tidak bisa diterima. Perbedaan fisik dan penampilan pada seorang transpuan mengakibatkan mereka rentan terhadap kekerasan karena terkuaknya identitas diri. Kedua, kekerasan publik meliputi segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual dialami seseorang di tempat publik, tempat umum atau dikeramaian. Hal ini diperjelas oleh W seorang lesbian dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Aku pernah hampir diusir oleh warga tempat tinggalku karena ngajak pacarku seorang transman tinggal serumah tanpa lapor ke RT maupun RW. Banyak cibiran dari warga ke orang tua akhirnya warga memuncak waktu pertemuan arisan PKK ibuku diberi ultimatum kalau gaada lapor 1 × 24 jam silahkan pergi secara baik-baik atau warga akan mengusir massal. Sebetulnya setelah kejadian itu secara tidak langsung aku *coming out* mengenai diriku seorang lesbian. Kami hampir tinggal selama 5 bulan kemudian, pindah ke rumah sendiri sama pasanganku menghindari omongan warga yang buruk tentang aku. Tapi ya tetap aja banyak warga yang sudah tau sampai menjelek orang tua saya terakhir waktu bangun rumah perkataannya, mana calon mantumu wani buka klambi porak.”(W, 27 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perilaku W sebagai kelompok LGBTIQ yang melewati batas peraturan masyarakat memang tidak dibenarkan, walaupun dalam keseharian individu tersebut tidak

melakukan pelanggaran zina untuk menghindari perbuatan berlebihan seharusnya W melakukan pelaporan ketika mengajak teman wanitanya menginap lebih dari satu minggu. Namun, perlakuan warga terhadap W secara tidak langsung menolak keberadaan minoritas seksual yang mana setelah kejadian tersebut keluarganya kerap mendapatkan sindiran dari masyarakat sekitar. Kekerasan non seksual berupa segala tindakan eksploitatif, diskriminatif dan kriminal, tetapi tidak disertai kehendak seksual yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Kekerasan tersebut berupa penipuan, pembunuhan dan perampokan.

Sedangkan kekerasan publik pernah dialami oleh YI seorang gay yang tidak bisa diterima kondisinya oleh keluarga sehingga dirinya membatasi pergaulan sosial dengan masyarakat sekitar berusaha bersikap normal di lingkungan masyarakat dan keluarga meskipun membuat kondisinya semakin tertekan. Dalam wawancara YI menyatakan, sebisa mungkin saya harus menghindari konflik dalam keluarga karena tidak ingin ketika nanti ada konflik mencuat mereka membawa-bawa identitas saya dan menyalahkan itu yang sampai saat ini dikhawatirkan (Wawancara dengan YI, 23 Februari 2021). Dalam penelitian ini kelompok LGBTIQ dikehidupan sosial maupun berkomunitas kerap kali mendapatkan kekerasan verbal berupa cemoohan, gunjingan dan ejekan. Hal ini pernah dialami oleh R dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya dirinya mendapatkan ejekan dan dilempari lumpur oleh tetangga yang tidak menyukai keberadaannya, seperti disampaikan sebagai berikut:

“Haduh kalo cemoohan ya sering, tidak cuma teman sekolah tetangga juga ada yang nyinyir. Kalau aku lewat dibilang banci-banci kadang laura dulu pertama ngetrendnya wadam (wanita adam) koe ki mbok yo ojo koyo wadam biasanya gitu, tapi saya sih cuek aja orangnya.”(R, 24 Februari 2021)

Seorang transpuan yang memiliki kondisi ekonomi sulit dan tidak memiliki keterampilan melakukan pekerjaan seperti mengamen di jalanan ini menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan dilakukan aparat

keamanan saat melakukan razia. Hal ini disampaikan R dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Waktu itu razia dialami teman transpuan saya awal-awal pandemi sekitar bulan Maret 2020 di Jembatan Mberok, Kota Lama waktu ngamen dirazia oleh Satpol PP dipangkas habis rambutnya dan ditelanjangi karena dikira gelandangan yang merusak ketertiban kota.”(R, 24 Februari 2021)

Kekerasan didefinisikan secara sederhana berupa tindakan yang melukai, membunuh, merusak dan menghancurkan lingkungan. Manusia memang makhluk sosial, tetapi kerap kali bertindak di luar batas kemanusiaannya. Seorang filsuf Charles Darwin secara ekstrem menyebutkan *survival of the fittest* atau siapa yang terkuat dia yang bisa hidup. Georger Simmel dalam pandangannya mengenai *hostile feeling* yakni perasaan memusuhi ketika manusia terlibat dalam pertentangan (Susan, 2009). Bertindak di luar batas menjadi sebuah kewajaran apabila tujuan utamanya mengubah keadaan menyimpang.

c. Kekerasan Non Fisik

Kekerasan non fisik merupakan kekerasan yang berdampak terhadap jiwa seseorang, seperti kebohongan, diskriminasi, peminggiran, pembatasan dan indoktrinasi yang dapat menurunkan mental seseorang. Keseluruhan tindakan kekerasan non fisik tersebut rentan terhadap kelompok LGBTIQ dalam kehidupan sosial mereka. Pertama, pembatasan akses seseorang terhadap pekerjaan, kepemilikan ekonomi dan sabotase. Hal ini diperjelas O dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Saya pernah disabotase identitasnya oleh orang lain untuk membuat akun cari jodoh dengan nama, foto dan identitas saya sebagai gay. Padahal saya belum pernah terbuka kepada publik kecuali, teman-teman dan orang tua kalau saya itu gay.”(O, 28 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, pengalaman O yang mengalami sabotase identitas berpengaruh terhadap kondisinya karena setelah kejadian tersebut banyak orang bertanya-tanya apakah dirinya sebagai gay atau tidak. Dan kejadian tersebut sangat mengganggu O dalam melakukan aktivitas seharinya. Selain, sabotase kekerasan ekonomi juga tersebut

dalam kekerasan non fisik. Menurut Sudiarti (dalam Wahyuni, 2012) kekerasan ekonomi yakni setiap perbuatan yang bertujuan membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah dalam rangka menghasilkan uang atau barang serta membiarkan individu dieksploitasi dan menelantarkan anggota keluarga. Misalnya, seorang gay mengalami pemerasan oleh pasangannya. Hal ini disampaikan oleh HJ seorang gay mendapatkan pemerasan sebagai berikut:

“Dulu aku pernah diperas sama mantan pacarku kejadiannya enggak langsung sih, tapi berangsur-angsur yang awalnya tidak aku sadari kemudian aku cerita ke temenku lalu dia bilang kalau aku secara tidak langsung diperas oleh pasanganku itu.”(HJ, 1 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara penelitian HJ mengalami kerugian secara materi walaupun, tanpa disadari menurut dirinya apa yang dilakukan bukan menjadi masalah memberikan materi kepada orang dicintai karena harga dirinya tinggi dimata orang dicintai dapat disimpulkan bahwa tindakan HJ untuk mempertahankan status sosialnya dihadapan orang lain. Kekerasan ekonomi yakni kerugian seseorang mengenai pembatasan atau pengurangan materi, dimana seseorang harus menyerahkan atau mengurangi materi diberikan secara tidak langsung maupun paksa. Hal ini disampaikan oleh R seorang transpuan dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Kalau dibilang kekerasan ekonomi gatau ya benar apa salah. Tapi, saya itu dari dulu ngrasa sejak bapak saya tau diri saya transpuan sejak SD dibedakan uang sakunya sama kakak saya padahal kami sama-sama perempuan. Dulu kakak saya waktu kelas 2 SMP aja uang sakunya udah Rp 1.000 sedangkan, saya diposisi sama uang sakunya Rp 500 selalu dibedain gatau kenapa. Tapi saya ga pernah namanya protes sama bapak.”(R, 23 Februari 2021)

Kekerasan ekonomi begitu terasa bagi kelompok LGBTIQ yang diusir dari rumah oleh keluarganya. Dimana mereka harus hidup mandiri secara tindakan maupun pemenuhan kebutuhan hidupnya. Permasalahan kekerasan ekonomi termasuk kekerasan nonfisik yang jarang dibahas dibanding dengan hubungan kekerasan lainnya hal ini dikarenakan,

pengurangan atau pemaksaan tidak dilakukan secara terang-terangan atau langsung berdampak pada korban.

Kedua, kekerasan non fisik dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok rentan. Diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ berawal dari stigma sosial berasal dari pandangan masyarakat yang mendoktrin keseluruhan individu dari aspek sosial dan pemahaman agama yang konservatif. Beberapa contoh yang sering dihadapi kelompok LGBTIQ, yaitu diskriminasi dalam bersosialisasi berupa cemoohan, pelecehan, pengucilan, kekerasan fisik maupun non fisik. Penolakan yang diberikan masyarakat kepada kelompok homoseksual terwujud dalam tindakan menyebabkan diskriminasi dan intoleransi. Kelompok LGBTIQ seringkali mengalami diskriminasi diberbagai bidang seperti, diskriminasi akses pelayanan publik, diskriminasi sosial, diskriminasi pendidikan dan diskriminasi pekerjaan. Dunia pendidikan menjadi tempat diskriminasi dialami kelompok LGBTIQ, *coming out*nya seseorang mengenai orientasi seksual dimasyarakat membuat kecaman dan berdampak perlakuan buruk seperti, dikeluarkan dari institusi pendidikan.

Dalam bidang pekerjaan diantara kelompok homoseksual, kelompok transpuan dan transman berdampak sekali karena jenis kelaminnya tidak menyesuaikan penampilan fisik dimasyarakat. Sulit ditemukan keberadaan mereka dalam ranah pekerjaan formal sebagai perusahaan formal maupun instansi pemerintahan. Salah satu penyebab diskriminasi kelompok tersebut dalam dunia pekerjaan yakni penampilan menarik dengan latar belakang suku, agama, ras dan jenis kelamin yang sesuai dengan identitas di KTP. Masyarakat Indonesia yang genap berusia 18 tahun berhak mendapatkan pekerjaan dengan ruang ruang sama dengan individu lainnya. Namun, kelompok transman dan transpuan ini tidak semuanya mendapatkan keadilan didunia pekerjaan stereotipe dimasyarakat mengenai penyimpangan menyebabkan terbatasnya ruang bagi mereka mengakses pekerjaan formal. Hal ini disampaikan oleh R

seorang transpuan mengenai pengalamannya didunia pekerjaan sebagai berikut:

“Sejak saya SD memutuskan menjadi trans sudah tau kalau nanti cuma bisa kerja non formal seperti, pekerja salon, mengamen, *Master of Ceremony* (MC), pekerja tari dan pekerja seks. Saya kerja sebagai pekerja seks pasif sejak SD ambil jobnya ya sebulan sekali. Lebih seringnya ketika lulus SMK sih, perias diacara pernikahan cukup terkenal saya sering dapat job karena gabung sama temen sekali ngejob itu bisa Rp 1.500.000 untuk merias akad aja.”(R, 23 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, informan menyadari posisinya sebagai seorang transpuan sulit mendapatkan pekerjaan formal dimasyarakat atas keterampilan yang dimiliki R mampu bertahan hidup memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Ketika ditanya kenapa harus menjadi seorang pekerja seks dirinya mengungkapkan masih banyak tanggungan dikeluarga keharusan memenuhi kebutuhan harian ibunya yang sudah janda, satu orang adik masih sekolah, satu orang kakak janda dan satu orang kakak mengalami cacat mental. Menjadi seorang pekerja rias pengantin dan pekerja seks juga sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan saat melakukan pekerjaannya. Saat mendapatkan pekerjaan rias pengantin di Kota Demak R mendapatkan diskriminasi atas kondisinya sebagai transpuan “*nyuwun sewu larene kulo mboten pareng dicepeng jenengan, yen tukang rias yo sing wadhon sisan amargi hukume haram*”, tidak hanya itu menjadi pekerja seks panggilan R kerap mendapatkan perlakuan kasar dari pelanggan ketika tau dirinya seorang trans seperti, didorong dan dimaki-maki (Wawancara dengan R, 23 Februari 2021).

Tidak hanya transpuan menjadi kelompok transman, perempuan berperilaku laki-laki juga rentan mendapatkan diskriminasi dalam pekerjaan. Menurut W seorang lesbian dalam wawancara penelitian, dirinya memiliki pasangan seorang transman yang pernah mendapatkan diskriminasi didunia pekerjaan dipecat dari pekerjaan usai diketahui identitas dirinya oleh karyawan lain. Menjadi transman sangat pemilih dalam pekerjaan menghindari penampilan yang dituntut untuk feminin

seutuhnya seperti, memakai lipstick, bedak yang tebal dan memakai rok (Wawancara dengan W, 27 Februari 2021). Kelompok trans menjadi individu paling rentan dalam dunia sosial dibandingkan kelompok penyuka sesama jenis lainnya. Diskriminasi dapat diartikan sebagai pelayanan atau perlakuan tidak adil dialami seseorang, dimana pelayanan atau perlakuan tersebut didasarkan pada karakteristik seperti, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, agama, kepercayaan, kondisi fisik maupun karakteristik lainnya.

Komunitas LGBTIQ di berbagai daerah rentan terhadap diskriminasi seperti, pembubaran acara. Hal ini disampaikan oleh YI dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Waktu Rumah Pelangi Indonesia mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) suatu tempat di Kota Semarang tepatnya pada tahun 2016 mendapatkan serangan dari Forum Umat Islam Kota Semarang (FUIS) mereka datang memberi ancaman intinya ingin menghancurkan dan membubarkan acara kami. Memang kalau komunitas LGBTIQ mengadakan acara sering banyak ancaman dari pihak lain, pernah saya ikut acara paralegal di Solo tepatnya sebuah hotel yang diadakan komunitas LGBTIQ mendapatkan serangan dari Front Pembela Islam (FPI) Solo padahal kami disana itu nggak seperti mereka pikirkan kami melakukan kegiatan advokasi gimana caranya LGBTIQ ketika mendapat kekerasan dan sharing kasus. Namun, responya negatif kerugiannya besar ya acara tidak lancar banyak yang dapat kekerasan fisik sampai melompat lantai gedung mirislah.”(YI, 23 Februari 2021)

Maraknya pembubaran acara dilakukan oleh masyarakat, oknum komunitas dan aparat penegak hukum secara tidak langsung melanggar hak kebebasan seseorang yakni berekspresi, berserikat, berkumpul dan berpendapat. Terlepas dari adanya partisipasi masyarakat sebagaimana tercantum di peraturan perundang-undangan, namun partisipasi tersebut melanggar hak asasi kelompok lainnya. Diskriminasi terhadap LGBTIQ tidak hanya dialami individunya tetapi komunitas yang mewadahi individu tersebut tak lepas dari kecaman masyarakat tidak menyukai keberadaan mereka. Anggapan dan perlakuan negatif yang mereka dapatkan hampir

membatasi pergerakannya dalam ruang sosial menjadi tekanan bagi mereka. Anggapan negatif serta penolakan atas eksistensi mereka menjadi kelompok LGBTIQ memilih bergaul diantara individu bernasib sama dengannya sehingga kehidupan mereka menjadi eksklusif karena anggapan masyarakat yang buruk terhadapnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, perlakuan buruk dan diskriminatif dialami kelompok LGBTIQ jarang dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan khawatir identitasnya terbuka dimasyarakat dan menjadi cacian pada saat mengakses pelayanan hukum kepada pihak yang berwajib. Beberapa kelompok LGBTIQ di Kota Semarang ada melakukan pelaporan kasus sampai ke ranah hukum, tetapi selebihnya mereka bercerita kepada pihak Rumah Pelangi Indonesia atas kejadian buruk sehingga nanti tim advokasi RPI bersama LBH Semarang melakukan kerjasama memperjuangkan kasus tersebut agar ada perubahan kedepan (Wawancara dengan AA, 14 Februari 2021). Diskriminasi yang dialami kelompok LGBTIQ seharusnya tidak menjadikan mereka terpuruk di kehidupan sosial, tiap individu bisa melakukan hal positif sehingga keberadaan mereka tidak dipandang sebelah mata. Hal ini disampaikan R dalam wawancara penelitian bagaimana transpuan bertahan dalam melawan stigma, kekerasan dan diskriminasi sebagai berikut:

“Cara bertahan dalam perlakuan buruk mungkin kalau keterlaluan pikiran sedang kacau dan tidak mood aku akan mengumpat. Kalau masih bisa ditoleransi aku diam saja dan *survive* mungkin ini menjadi pembelajaran untuk diriku mungkin aku ada yang salah atau bagaimana caraku dalam menghadapi kejadian tersebut agar tidak berulang.”(R, 23 Februari 2021)

Dalam wawancara di atas kelompok LGBTIQ yang mendapatkan perlakuan buruk dan diskriminatif cenderung bertahan atas perlakuan tersebut, mereka menyadari keberadaannya belum sepenuhnya diterima masyarakat dengan baik. Hal penting yang perlu dilakukan berkegiatan positif sehingga masyarakat tidak merisaukan orientasi seksualnya. Dengan melihat keterangan diatas, pemikiran konstruksi budaya patriarki

yang heteronormatif menjadikan kelompok LGBTIQ tidak bisa dipandang dengan baik oleh masyarakat mereka selalu lekat dengan stigma negatif dan rentan perlakuan spontan yang tidak menguntungkan seperti, cemoohan, gunjingan, kekerasan dan diskriminasi dunia sosial.

B. Peran Rumah Pelangi Indonesia dan Keterlibatan LGBTIQ dalam

Komunitas

Dari awal berdirinya Rumah Pelangi Indonesia mempunyai peran dan fungsi yang harus dijalankan bagi anggotanya yakni kelompok LGBTIQ. Sejak bermetafora menjadi Rumah Pelangi Indonesia enam tahun yang lalu komunitas LGBTIQ aktif di Kota Semarang memiliki kegiatan-kegiatan yang telah disusun untuk mewujudkan peran kinerjanya demi keberlangsungan komunitas. Identitas menurut Michael A Hog dan Dominic Abrams (1998) adalah sebuah pengetahuan individu yang telah menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu bersama dengan beberapa emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok tersebut. Jadi identitas ruang aman yang ingin diciptakan Rumah Pelangi Indonesia seluruh peran komunitas akan menjadi pengetahuan telah disepakati bersama, sehingga menciptakan dampak emosional dan *value* yang memiliki makna bagi tiap individu kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Sama halnya dengan sebuah identitas sebagai pengetahuan yang dibentuk oleh Rumah Pelangi Indonesia tentang ruang aman melalui peran komunitas yang didukung oleh pemaknaan anggotanya. Melalui proses konstruksi sosial dalam berdialektika dengan diri (*self*) dan dunia sosiokultural ini berlangsung dalam proses tiga momen simultan. Adapun proses peran Rumah Pelangi Indonesia sebagai berikut:

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia sosialnya, baik dalam kegiatan mental maupun fisik sebagai wujud dirinya mengekspresikan dan menguatkan eksistensinya dalam masyarakat. Manusia berusaha mengungkapkan

dirinya melalui proses yang dihasilkan pada suatu keadaan dengan kata lain, manusia menemukan dirinya dalam keadaan tertentu. Pada proses eksternalisasi kelompok LGBTIQ mencurahkan dan mengekspresikan dirinya dalam sebuah komunitas seperti dalam menciptakan peran bagi minoritas seksual di Kota Semarang. Dimana peran Rumah Pelangi Indonesia yang ditunjukkan sebagai wujud dukungan untuk kelompok LGBTIQ di Kota Semarang salah satunya edukasi dan sosialisasi kepada anggotanya. Dengan tujuan mengembangkan kapasitas, komunitas menyadari kelompok LGBTIQ seringkali dipandang negatif tidak hanya secara perbedaan orientasi seksualnya, tetapi juga kapasitas pola pikir mereka dipandang rendah oleh masyarakat. Maka dari itu, edukasi dan sosialisasi diharapkan anggota dapat ikut serta dalam seluruh kegiatan yang bertujuan mengembangkan kapasitas anggota.

Dalam proses edukasi Rumah Pelangi Indonesia memberikan ruang bagi anggotanya mengikuti paralegal merupakan kegiatan berkumpul untuk mengedukasi antar anggota komunitas. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan fokus utama yang dimiliki Rumah Pelangi Indonesia. Edukasi ini dilaksanakan satu bulan sekali. Tujuan dari kegiatan ini sebagian besar anggotanya kelompok LGBTIQ rentan mendapatkan perlakuan buruk atau tidak menguntungkan seperti, kekerasan fisik, non fisik, cacian, gunjingan dan diskriminasi dalam kehidupan sosialnya. Kegiatan paralegal ini menjadi tempat bertemunya anggota lama, anggota baru dan pengurus. Rumah Pelangi Indonesia tidak memiliki kegiatan khusus seperti, *pen meet up* (pertemuan pertama anggota baru) jadi seluruh anggota dalam komunitas boleh langsung bergabung diseluruh kegiatan. Pada kegiatan paralegal ini anggota diajarkan oleh pengurus bagaimana cara ketika mereka dihadapkan pada situasi tidak menguntungkan. Hal ini disampaikan oleh R dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Salah satu kegiatan Rumah Pelangi yang rutin saya ikutin ya itu, paralegal kami diajarkan kalau dihadapkan situasi tidak menguntungkan kami harus siap menuliskan kronologi kasus. Kata pengurus yang menyampaikan itu salah satu hal penting ketika kami ingin membawa kasus tersebut ke ranah hukum seluruh kejadian harus lengkap seperti 5 W + 1 H nya supaya nanti tim advokasi RPI bisa menindak kasus dengan mudah.”(R, 23 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut kegiatan tersebut sangat penting bagi kelompok LGBTIQ mereka bisa menuliskan kejadian buruk yang pernah dialami dengan cara menuliskan kronologi kasus. Rumah Pelangi Indonesia juga menunjukkan perannya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anggotanya mengenai penyakit menular HIV/AIDS. Salah satu alasan masyarakat menolak keberadaan kelompok LGBTIQ karena dianggap dapat menyebar penyakit HIV/AIDS. Padahal penyakit menular tersebut tidak hanya dialami oleh kelompok LGBTIQ melainkan melalui perilaku beresiko yakni hubungan seksual tanpa menggunakan kondom sehingga memungkinkan cairan tubuh mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangan. Penyakit tersebut rentan terhadap pria maupun wanita kerap berganti pasangan dalam berhubungan seksual, dari seorang ibu hamil yang positif HIV kepada anaknya selama waktu kehamilan, persalinan hingga menyusui dan penggunaan alat suntik yang tidak disterilkan terlebih dahulu beresiko menyebarkan penyakit. Program kesehatan HIV/AIDS diberikan kepada anggota RPI melalui bentuk edukasi, konseling VCT dan pelayanan kesehatan untuk menanggulangi penyakit tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan internal yang hanya diikuti oleh anggota komunitas.

Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ komunitas membentuk ruang aman dengan memfasilitasi anggotanya dalam bentuk pelayanan. Ruang aman bertujuan memberikan perlindungan bagi kelompok LGBTIQ dengan menyediakan layanan, seperti *shelter* (rumah aman), fasilitas kesehatan, konseling dan layanan pengaduan dalam bentuk advokasi. Ruang aman diberikan kepada

anggota ketika mengalami kasus kekerasan dan diskriminasi dapat mengakses beberapa fasilitas yang diberikan komunitas. Komunitas sebagai tempat bagi anggotanya merasa nyaman dan aman dalam membangun keberdayaan diri dengan mendapatkan dukungan dari anggota lain dan pengurus di dalamnya.

Dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar kelompok LGBTIQ Rumah Pelangi Indonesia mengembangkan kapasitas anggota melalui pelatihan soft skill yang bertujuan menguatkan kerjasama anggota dan melatihnya menjadi pribadi lebih baik dalam perannya di masyarakat. Melalui pelatihan leadership yang merupakan kegiatan internal bagi anggota Rumah Pelangi Indonesia. Kegiatan leadership ini menekankan pada tujuan terciptanya pribadi-pribadi yang dapat mengorganisir dirinya dalam sebuah kepengurusan. Hal ini disampaikan oleh YI seorang relawan aktif RPI dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Pernah waktu itu saya ikut pelatihan leadership, tujuannya untuk melatih jiwa kepemimpinan kita dalam kepengurusan komunitas maupun ketika menjadi ketua atau manajer dalam sebuah perusahaan. Menurut saya banyak anggota komunitas yang memiliki jiwa kepemimpinan terbukti banyak sekali anggota jadi manajer perusahaan.”(YI, 23 Februari 2021)

Dalam kegiatan tersebut anggota komunitas mendapatkan ilmu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik bagi individu lainnya, bersikap adil dalam mengambil keputusan dan merencanakan kinerja dengan mengambil kesepakatan bersama tanpa ada keegoisan pribadi. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan ini mendukung satu sama lain anggota bersikap toleransi terhadap sesama agar menghindari terjadinya konflik dalam komunitas, saling mendukung ketika ada permasalahan dan bersikap bijaksana ketika menghadapi setiap perlakuan buruk diterima. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah edukasi dan penyaringan restrukturisasi kepengurusan Rumah Pelangi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh O dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Saya sebagai pengurus waktu itu saya dipercaya oleh Rumah Pelangi Indonesia mengikuti kegiatan nasional di Jakarta

mengenai pelatihan leadership. Disana saya diajarkan bagaimana kepemimpinan, berorganisasi, monitoring komunitas dan pelatihan keuangan komunitas. Manfaat lain juga banyak jaringan dengan komunitas lain dan pertemanan baru.”(O, 28 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, komunitas juga mengembangkan kapasitas anggotanya dengan mengikutsertakan pada kegiatan di tingkat nasional. Tujuan dari pengurus mengikutsertakan anggota ini agar bisa menjalin pertemanan dengan organisasi lain dan kembali ke komunitas untuk berbagi ilmu yang didapatkan. Kegiatan *leadership* bagi kelompok LGBTIQ penting bahwasanya banyak masyarakat berpandangan menjadi minoritas tidak bisa melakukan apa-apa memiliki pengetahuan minim dan banyak menjadi pengamen serta pekerja non formal lainnya. Memang untuk pekerjaan tersebut tidak selamanya bersinggungan dengan kehidupan mereka tetapi jiwa kepemimpinan ini tidak hanya mengatur kehidupan sosial tetapi, kehidupan pribadi bagaimana bersikap dengan baik bahwa menjadi kelompok LGBTIQ mereka memiliki wawasan yang luas tidak diragukan dari kelompok lainnya.

Edukasi dan sosialisasi dalam memperjuangkan hak-hak dasar kelompok LGBTIQ di Kota Semarang RPI aktif mengadakan edukasi Edukasi *Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics* (SOGIE-SC) adalah kegiatan pembelajaran mengenai keberagaman seksualitas di Indonesia yang dialami kelompok minoritas seksual dan gender. Kegiatan ini membahas mengenai adanya akar penindasan yang dialami oleh kelompok LGBTIQ. Kegiatan edukasi SOGIE-SC memaparkan adanya orientasi seksual beragam tidak hanya heteroseksual saja tetapi biseksualitas, panseksualitas, homoseksual, demiseksual, sapioseksual dan aseksual kegiatan edukasi awalnya diberikan kepada anggota internal komunitas tetapi, lambat laun banyak pihak yang merasa edukasi ini penting untuk memperluas kajian dimasyarakat mengenai seksualitas, identitas gender dan ekspresi manusia. Menurut YI selaku anggota dan relawan aktif RPI mengatakan, edukasi SOGIE-SC sangat bermanfaat membuat kita semakin melek kesetaraan

gender pandangan budaya patriarki menjadikan perempuan harus feminin dan laki-laki maskulin sehingga, keluarlah gender superior dalam kehidupan serta pembelajaran ragam orientasi seksual (Wawancara dengan YI, 23 Februari 2021).

Edukasi menjadi program kerja RPI mengenai kampanye minoritas seksual dan gender di Indonesia. Langkah awal dalam mengenalkan masyarakat mengenai ragam seksualitas dan gender karena kesadaran komunitas di Indonesia masih jarang edukasi mengenai SOGIE-SC karena masyarakat notabene tidak menyetujui keberadaan LGBTIQ di lingkungannya stigma melekat sehingga menghasilkan perbuatan spontan yang buruk seperti, diskriminasi dan kekerasan. Edukasi dan sosialisasi menjadi dampak positif yang ditawarkan komunitas ketika anggota tergabung memiliki banyak wawasan yang dapat berguna untuk kehidupannya, sehingga berdaya di masyarakat.

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia sebelumnya. Hasil itu berupa realitas objektif yang dijadikan sebagai suatu aktivitas berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud nyata) dan menyebabkan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu dalam kelompok tersebut. Tindakan ini akan menjadi suatu kebiasaan bagian mereka dan menjadi bagian yang tetap dalam realitas mereka.

Salah satu pelayanan komunitas ruang aman dalam bentuk program kesehatan HIV/AIDS yakni VCT mobile biasanya RPI bekerjasama dengan layanan kesehatan anggota komunitas dianjurkan datang dalam kegiatan tersebut untuk mengecek status HIV/AIDSnya. Kegiatan tersebut dilakukan selama sebulan sekali komunitas mengoordinir anggotanya untuk melakukan VCT mobile bersama-sama yang menjadi salah satu cara

untuk menghindari perlakuan buruk biasanya dialami anggota pada fasilitas kesehatan bila pergi ke layanan yang belum konsen tentang keberagaman gender dan seksual. Komunitas berupaya memberikan kenyamanan bagi anggotanya dalam mengakses fasilitas kesehatan dengan memberikan pendampingan.

Rumah Pelangi Indonesia juga bekerjasama dengan PKBI Kota Semarang untuk mengedukasi anggotanya mengenai penyakit seksual tersebut seperti, bagaimana cara penularannya, cara berhubungan seksual aman dan apa saja yang bisa dilakukan bila ternyata positif HIV/AIDS. Program kesehatan tidak hanya mengenai HIV/AIDS saja melainkan kesehatan reproduksi kepada anggota yakni bagaimana cara merawat organ reproduksi yang benar, pemakaian alat menstruasi seperti, penggunaan softex dan *menstrual cup* dan khususnya bagaimana cara penggunaan yang benar dan aman agar tidak menyebabkan bakteri pada tubuh serta pentingnya merawat kesehatan reproduksi agar tidak timbul penyakit pada tubuh kita. Hal ini disampaikan oleh YI selaku relawan aktif RPI sebagai berikut:

“Kegiatan kesehatan HIV/AIDS justru banyak anggota yang datang karena kesadaran mengenai kesehatan itu penting. Tidak hanya edukasi dan VCT mobile saja RPI juga rutin mengajak anggota konseling HIV/AIDS di pelayanan kesehatan biasanya tiga bulan sekali dan tentunya kami juga bekerjasama dengan layanan kesehatan untuk menghindari adanya diskriminasi seperti, memaki LGBTIQ rentan terhadap penyakit tersebut dan pemanggilan nama tidak sesuai biasanya sering dialami transpuan, kalau terjadi kasus demikian biasanya kami langsung advokasi layanannya.”(YI, 23 Februari 2021)

Berdasarkan penjelasan AA selaku ketua pelaksana harian RPI dalam wawancara penelitian, program kesehatan HIV/AIDS untuk menghindari penyakit tersebut dialami oleh anggotanya. Jikalau nanti terdapat anggota ternyata positif RPI menyarankan supaya penderita dapat rutin meminum obat dan terapi ARV. Rumah Pelangi Indonesia menyarankan anggota untuk rutin mengecek kesehatan di pelayanan

terdekat Puskesmas tempat tinggalnya dan apabila anggota terdeteksi positif HIV/AIDS disarankan untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit Kariadi, Kota Semarang. Dalam program kesehatan HIV/AIDS komunitas juga membagikan kondom gratis yang berasal dari layanan kesehatan.

Program ruang aman dengan bentuk kampanye memperjuangkan hak-hak dasar kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Dalam kegiatan ini anggota dan pengurus komunitas menyampaikan aspirasi terkait kondisi mereka sebagai minoritas seksual rentan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Komunitas memberikan jembatan kepada anggotanya agar terlibat aktif dalam komunitas dengan memberdayakan mereka dengan peran positif dalam kehidupan sosial. Kampanye adalah kegiatan yang diadakan secara umum tidak hanya melibatkan keanggotaan komunitas saja, tetapi komunitas lain di Kota Semarang dengan isu sosial yang beragam. Kegiatan ini merupakan wujud penyampaian aspirasi kepada masyarakat yang menjadi tuntutan dan ajakan kepada berbagai individu untuk menciptakan perubahan. Kampanye Rumah Pelangi Indonesia menjadi wujud kegiatan tim advokasi mengenai kasus sosial masyarakat.

Gambar 1.5

Kampanye RPI dalam peringatan Hari Perempuan Internasional 2020



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

Salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan Rumah Pelangi Indonesia adalah Peringatan Hari Perempuan Internasional 2020 di Gubernuran, Kota Semarang bersama komunitas lain. Rumah Pelangi

Indonesia menampilkan drama berkisah seseorang transpuan yang mendapatkan diskriminasi dari keluarga diusir dari rumah hingga bertemu dengan seorang alies yang memberi mereka kehidupan untuk bangkit dan memaknai hidupnya. Dalam kampanye tersebut RPI tidak hanya memperjuangkan isu minoritas seksual saja tetapi juga kesetaraan gender perempuan, buruh perempuan, omnibus law, menuntut pengesahan RUU PKS dan menolak RUU ketahanan keluarga. Kampanye sebagai salah satu cara komunitas mengajak anggota memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Komunitas memiliki peran mengoordinir anggota dan pengurusnya untuk mewujudkan kinerjanya bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan proses pemahaman untuk memahami proses-proses subjektif orang lain agar memiliki makna bagi kita. Dalam internalisasi terdapat dua macam yang dapat dilakukan untuk menemukan pemahaman, yaitu dengan cara sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer terjadi dalam lingkup keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder diperankan oleh sebuah organisasi sosial atau komunitas yang sengaja dibentuk untuk menyebarkan pemahaman mereka yakni bersama yaitu menyampaikan peran komunitas sebagai wadah edukasi dan ruang aman. Dari sosialisasi sekunder ini akan terbentuk bagaimana peran Rumah Pelangi Indonesia yang dimaknai oleh anggotanya sehingga mereka berdaya dan memaknai hidupnya.

Seperti pada kegiatan Rumah Pelangi Indonesia melaksanakan bertujuan memberikan ruang aman dan nyaman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilakukan secara online maupun offline sebagai bentuk mewujudkan peran komunitas. Dalam proses internalisasi, komunitas akan menunjukkan bagaimana anggota mengidentifikasi diri dalam komunitas atas perannya dalam komunitas dan

bagaimana komunitas menginternalisasikan diri bekerjasama dengan berbagai jaringan sosial untuk mewujudkan berjalannya kinerja komunitas.

Berikut merupakan kegiatan edukasi dan ruang aman dilaksanakan Rumah Pelangi Indonesia secara online maupun offline:

Rumah Pelangi Indonesia memiliki peran edukasi dalam bentuk kegiatan kampanye kepada anggota komunitas maupun di luar komunitas mengenai keberadaan kelompok LGBTIQ. Tujuan dari edukasi umum ini membahas seputar perlakuan buruk yang dialami kelompok LGBTIQ di lingkungan sosialnya. Kegiatan ini sekaligus sebagai cara menarik simpati audiens sebagai minoritas seksual mereka tentu perlu mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara.

Gambar 2.5

Webinar Diskriminasi pada Transpuan



Sumber: Akun Instagram @rumahpelangiindonesia.official

Gambar diatas merupakan salah satu agenda webinar oleh Rumah Pelangi Indonesia yang mengkaji tentang diskriminasi transpuan dalam pandangan negara, khususnya terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan perlakuan buruk atas cacian dan diskriminasi dalam pekerjaan tentu berdampak buruk atas ketidakberdayaan mereka untuk mengasah keterampilan yang dimiliki. Dalam pelaksanaan webinar Rumah Pelangi Indonesia bekerja sama dengan ELSAM dan OPSI.

Gambar 3.5

Kegiatan Bedah Film Lovely Man “Ciptakan Ruang Aman, Hentikan Kekerasan”



Sumber: Akun Instagram @rumahpelangiindonesia.official

Gambar diatas merupakan kampanye RPI melalui keterlibatannya menjadi pemateri dalam bedah film dengan tema “Ciptakan Ruang Aman, Hentikan Kekerasan” bersama LRC KJHAM dan Lembaga Studi Sosial dan Agama pada tanggal 10, Desember 2020. Pengadaan webinar dan keterlibatan Rumah Pelangi Indonesia dalam kajian edukasi menjadi salah satu cara memaparkan kondisi dan memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

Kegiatan kampanye ini sekaligus sebagai cara kelompok LGBTIQ tergabung dalam komunitas saling mendukung individu lain yang memiliki nasib seperti dengannya untuk memperjuangkan hak-hak dasar kerap kali direnggut pihak lain dalam berinteraksi sosial. Segala persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak menguntungkan patut diperjuangkan untuk mencapai keadilan. Kampanye dilakukan Rumah Pelangi Indonesia selain melalui media sosial dan kampanye langsung yang lainnya berupa pemateri di kegiatan kemahasiswaan dan komunitas lain serta kampanye dalam bentuk penelitian anggota dan mahasiswa nantinya akan ada penyaringan secara ketat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan oleh komunitas.

Mengadakan edukasi dan sosialisasi dalam bentuk webinar terbuka untuk umum. Pada masa pandemi covid-19 seluruh kegiatan dilakukan melalui media daring untuk mengurangi kegiatan tatap muka yang

menciptakan kerumunan. Dalam rangka mengisi kegiatan komunitas selama masa pandemi covid-19 Rumah Pelangi Indonesia mengadakan kegiatan webinar edukasi untuk masyarakat umum yang diselenggarakan via zoom. Webinar bertujuan mengedukasi anggotanya dan masyarakat umum mengenai kelompok LGBTIQ pada masa pandemi covid-19.

Pada awal pandemi bulan Maret RPI mengadakan kegiatan yakni pertama bertema menyoal diskriminasi negara pada transpuan dengan pemateri Rumah Pelangi Indonesia, ELSAM dan OPSI bertujuan membahas diskriminasi dialami transpuan mengalami stigma negatif karena budaya patriarki yang mengakar dan negara yang tidak mengakui gender lain selain laki-laki dan perempuan mengakibatkan transpuan rentan kekerasan dan diskriminasi dan kedua, dampak masa pandemi terhadap ibu dan anak dengan pemateri Rumah Pelangi Indonesia dan Ketua Koordinasi Perempuan Positif Indonesia bertujuan membahas kondisi pihak dianggap masyarakat menyebabkan penyakit menular seksual menjadi ODHA kerap kali mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat terlebih apabila dirinya seorang LGBTIQ stigma dialami menjadi berlipat dan ketiga, ragam gender dan seksualitas bersama empat tokoh keagamaan dan Ketua PEWARIS bertujuan memaparkan pandangan pemateri dari keempat agama mengenai posisi LGBTIQ di Indonesia.

Gambar 4.5

Webinar Ragam Gender dan Seksual dalam Perspektif Agama



Sumber : Grup IWD Semarang, 2021

Tujuan dari kegiatan webinar ini selama masa pandemi Rumah Pelangi Indonesia tetap menjalankan perannya bagi kelompok LGBTIQ dimana edukasi tetap aktif dilaksanakan. Selain itu, komunitas ini mengadakan pelatihan media kepada anggotanya pada masa pandemi pembuatan konten kreatif begitu penting karena semua kegiatan dilakukan secara virtual. Hal ini disampaikan oleh YI dalam wawancara sebagai berikut:

“Pernah mengikuti pelatihan media diajarkan bikin konten kreatif masa pandemi seperti, pembuatan pamflet dan video kreatif. Pelatihan media anggota juga diajarkan mengenai advokasi media pemberitaan yang dilakukan oleh para jurnalis agar tidak salah sehingga tidak menambah diskriminasi dan stigma kepada kelompok LGBTIQ.”(YI, 23 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, anggota komunitas diajak mengikuti pelatihan media untuk diajarkan membuat konten kreatif yang berguna di masa pandemi ini. Rumah Pelangi Indonesia memiliki peran pertama, ingin mengembangkan kapasitas yang dimiliki anggotanya dengan edukasi untuk mengasah pola pikir dan memberdayakan kelompok LGBTIQ agar semakin menunjukkan hal-hal positif dimiliki yang didapatkan dari komunitas.

Dalam rangka mewujudkan ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang Rumah Pelangi Indonesia membuat kegiatan *gathering* bertujuan memfasilitasi anggotanya untuk monitoring kasus dan pengaduan atas perlakuan buruk yang dialami. *Gathering* merupakan kegiatan pertemuan rutin komunitas antara pengurus dan anggota. Kegiatan ini bertujuan mengakrabkan satu sama lain. Pembahasan dalam *gathering* ini beragam seperti, monitoring kasus dialami kelompok LGBTIQ di lingkungan tempat tinggal, kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi ketika ada anggota positif HIV/AIDS atau mengalami kasus kekerasan dan diskriminasi untuk akses pelayanan hukum, VCT mobile untuk mengecek status HIV/AIDS seseorang turut mengundang komunitas lain yakni PEWARIS para transpuan Kota Semarang diadakan pada waktu

gathering anggota supaya semua LGBTIQ baik dalam keanggotaan maupun di luar bisa mendapatkan manfaatnya.

Gambar 5.5

Gathering Rumah Pelangi Indonesia



Sumber : Facebook Rumah Pelangi Indonesia

Gathering juga bisa berwujud pertemuan kecil biasa anggota komunitas dilaksanakan di tempat makan dengan membicarakan pengalaman anggota mendapatkan kasus dari teman komunitas menyarankan keputusan yang harus diambil apabila ingin mengambil ranah hukum. Hal ini disampaikan oleh W anggota Rumah Pelangi Indonesia dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya berkontribusi aktif di RPI kalau ada waktu luang saya sempatkan untuk datang. Kalau *gathering* biasanya anggota membahas isu yang beredar dimasyarakat seperti, pembunuhan, kekerasan dan diskriminasi yang dialami LGBTIQ didaerah lain. Lalu bagaimana cara kita ketika mendapatkan perlakuan seperti itu menurut saya semua anggota terlibat aktif akrab banget dan sampai sharing pekerjaan juga.”(W, 27 Februari 2021)

Dalam kegiatan *gathering* RPI memberikan edukasi mengenai *coming in* dan *coming out* kepada anggotanya. Bagi komunitas ini *coming out* tidak menjadi sebuah keharusan dilakukan individu terlebih ketika hal tersebut berdampak negatif pada kehidupan sosialnya seperti, diusir oleh keluarga, mendapatkan stigma berat di lingkungan sekitar dan membatasi diri beraktivitas. Menurut GR selaku Program Manager RPI, *coming in* penting bagi individu ketika dia bisa menerima dirinya sendiri akan

membuatnya merasa tidak terpuruk menghadapi kondisinya sedangkan, *coming out* kami tidak mengharuskan apabila ini membahayakan posisi anggotanya komunitas akan memberikan terbaik dimana mereka harus menentukan pilihan terbaik bagi dirinya (Wawancara dengan GR, 14 Februari 2021). *Gathering* yang dilaksanakan Rumah Pelangi Indonesia juga diwujudkan dalam bentuk ngobrol santai yang terbuka untuk kelompok LGBTIQ anggota maupun di luar komunitas membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), pengenalan diri dan mengenali tubuh. Ngobrol santai tema HAM dan pengenalan diri ini dilaksanakan melihat banyak kelompok LGBTIQ masih terjebak kebingungan untuk menetapkan identitas dirinya apakah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual atau Queer yang bertujuan lebih memahami kebutuhan dirinya dan pengambilan keputusan kedepan dalam kehidupan sehari-hari untuk memaknai hidupnya.

Ruang aman Rumah Pelangi Indonesia mengajak seluruh anggotanya untuk berperan di masyarakat melalui kegiatan bakti sosial saat perayaan hari besar. Kegiatan peringatan hari besar yakni kegiatan internal komunitas dengan anggota berkumpul disebuah tempat serta melakukan penyebaran pamflet di media sosialnya. Kegiatan Rumah Pelangi Indonesia dalam rangka peringatan hari besar seperti tahun sebelumnya mengadakan malam natal bersama bertujuan beribadah dan mengakrabkan keanggotaan satu sama lain yang turut merayakan natal. Dengan diselingi acara makan bersama anggota komunitas biasanya ada kegiatan lain seperti, edukasi dan perencanaan bakti sosial dalam peringatan hari raya keagamaan.

Ruang aman diciptakan Rumah Pelangi Indonesia sebagai wujud peran komunitas memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Peran ruang aman sangat dibutuhkan bagi kelompok LGBTIQ yang merasa terpuruk terutama mereka yang diusir dari rumah, komunitas memberikan wadah berupa *shelter* (rumah aman). Dalam

berkomunitas Rumah Pelangi Indonesia tidak ingin anggotanya mendapatkan pengetahuan yang lebih melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk edukasi untuk menumbuhkan kreativitas dan peran positif di masyarakat. Tidak hanya edukasi saja, Rumah Pelangi Indonesia memberikan ruang bagi mereka yang mengalami kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC untuk mengakses pelayanan hukum, konseling dan fasilitas kesehatan.

Pada proses internalisasi melalui sosialisasi sekunder yang dilakukan oleh Rumah Pelangi Indonesia merupakan produk budaya di dalam komunitas baik material maupun non material yang telah terobjektifikasi dan diserap dalam kesadaran subjektif tiap anggota. Sehingga dalam proses inilah sosialisasi begitu penting untuk mengambil peran mendidik tiap anggota dan menyesuaikan dengan program-program yang telah disediakan Rumah Pelangi Indonesia. Selain melakukan proses pembelajaran melalui sosialisasi, tiap anggota menyerap dan memberikan makna dan mengekspresikan melalui perilaku sehari-hari. Dalam ketiga proses konstruksi sosial dalam mengkonstruksi pemahaman anggota mengenai identitasnya dirinya komunitas memberikan edukasi dan ruang aman agar kelompok LGBTIQ berdaya dalam kehidupan sosialnya.

BAB VI

STRATEGI RUMAH PELANGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DASAR BAGI KELOMPOK LGBTIQ

A. Strategi Advokasi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan

Hak-Hak Dasar

Berdasarkan literatur, istilah advokasi dalam bahasa Inggris mempunyai makna tunggal yakni “membela”, sedangkan pengertian luasnya yakni kegiatan dalam rangka membela kelompok lemah atas suatu kasus melalui berbicara di pengadilan. Menurut Sheila Espine Villaluz (dalam Suharto, 2009), advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memperjuangkan suatu isu ke dalam ide kebijakan, mendorong pembuat kebijakan memperjuangkan dan menyelesaikan masalah dari isu yang diangkat serta membangun basis dukungan publik untuk turut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah. Dalam rangka memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ di Kota Semarang, Rumah Pelangi Indonesia membentuk tim advokasi memberikan pelayanan terhadap individu yang mendapatkan perlakuan buruk dari pelayanan umum maupun mendapatkan kekerasan dan diskriminasi di masyarakat dengan membantu korban dalam menyelesaikan permasalahan.

Advokasi dilakukan bertujuan aktivitas membantu individu atau kelompok yang mendapatkan penolakan dari suatu lembaga atau sistem layanan, serta membantu mengembangkan pelayanan agar dapat dijangkau lebih banyak orang. Advokasi dilakukan dengan cara membantu klien dalam mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial, merancang dan mengembangkan kebijakan. Dalam proses advokasi tim berupaya menghubungkan klien dengan sumber pelayanan sosial sehingga

meningkatkan percaya diri, menguasai kapasitas masalah dan memenuhi kebutuhan klien. Melalui proses konstruksi sosial dalam berdialektika dengan diri (self) dan dunia sosiokultural ini berlangsung dalam proses tiga momen simultan. Proses konstruksi ini menunjukkan bagaimana Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Dengan teori konstruksi sosial peneliti mencoba menguraikan strategi advokasi yang dilakukan komunitas untuk memperjuangkan hak-hak minoritas seksual di Kota Semarang. Adapun dalam proses advokasi Dubois dan Miley merumuskan tiga strategi advokasi yaitu aras mikro, meso dan makro digunakan Rumah Pelangi Indonesia (Dubois dan Miley, 2005).

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam kehidupan, baik melalui kegiatan mental maupun fisik. Manusia berusaha mengungkapkan dirinya melalui proses yang dihasilkan pada suatu keadaan dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam keadaan tertentu. Eksternalisasi menunjukkan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan yang diwujudkan melalui tindakan interaksi sosial. Oleh karena itu, setiap individu yang telah sadar tergabung dalam komunitas akan berupaya tergabung dalam seluruh kegiatan termasuk menjadi pekerja sosial dalam advokasi kasus yang dilakukan Rumah Pelangi Indonesia kepada LGBTIQ korban kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC.

Seperti dalam, advokasi aras mikro merupakan strategi mikro menempatkan pekerja sosial sebagai broker sosial menghubungkan klien dengan sumber-sumber pelayanan yang tersedia di lingkungan sekitarnya (Dubois dan Miley, 2005). Sebagai broker sosial atau pekerja sosial, teknik utama yang dilakukan yakni manajemen kasus dengan mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang dimiliki beragam penyedia. Tim advokasi komunitas bersama dengan klien melakukan diskusi secara langsung mengenai permasalahan dimiliki. Ketika diskriminasi atau kekerasan dialami individu atau sekelompok LGBTIQ

yang dilakukan oleh individu, sekelompok atau masyarakat tetapi klien tidak bisa merespon dengan baik maka tim advokasi akan berupaya berargumentasi, bernegosiasi dan berbicara atas nama klien yang menjadi korban. Advokasi dengan model ini sering disebut advokasi klien.

Advokasi mikro atau klien yang dilakukan tim advokasi Rumah Pelangi Indonesia terfokus pada advokasi litigasi dan non litigasi. Akan tetapi, advokasi dilakukan Rumah Pelangi Indonesia lebih banyak menggunakan non litigasi dan ekstra litigasi dalam perlingkungannya dengan alasan sebagian besar klien tidak menginginkan mengambil jalur litigasi (hukum) dengan resiko terungkapnya kasus ke permukaan dan identitas dirinya terutama bila, orang tua dan teman terdekat belum mengetahui akan berdampak buruk pada kehidupan sosialnya. Advokasi pada tingkat mikro akan dijelaskan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Advokasi Litigasi

Advokasi litigasi “berbasis komunitas” merupakan advokasi yang lebih menekankan pada jalur komunitas. Dalam hal ini tim Rumah Pelangi Indonesia menekankan pada tahap advokasi lingkup komunitas di lapangan. Anggota komunitas yang tergabung dalam tim advokasi RPI sebelumnya memang memiliki keahlian mengenai paralegal penanganan kasus. Ketika melakukan advokasi hal pertama dilakukan oleh klien adalah membuat pelaporan kepada tim advokasi. Hal ini disampaikan oleh GR dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“SOP advokasi kasus Rumah Pelangi Indonesia yang pertama ketika mereka mendapatkan kasus harus melakukan pelaporan ke siapapun (tim advokasi) membuat janji temu untuk menuliskan kronologi yang dilakukan tim pencatatan kasus.”(GR, 14 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dalam melakukan advokasi kasus jalur litigasi klien diminta untuk membuat pelaporan kepada tim kemudian, membuat janji temu untuk melakukan pencatatan bagaimana kronologi terjadinya kasus kekerasan atau diskriminasi

yang dialami klien. Dalam janji temu tersebut tim advokasi memberikan saran jalan keluar yakni pertama, klien menempuh jalur hukum akan dihubungkan kepada tim hukum yang berwenang dengan resiko dan konsekuensi permasalahan akan menjadi perbincangan publik termasuk identitasnya kedua, klien menempuh jalur non litigasi sehingga kasus ini tetap didengarkan klien bisa mengakses pelayanan konseling yang disediakan komunitas.

Ketika klien menempuh jalur hukum tim advokasi belum memiliki kewenangan dan keahlian dalam artian lembaga tidak mampu memberikan pendampingan secara litigasi di Pengadilan kepada klien atau korban, maka Rumah Pelangi Indonesia berjejaring dengan suatu lembaga yang mendapatkan hak litigasi di bidang hukum yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang maupun LRC-KJHAM. Hal ini disampaikan oleh AH tim pengadvokasian GBQ dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Kami berjejaring baik dengan LBH Semarang ketika ada advokasi korban ingin mengakses jalur hukum kita hubungkan dengan LBH Semarang, hubungan antara dua lembaga ini cukup baik saling melengkapi. Ketika nanti RPI butuh tim penanganan kasus LBH mereka siap dan ketika pihak sana membutuhkan pemateri atau menyelesaikan permasalahan terkait minoritas seksual, kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi kami bisa bantu.”(AH, 18 Februari 2021)

Setelah klien menyatakan ingin mengakses jalur litigasi, kemudian tim advokasi RPI mempertemukan klien dengan tim penanganan kasus LBH Semarang untuk membuat strategi penanganan kasus. Ketika LBH Semarang mencoba melaksanakan advokasi, Rumah Pelangi Indonesia tidak harus melakukan litigasi terlebih dahulu setelah penanganan selesai, kemudian dapat memberikan bantuan kepada kelompok LGBTIQ yang menjadi korban. Tim advokasi RPI akan mendampingi korban ketika di pengadilan, tetapi nanti keseluruhan tim utamanya berasal dari LBH Semarang. Dalam wawancara AH selaku tim advokasi mengatakan, timnya merasa kesulitan pertama, permasalahan internal ketika korban tidak

menginginkan kasusnya dilanjutkan kembali karena takut identitasnya akan terbuka dimasyarakat dalam hal ini tim advokasi tidak bisa memaksa klien memberikan sepenuhnya hak kepada dirinya dan kedua, kurang responsifnya aparat keamanan mengenai kasus minoritas seksual terhadap tim maupun klien kasus tersebut dipandang sebelah mata karena stigma dan keberadaan LGBTIQ belum bisa diterima (Wawancara dengan AH, 18 Februari 2021).

b. Advokasi Non Litigasi

Advokasi non litigasi merupakan cara kerja penyelesaian kasus dengan menekankan kepada musyawarah dan media tidak sampai menempuh jalur hukum di pengadilan. Ketika terdapat permasalahan dialami oleh kelompok LGBTIQ menekankan pada pertemuan dimana tim advokasi dan klien membuat janji temu membicarakan permasalahan dan mencari jalan tengah. Dalam hal advokasi non litigasi ini tim Rumah Pelangi Indonesia berusaha untuk tidak mendikte klien terkait pemecahan atas permasalahan yang akan diambil oleh klien, melainkan memberikan pandangan dan pengetahuan terkait kasusnya sebatas menyampaikan langkah-langkah maupun resiko yang akan dihadapi klien kedepan. Rumah Pelangi Indonesia ditingkat advokasi non litigasi memiliki dua pelayanan yakni konseling dan pendampingan yang dapat diakses bergantung kepada kebutuhan korban.

a) Konseling

Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor melalui wawancara konseling dengan klien yang menghadapi permasalahan hingga menemukan jalan keluar atas masalahnya. Dalam melakukan proses konseling Rumah Pelangi Indonesia meminta bantuan LBH Semarang untuk menghubungkan dengan konselor dari UNIKA Semarang kemudian, strategi layanan yang dilaksanakan berupa

bimbingan dan konseling kepada korban kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC. Hal ini mengingat perlakuan buruk yang diterima klien akan membuat dirinya trauma sangat sulit disembuhkan dan memakan waktu tidak sebentar. Dalam prakteknya, ketika komunitas mendapatkan pelaporan dari korban khususnya staf pendampingan kasus akan merespon cepat apalagi ketika ada cedera fisik yang ditimbulkan. Setelah dilakukan assesmen oleh tim pendamping, kemudian dilaksanakan penanganan kasus. Pada tahapan selanjutnya, tim pendamping akan menghubungkan klien dengan konselor untuk menyelesaikan permasalahan.

b) Pendampingan

Pendampingan merupakan strategi tim advokasi untuk mendampingi sesuai kebutuhan klien. Sebagai korban klien serta lingkungannya sebagai sistem pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Klien memang mendapatkan posisi tidak menguntungkan atas perlakuan buruk yang diterima, tetapi dalam pendampingan tim akan menempatkannya sebagai sistem memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi lingkungannya. Bentuk pendampingan yang diberikan kepada kelompok LGBTIQ yang menjadi korban kekerasan berbasis SOGIE-SC, mereka diposisikan bukan hanya sebagai korban melainkan memiliki potensi dengan menggali kekuatan dalam diri mereka. Sasaran dalam pendampingan adalah klien dan keluarganya. Klien harus memberikan pemahaman kepada keluarga atas perlakuan buruk yang dialaminya untuk mencari jalan keluar bersama. Namun, pendampingan terkadang mengalami hambatan karena klien tidak ingin orang tua mengetahui identitas diri mereka. Dalam advokasi pendampingan ini bagaimana keberadaan korban apakah semua kegiatan yang diberikan telah memberdayakan klien dan selama proses ini klien

diharapkan memiliki kepekaan sehingga tidak terjadi pengulangan kekerasan pada korban.

c) Penjangkauan klien

Dalam proses non litigasi penjangkauan klien menggunakan sistem menjemput bola. Hampir keseluruhan kelompok LGBTIQ mengurungkan niatnya melakukan pendampingan maupun mengambil jalur hukum salah satu alasannya kurangnya akses di ranah publik, terutama bila klien tidak tergabung dalam Rumah Pelangi Indonesia atau komunitas lainnya. Kondisi dialami kelompok LGBTIQ ketakutan mereka tidak diterima keberadaan oleh masyarakat atas pandangan negatif mengenai LGBTIQ menyebabkan mereka rentan atas perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Kerentanan tersebut menyebabkan LGBTIQ di lingkungan sosial cenderung bungkam dan pasrah ketika mendapatkan ketidakadilan. Hal ini disampaikan oleh AA dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Jarang ada LGBTIQ melaporkan kasus ataupun mengambil jalur hukum karena sebagian besar masih khawatir kalau nanti kasusnya akan masuk ke media dan orang tua mengetahui identitasnya. Tapi biasanya kami cuma melakukan non litigasi mendampingi dan memberi pelayanan konseling serta nanti advokasi ke pemerintahan.”(AA, 14 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, kelompok LGBTIQ jarang melakukan pelaporan kasus terhadap perlakuan buruk yang diterima hal ini menyebabkan Rumah Pelangi Indonesia melakukan pendokumentasian kasus dengan cara menjemput bola. Strategi menjemput bola ini dilakukan untuk menjangkau korban-korban kekerasan dan diskriminasi yang tidak memiliki akses mobilitas karena keterbatasan alat transportasi, informasi maupun media sosial. Strategi menjemput bola menjadi cara efektif untuk membuat kelompok LGBTIQ lebih berdaya dalam lingkungan sosial dan peka terhadap perlakuan buruk yang dialami namun,

strategi ini cenderung memiliki kerja ekstra karena membutuhkan waktu lama dan rumit. Pertama, tim advokasi ketika melakukan pendampingan lebih jeli terhadap situasi di lapangan. Kedua, melakukan penggalian data terhadap permasalahan yang dialami oleh korban secara terperinci dalam kronologi kasus.

Sebelum menerapkan metode menjemput bola pertama tim advokasi akan memperoleh pelaporan terlebih dahulu perihal kasus yang terjadi pada klien. Pelaporan terkait keberadaan klien sebelum dilaksanakan menjemput bola dapat diperoleh dari sumber yakni penjangkauan *hotline* via telepon, klien rujukan dari lembaga lain, informasi media sosial dan klien datang ke kantor. Strategi pelaporan kasus dilakukan Rumah Pelangi Indonesia selain menggunakan metode menjemput bola yakni menerima pelaporan langsung dari klien.

Beberapa langkah dilakukan klien dalam pelaporan kasus yakni pertama, klien melakukan pelaporan melalui *hotline* kemudian membuat janji temu dalam kegiatan tersebut menjadi tahap pengenalan apabila klien berasal dari luar komunitas dan membangun kepercayaan kedekatan terhadap klien. Kedua, klien diharapkan mengisi formulir mengenai identitas yang diperlukan selanjutnya tim advokasi akan menjelaskan kerahasiaan, keamanan dan kenyamanan ketika nanti mengambil jalur litigasi maupun non litigasi. Ketiga, tim advokasi melakukan penggalian data mengenai kronologi kasus untuk pengambilan langkah selanjutnya. Tim kemudian akan menyampaikan informasi dan penguatan mengenai pilihan yang akan diambil semakin cepat klien menentukan akan mudah dan segera kasus terselesaikan. Langkah terakhir yakni tim pendamping membuat ringkasan dan membahas bersama terkait pilihan solusi yang dimungkinkan ditempuh oleh klien. Setelah itu, ketika klien memilih sesuai dengan keputusan mengambil jalur

hukum tim advokasi RPI akan menghubungi LBH Semarang untuk membuat jadwal pertemuan dan tim penanganan kasus bersama.

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan proses manifestasi diri atau bentuk pengungkapan kenyataan subjektif ke dalam bentuk-bentuk kegiatan yang bisa diketahui oleh orang lain sebagai unsur-unsur dunia bersama. Dalam tahap objektivasi melalui advokasi komunitas memiliki peran mengoordinir anggota maupun kelompok membutuhkan ikut serta dalam pencegahan terjadinya kekerasan dan diskriminasi agar tidak berulang melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Seperti melalui advokasi aras meso merupakan strategi advokasi dengan membentuk jejaring guna mengkoordinasikan dan bekerjasama mewujudkan pelayanan-pelayanan sosial membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga hukum serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki pandangan mengenai kesetaraan dan keberagaman gender di Indonesia (Ardiyantika, 2016).

Dalam strategi ini pekerja sosial berperan sebagai mediator dalam advokasi kasus mewakili dan mendampingi individu atau kelompok dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan solusi dari permasalahan dialami, merumuskan tujuan, memobilisasi sumber daya, memonitoring serta mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Jejaring dinilai menguntungkan salah satu jalan untuk mencapai keberhasilan dan kerja sama dalam proses advokasi di Rumah Pelangi Indonesia. Advokasi melalui jejaring memiliki manfaat besar bagi komunitas untuk memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ di Kota Semarang yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC. Keseluruhan jaringan dalam lembaga-lembaga mitra saling bekerjasama menyesuaikan permasalahan yang terjadi. Dengan berjejaring antara lembaga dan komunitas saling menguntungkan satu sama lain mengenai

isu yang dipegang oleh masing-masing dalam rangka memperjuangkan kekerasan dan diskriminasi bagi kelompok LGBTIQ.

Dalam menjalankan kinerjanya pada advokasi meso, Rumah Pelangi Indonesia membentuk program yang bertujuan menanggulangi dan mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC dialami oleh kelompok rentan minoritas seksual. Program tersebut berguna agar klien ketika mendapatkan kekerasan dan diskriminasi harus bertindak seperti apa. Berikut ini program-program termasuk dalam proses advokasi meso yakni:

a. Pelatihan Paralegal

Pelatihan paralegal dilaksanakan atas keprihatinan komunitas melihat angka meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Kegiatan ini termasuk program kerja internal komunitas sebagai cara mewujudkan peran serta dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ dengan peserta anggota komunitas. Kepedulian komunitas terhadap kelompok minoritas seksual di Jawa Tengah mewadahi mereka untuk menciptakan ruang aman sehingga mudah mewujudkan kenyamanan dalam dunia sosial tidak terbatas dalam ekspresi, pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Tujuan dari dibentuknya pelatihan paralegal untuk mengembangkan kapasitas anggota tim advokasi RPI memberikan pengetahuan mengenai jenis kekerasan dan diskriminasi di lingkungan masyarakat, bagaimana individu LGBTIQ bersikap ketika mendapatkan perlakuan buruk atau tidak menguntungkan ketika beraktivitas yang dilakukan individu, kelompok atau lembaga dan bagaimana kerja dari penanganan kasus tersebut. Dalam pelatihan paralegal dihadirkan antara anggota dengan pemateri berdiskusi mengenai bermacam kasus dan penanganannya. Anggota dalam pelatihan paralegal komunitas diberikan arahan ketika mengalami kejadian buruk di lingkungan harus menuliskan kejadian atau

kronologi secara lengkap agar permasalahan mereka dapat mudah dihubungkan dengan pelayanan hukum apabila menginginkan.

Pelatihan paralegal dilaksanakan dengan kontribusi divisi pengorganisasian yakni membangun kepercayaan diri anggota dan menjadi paralegal dalam sebuah kasus. Walaupun demikian, divisi pengorganisasian sebagai tim advokasi kerap mengalami hambatan ketika mengadvokasi kasus di komunitas yakni mereka hanya mendapatkan pelatihan paralegal dan hukum tidak berhak bersinggungan dengan hukum sehingga ketika menghadapi permasalahan hukum bekerja sama dengan LBH Semarang. Divisi pengorganisasian Rumah Pelangi Indonesia berperan sebagai mediator yaitu tempat curhat kelompok LGBTIQ mendapatkan permasalahan kekerasan dan diskriminasi. Komunitas ketika melaksanakan *gathering* selalu ada monitoring kasus namun, tidak semua anggota terbuka dengan kasusnya disini peran divisi pengorganisasian merangkul agar mereka tidak semakin terpuruk. Berperan sebagai edukator yakni memberikan *training* mengenai pengembangan kapasitas seperti, pelatihan, edukasi dan webinar komunitas. Hal ini disampaikan oleh GR selaku Program Manager Rumah Pelangi Indonesia dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Tujuan dari kerja berjejaring kami sadar tidak bisa berjalan sendiri maka dari itu, ketika kegiatan kami lakukan melebihi kapasitas komunitas kami bekerja sama seperti bantuan hukum LBH Semarang, komunitas keagamaan Gusdurian dan media dengan AJI. Inklusifitas kami tidak bisa terbangun apabila mengesklusifkan diri.”(GR, 14 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas komunitas membangun banyak jejaring dengan komunitas dan lembaga lainnya untuk mempermudah pengembangan kapasitas. Adapun hasil dari pelatihan paralegal anggota komunitas sekaligus membantu dalam pendokumentasian kasus dan ilmu yang didapatkan dari kegiatan

tersebut dapat dibagikan dengan kelompok LGBTIQ lainnya agar membuat mereka berdaya dan memaknai hidupnya.

b. Webinar diskriminasi

Dalam rangka membangun kapasitas anggota komunitas dan masyarakat umum Rumah Pelangi Indonesia mengadakan webinar mengenai diskriminasi. Pelaksanaan webinar dengan mengundang beberapa tokoh yang aktif dalam mengadvokasi keberadaan kelompok LGBTIQ dan kerentanannya. Dalam webinar diskriminasi bertujuan menyampaikan kondisi LGBTIQ dan isu-isu mengenai kelompok tersebut di lingkungan sosial. Selain itu, komunitas mengharapkan anggota komunitas maupun kelompok LGBTIQ di luarnya untuk peka terhadap kekerasan segala bentuk perlakuan buruk yang diterima dapat menjurus pada kekerasan maupun diskriminasi bagaimana cara mereka dalam mengakses permasalahan dan mencegah terjadinya tindakan buruk. Dalam pelaksanaan webinar diskriminasi memberikan pengetahuan mengenai akar kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ, hak-hak apa saja yang terlanggar dan bentuk kekerasan diskriminasi dialami serta materi lainnya.

c. Publikasi Media Sosial

Pada masa pandemi ini seluruh kegiatan beralih pada media sosial. Dalam menjalankan visi dan misinya Rumah Pelangi Indonesia mengupayakan jejak digital sebagai sarana edukasi dan kampanye kepada masyarakat umum. Beberapa informasi yang dianggap penting layak untuk dibagikan di media sosial komunitas. RPI aktif dalam media sosialnya yakni Instagram (@rumahpelangiindonesia.official) dan Facebook (Rumah Pelangi Indonesia) untuk mempublikasikan hasil advokasi penanganan korban kekerasan, edukasi dan menjadi wadah kampanye komunitas dalam memperjuangkan hak-hak LGBTIQ di Kota Semarang. Manfaat dari publikasi media sosial komunitas untuk memperluas jaringan sosial sehingga diketahui

masyarakat umum. Laman media sosial berguna membagikan informasi kegiatan komunitas internal maupun bersama organisasi atau lembaga lainnya. Salah satu tujuan utamanya mempublikasikan kepada masyarakat keberadaan Rumah Pelangi Indonesia sebagai komunitas mewadahi kelompok LGBTIQ di Jawa Tengah dengan kinerja dan jaringan sosial di Kota Semarang sebagai ruang aman dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di wilayahnya.

Gambar 1.6

Klarifikasi Kasus RPI



Sumber : Akun Instagram @rumahpelangiindonesia.official

Gambar di atas berasal dari laman media sosial Instagram RPI yang membuat klarifikasi kasus terjadi di Kabupaten Pati berdasarkan pantauan tim RPI, LBH Semarang, LRC-KJHAM dan kawan-kawan lain di Pati terkait kasus yang menghebohkan membuat warga geram menangkap basah pasangan homo mesum di mobil dengan telanjang bulat dan diikat di pinggir jalan untuk memberikan efek jera. Fakta

dari kasus tersebut di lapangan adalah kedua orang pasangan digrebek warga karena mabuk dan kedapatan menggunakan narkoba, tidak seperti yang diberitakan pada media jurnalistik membuat berita hoaks yang menyatakan pasangan tersebut penyuka sesama jenis. Publikasi yang dilakukan Rumah Pelangi Indonesia selain mengklarifikasi kasus yakni komunitas mengadvokasi kepada media jurnalistik yang kerap membuat berita hoaks mengenai pasangan penyuka sesama jenis dari berita tersebut akan berdampak pada pandangan buruk masyarakat mengenai keberadaan minoritas seksual.

Gambar 2.6

Flayer Kampanye RPI Atas Penolakan Kasus Klien



Sumber : Akun Instagram @rumahpelangiindonesia.official

Gambar tersebut berasal dari laman media sosial Rumah Pelangi Indonesia hasil dari penanganan kasus klien brigadir berinisial TT dipecat dari pekerjaannya usai menyatakan dirinya seorang gay. Seluruh proses penanganan kasus dan bukti yang telah diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak bisa diterima dengan asakan menguji keabsahan PTDH yang didasarkan pada orientasi seksual. Maka dari itu, komunitas mencoba mengkampanyekan hasil ketidakadilan yang diberikan kepada minoritas seksual di Kota Semarang melalui publikasi media sosial yakni Instagram.

Gambar 3.6

Edukasi Transfobia



Sumber : Akun Instagram @rumahpelangiindonesia.official

Gambar di atas berasal dari akun Instagram Rumah Pelangi Indonesia sebagai wujud edukasi kepada masyarakat mengenai transfobia. Edukasi transfobia RPI merepost dari akun @aruspelangi yang merupakan jaringan sosial komunitasnya. Flayer transfobia di tengah kita diwujudkan melalui bentuk memberikan pengertian apa itu transfobia, bentuk transfobia, piramida kebencian, LGBTIQ tapi transfobik dan langkah kecil untuk menghapus perilaku transfobia. Tujuan dari edukasi transfobia yakni

mengurangi rasa ketakutan atau perasaan tidak nyaman terhadap orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender tidak sama dengan diharapkan oleh budaya tertentu. Masyarakat transfobia mengurai kebencian melalui stigma negatif yang mengarahkan pada diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual. Publikasi media sosial menjadi wadah Rumah Pelangi Indonesia dalam mewujudkan kegiatan komunitas di jaringan online yang harapannya dapat diketahui khalayak mengenai peran dan eksistensi mereka dalam memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan proses pemahaman atau penafsiran langsung oleh seseorang. Penafsiran ini berasal dari sebuah pengalaman atau sebuah peristiwa objektif yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu makna. Sebagai bentuk penyerapan kembali dari dunia objektif ke dalam kesadaran, maka perlu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal oleh kesadaran oleh orang yang mengalaminya. Dengan internalisasi terdapat dua macam yang dapat dilakukan untuk menemukan pemahaman, yaitu dengan cara sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dibentuk melalui keluarga seseorang tergabung dalam komunitas mendapatkan dukungan dari keluarga karena peran positif yang ditunjukkan. Sedangkan, sosialisasi sekunder melalui komunitas mereka antusias dalam mengikuti dan berperan serta dalam kegiatan dukungan kepada kelompok LGBTIQ korban diskriminasi dan kekerasan.

Dalam rangka membantu kelompok LGBTIQ, Rumah Pelangi Indonesia menggunakan advokasi aras makro merupakan strategi pendamping menjadi aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis, divisi pengorganisasian Rumah Pelangi Indonesia terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat, meningkatkan

kesadaran publik terhadap seluruh permasalahan sosial tidak hanya mengenai minoritas seksual tetapi juga ketidakadilan dialami kelompok rentan lainnya melalui mobilisasi sumber daya untuk mengubah kondisi buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negosiasi agar tercapai perubahan dalam bidang hukum termasuk melakukan aksi kelas. Dalam komunitas anggota berupaya menginternalisasikan diri mengambil peran di seluruh kegiatan termasuk memobilisasi sumber daya untuk mengubah kondisi dan memperjuangkan hak kelompok LGBTIQ tertindas. Pada proses terakhir konstruksi sosial, anggota komunitas menginternalisasikan diri melalui aksi sosial untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan memobilisasi masa dengan mengubah cara pandang negatif masyarakat mengenai kelompok LGBTIQ. Sejak berdirinya Rumah Pelangi Indonesia pada tahun 2015 telah melakukan beberapa aksi advokasi makro sebagai berikut:

a. Pemerintah

Dalam rangka tercapainya advokasi dengan baik, Rumah Pelangi Indonesia turut menggerakkan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada minoritas seksual dan menjamin agar hak-hak kelompok tersebut tidak diabaikan pihak lain yang mencoba melanggar setiap hak yang dimiliki individu. Beberapa tuntutan para aktivis mewadahi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang yakni:

1. Mendorong pemerintah untuk mensahkan RUU PKS dengan alasan kekerasan seksual kerap kali dialami oleh orang dengan jenis kelamin perempuan dan transpuan di lingkungan sosial. Kondisi korban dengan trauma yang sangat mendalam maka dari itu, pemerintah harus memberikan perlindungan payung hukum mengenai kekerasan seksual.
2. Mendorong pemerintah memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas gender dan seksualitas.

3. Memberikan ruang aman bebas pelecehan, diskriminasi dan intimidasi untuk pekerja seks.
4. Penciptaan kampus sebagai ruang aman dari segala bentuk diskriminasi, intimidasi gender serta bebas pelecehan dan kekerasan seksual. Kampus selayaknya menjadi ruang aman bagi seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik tanpa mendapatkan diskriminasi pihak manapun.
5. Mendorong pemerintah dalam membuka ruang demokrasi bagi individu atau kelompok manapun.
6. Memperjuangkan hak-hak individu yang sering terlanggar seperti, hak seksualitas, hak ekonomi atas penelantaran, hak demokrasi kebebasan berpendapat, hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak lain yang dirasa mendiskriminasi individu LGBTIQ dalam kehidupan sosialnya.

Rumah Pelangi Indonesia pernah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan Semarang Gaya Community (SGC) dan Persatuan Waria Semarang (Perwaris) dalam rangka mengadvokasi kebijakan kepada Dinas Sosial Kota Semarang kelompok LGBTIQ kerap mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan karena penampilan mereka yang tidak sesuai dengan KTP terutama kelompok trans. Advokasi tersebut dilakukan lantaran banyak kelompok LGBTIQ mendapatkan perlakuan buruk dan seringkali dikesampingkan dalam hal apapun. Hal ini dikarenakan stigma dan diskriminasi melekat dalam minoritas seksual dan gender tersebut beberapa komunitas mengupayakan agar anggotanya mendapatkan pelayanan umum yang sama dengan individu lainnya.

b. Masyarakat

Tim pengorganisasian Rumah Pelangi Indonesia melakukan kampanye dihadapan masyarakat sekitar dalam rangka memperjuangkan hak-hak bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Kampanye merupakan salah satu strategi advokasi dimana RPI dalam menyuarakan secara langsung tuntutan maupun ajakan dalam bentuk lisan dan tulisan.

Gambar 4.6

Kampanye Hari Perempuan Internasional



Sumber : Akun Instagram @rumahpelangiindonesia.official

Hal ini dilakukan mengambil simpatik masyarakat terkait keberadaan kelompok LGBTIQ yang rentan terhadap perlakuan buruk seperti, kekerasan, diskriminasi dan stigma yang melekat sehingga kehidupan kelompok tersebut terganggu dan tidak bisa mengembangkan kapasitas dengan baik atas keberadaan mereka dipandang eksklusif. Kampanye bertujuan mensosialisasikan ide, wacana, pandangan terhadap suatu kebijakan dengan tujuan mendapat dukungan publik. Melalui kampanye ini dilakukan membentuk pendapat publik tidak hanya secara langsung, semakin modern aktivis menggunakan media sosial dalam berkampanye dengan menyebarkan pamflet, poster, gambar dan video.

Advokasi menjadi sarana penghubung antara klien dengan sumber pelayanan sosial yang dapat meningkatkan percaya diri, kapasitas mengenai masalah dan memenuhi kebutuhan klien atas peristiwa buruk yang dialaminya. Dengan adanya proses konstruksi sosial menciptakan realitas sosial bahwa kenyataan menjadi seorang LGBTIQ kita harus saling mendukung satu sama lain terutama kelompok lemah dalam mewujudkan advokasi sehingga seluruh kegiatan maupun tindakan anggota didasarkan atas empati sesamanya. Dalam penelitian, penulis menggunakan proses advokasi Dubois dan Miley yakni aras makro, meso dan mikro yang dianggap selaras dengan pengadvokasian dilakukan tim Rumah Pelangi Indonesia. Secara lebih rincinya peneliti menjelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.6

Tiga Tahapan Strategi Advokasi

Aspek	Aras		
	Mikro	Meso	Makro
Jenis advokasi	Advokasi kasus	Advokasi kelas	Advokasi kelas
Sasaran	Individu atau kelompok	Kelompok formal dan organisasi	Masyarakat lokal dan masyarakat nasional
Peran	Broker	Mediator	Aktivis
Teknik	Manajemen kasus	Jejaring	Aksi sosial Analisis kebijakan

Sumber: Dubois dan Miley (2005)

Berdasarkan tabel tersebut upaya yang dilakukan oleh para aktivis tim pengorganisasian Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang untuk mendapatkan keadilan merupakan bentuk advokasi. Hal ini dikarenakan

aktivis kelompok LGBTIQ RPI melakukan pembelaan terhadap minoritas seksual tersebut melalui cara berbicara dalam forum (kampanye, negosiasi dan konsolidasi), pengadilan (penanganan kasus hukum klien) dan mempengaruhi para pengambil keputusan (advokasi kebijakan). Advokasi yang dilakukan oleh tim pengorganisasian RPI diidentifikasi sebagai jenis advokasi kasus dan kelas dimana mereka memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ dan mengadvokasi agar memperoleh keadilan atas perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang dialami. Lebih lanjut mengenai strategi advokasi yang dilakukan yakni level mikro para aktivis Rumah Pelangi Indonesia melakukan manajemen kasus dan pendokumentasian pada kekerasan dan diskriminasi dialami kelompok LGBTIQ, level meso para aktivis melakukan cara berjejaring dengan para lembaga atau komunitas lain seperti, LBH Semarang, LRC-KJHAM, aparat keamanan, pemerintah dan penyedia layanan. Selanjutnya, level makro para aktivis melakukan upaya bersama masyarakat dan komunitas lainnya untuk menciptakan keadilan memperjuangkan hak-hak bagi kelompok LGBTIQ dengan cara proses kampanye dilingkungannya.

Pemaparan mengenai strategi advokasi dilakukan Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang dengan tujuan melakukan tindakan mengarah pada pembelaan kepada individu sebagai pihak yang lemah dalam suatu peristiwa. Advokasi berupaya memperjuangkan hak dan kepentingan individu atau kelompok lemah dengan cara mempengaruhi pengambilan keputusan atau berbicara dalam forum atau pengadilan. Tujuan dari tindakan tersebut tidak lain untuk mencapai keadilan yang diinginkan melakukan perubahan atas kondisi tidak sesuai dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hambatan Advokasi Rumah Pelangi Indonesia

Dalam melakukan aksi berkaitan dengan keadilan manusia para aktivis LGBTIQ tidak bisa terlepas dari permasalahan yang ada.

Kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ sangat beragam yakni kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan domestik dan diskriminasi dalam lingkungan sekitar. Pada proses advokasi, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi divisi pengorganisasian Rumah Pelangi Indonesia. Dalam mempermudah pengklasifikasian hambatan terbagi menjadi dua yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dialami oleh para aktivis dalam mengadvokasi klien permasalahan individual seperti, cemoohan, ancaman gunjingan dan trauma. Hal ini disampaikan oleh AH tim pengadvokasian GBQ dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Waktu itu saat saya mengadvokasi klien kasus kekerasan seksual sempat trauma teringat masa lalu. Karena saya sendiri pernah mengalami kekerasan seksual jadi sedikit terhambat dan saya mencoba bertahan untuk bisa mengadvokasi klien dengan baik sesuai kemampuan.”(AH, 18 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut pengalaman pribadi seorang aktivis dapat menjadi hambatan dalam proses kinerja advokasi walaupun demikian, seorang aktivis harus profesional untuk memperjuangkan keadilan diinginkan oleh kliennya. Selain permasalahan dialami oleh staf, permasalahan internal dalam dari klien menghambat proses advokasi yakni memutuskan berhenti tidak jadi dilanjutkan biasanya dengan alasan takut ketika permasalahan ini mencuat kepermukaan banyak media mengekspose terjadi bahan perbincangan masyarakat mengenai identitas klien dan kekhawatiran orang tua tidak bisa menerima. Tidak hanya kelompok LGBTIQ khawatir atas identitasnya yang terkuak proses advokasi hal tersebut juga menjadi hambatan aktivis, ketika dirinya belum bisa *coming out* kepada orang tua akan menjadi kendala karena nantinya media biasa mendapatkan informasi dari komunitas yang disampaikan langsung oleh tim penanganan kasus. Hambatan bersifat eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pekerja atau staf bersifat kelembagaan maupun pihak lainnya. Hal ini disampaikan oleh AA Ketua Pelaksana Harian Rumah Pelangi Indonesia dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Salah satu hambatan keberadaan kelompok LGBTIQ tidak diakui negara sehingga Pemerintah, Kepolisian dan Pengadilan kurang menindak tegas pengajuan kasus kami. Seringkali kami meminta keadilan dengan klien menempuh jalur hukum tanggapannya malah dimaki balik kenapa kamu menjadi LGBTIQ. Permasalahannya klien kami mendapatkan ketidakadilan kekerasan dan diskriminasi sekarang bukan waktunya membahas orientasi seksual seseorang.”(AA, 14 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, keadilan yang diinginkan kelompok LGBTIQ masih saja dibenturkan orientasi seksual. Tidak diakui minoritas seksual dan gender di Indonesia membuat keadilan tidak bisa diakses dengan baik karena belum ada payung hukum kuat melindungi kelompok LGBTIQ. Mereka masih saja dibenturkan oleh stigma negatif yang melekat seperti, golongan penyuka sesama jenis, penyebar perilaku menyimpang dan kelainan jiwa. Dalam mengakses keadilan dengan baik seharusnya aparat dan pengadilan tidak mempermasalahkan orientasi seksual seseorang tetapi, perlakuan buruk atau tidak menguntungkan dialami setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses perlindungan hukum tanpa dibatasi oleh apapun. Alasan tersebut yang membuat Rumah Pelangi Indonesia lantang memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Jawa Tengah masih ada pelanggaran hak dialami minoritas tidak hanya di lingkungan sosial tetapi, dalam mengakses perlindungan hukum tidak direspon dengan baik seringkali diabaikan perihal orientasi seksual. Bagaimana tim advokasi bisa menangani kasus klien dengan baik kalau pihak kepolisian masih menyalahkan perihal orientasi seksual yang tidak hanya menyasar kepada klien tetapi, kami tim pengorganisasian turut membantu juga menjadi sasaran atas pernyataan tersebut (Wawancara dengan AH, 18 Februari 2021).

Hambatan dalam proses pengadvokasian kasus yang datang dari luar lembaga seringkali berakibat buruk terjadinya persekusi. Hal ini disampaikan oleh AA dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Ceritanya waktu itu tim advokasi menangani kasus klien permasalahannya klien kami seorang butchi bersama dengan pasangannya mengalami masalah, orang tua mengira anaknya dibawa kabur oleh pasangannya padahal itu keinginan dari keduanya. Sampai ketika orang tua tidak terima anaknya melaporkan kasus sehingga terkuak identitasnya dan keluarga ini memasukan penyusup ke dalam grup WhatsApp komunitas kemudian mengakses dimana kantor dari Rumah Pelangi Indonesia. Pada saat itu memang sangat genting karena orang tua ini termasuk sosok penting dan orang berada sehingga mudah menggerakkan semua elemen dan membuat tim terbekukan.

Siang itu saya ditelfon orang tua tanya kamu dimana, ini saya sudah sampai dan saat itu semua perkataan di via telepon itu sangat persis dengan keadaan sehingga kami kelabakan genting dia mengancam akan menggrebek dan menghancurkan kantor kami. Langsung saya menghubungi LBH Semarang mencari tempat aman untuk anggota komunitas dan dokumen penting lainnya. Hambatan terbesar hingga saat ini mungkin kejadian itu.”(AA, 14 Februari 2021)

Hambatan dari luar komunitas membuat pengadvokasian kasus menjadi terhambat antara keinginan klien dan keluarga yang tidak menemukan titik temu membuat kasus berhenti di tengah jalan. Dari wawancara tersebut hambatan dialami tim advokasi dalam penanganan kasus klien dapat mengarahkan pada tindakan persekusi yang mengancam keberadaan komunitas.

B. Tantangan Komunitas LGBTIQ di Semarang

Sejak reformasi seluruh gerakan sosial di Indonesia menuai angin segar, termasuk gerakan LGBTIQ. Pada masanya publik dituntut aktif dalam beragam gerakan demi pembangunan nasional. Walaupun, pergerakan komunitas LGBTIQ telah ada sejak lama harus diakui isu ini tergolong baru dalam gerakan sosial membutuhkan perjuangan lama karena membicarakan isu gender dan seksualitas yang dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Alasan mengapa individu dan kelompok LGBTIQ sulit menyasar dalam lembaga formal di Indonesia karena sistem sosial dan politik yang tertera dan dijalankan masih homofobia sehingga peluang LGBTIQ dalam melakukan gerakan tidak dimungkinkan. Menjadi bagian dari perjuangan kelompok LGBTIQ di Kota Semarang, Rumah Pelangi Indonesia turut dalam mewarnai

perdebatan dan mendorong semua pihak untuk memahami satu sama lain terutama di negara Indonesia yang demokratis.

Keinginan mewujudkan kehidupan lebih baik tanpa diskriminasi oleh siapapun sebagai warga negara. Dalam rangka mewujudkan ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang, Rumah Pelangi Indonesia melakukan beragam kegiatan yang bertujuan mengedukasi, memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan hukum serta mengadvokasi kekerasan dan diskriminasi minoritas seksual tersebut. Ketika aktivis LGBTIQ mendirikan sebuah komunitas tentu sudah dibayangkan konsekuensi yang akan diterima dalam mewadahi kelompok rentan minoritas seksual banyak tantangan tidak hanya datang dari individu di dalamnya, tetapi juga dari luar komunitas. Segala macam tantangan ini akan dihadapi oleh komunitas dengan konsekuensinya dalam rangka mewujudkan visi dan misi menginkluskasikan pengurus dan anggota mengembangkan kapasitas agar kelompok LGBTIQ berdaya dan bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa tantangan yang dialami Rumah Pelangi Indonesia sebagai komunitas LGBTIQ di Kota Semarang dalam memperjuangkan hak-hak bagi kelompok LGBTIQ sebagai berikut:

- a. Tantangan internal yang dialami komunitas LGBTIQ. Pertama, komitmen dan tanggung jawab dalam internal komunitas yang harus dibangun melalui kekompakan dan rasa tanggungjawab diantara pengurus maupun anggota. Rumah Pelangi Indonesia merupakan komunitas seluruh kinerjanya didanai oleh swadaya dan kinerjanya berdasarkan sukarela atau volunteer keanggotaan. Keseluruhan kinerjanya berdasarkan sukarela maka dari itu, dibutuhkan komitmen dan kesadaran anggota untuk melancarkan kinerja komunitas terkait waktu dan tenaga. Kedua, background berbeda tiap individu menjadi tantangan dalam mewujudkan kelancaran kinerja komunitas yang diselesaikan dengan

menciptakan hubungan baik berguna untuk regenerasi dan menghindari adanya konflik internal yang meruntuhkan semangat pengurus dan anggota di dalamnya untuk mempertahankan eksistensi komunitasnya. Hal ini disampaikan oleh GR selaku Program Manager Rumah Pelangi Indonesia dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Kalau di komunitas kamu tau sendirilah, bagaimana menghadapi perbedaan satu sama lain tidak hanya secara latar belakang ilmu saja melainkan emosional juga. Kesulitan kami itu awal berdirinya komunitas harus memiliki AD/ART membutuhkan waktu yang lama karena tidak semua anggota memiliki background anak kuliah jadi kami melatih bagaimana mereka harus tau membuat seperti ini, itu guna pengajuan akta kenotariatan. Jadi saya sebagai salah satu pendiri komunitas benar-bener membangun dari nol bersama pengurus lama lainnya. Permasalahan lain dari berdirinya komunitas itu ya masalah receh-receh anak muda seperti, percintaan dan ejek-ejekan. Itu yang menjadi penghambat nanti berujung pada salah satu anggota berkonflik keluar dari komunitas.”(GR, 14 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, tantangan memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ tidak hanya dari luar komunitas tetapi dari dalam yakni anggota dan pengurus. Tidak bisa dipungkiri untuk mewujudkan tujuan komunitas menciptakan ruang aman bagi kelompok LGBTIQ seluruh elemen dalam komunitas harus berkomitmen dan kerjasama satu sama lain. Visi dan misi komunitas tidak bisa dicapai apabila anggota di dalamnya tidak mampu mengakomodir keseluruhannya. Disampaikan oleh GR dalam wawancara mengenai tantangan internal komunitas yakni permasalahan keahlian dan emosional anggotanya. Permasalahan kecil namun, sangat mempengaruhi kinerja komunitas disini program manager memiliki wewenang mengatur anggota di dalamnya.

Pengurus belajar dari pengalaman komunitas gay di Semarang bahwasanya membentuk komunitas tidak hanya

berdasarkan adanya program tetapi, kami harus mampu mengakomodir anggota dan individu lain di luar komunitas mengenai isu-isu semakin bertambah tahun permasalahan mengenai LGBTIQ tidak melulu tentang satu hal saja, tetapi banyak lainnya jadi komunitas harus bersama mencari jalan keluar dari konflik dan isu mengenai perjuangan hak-hak kelompok LGBTIQ (Wawancara dengan GR, 14 Februari 2021).

Ketiga, konflik kepengurusan. Setahun terakhir ini komunitas menghadapi permasalahan internal serius yang dijelaskan oleh GR dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 akhir dimana program manager komunitas tahun 2015-2019 melakukan kekerasan seksual terhadap anggotanya dan beberapa orang lain di luar komunitas. Permasalahannya dimana kedudukan dia sebagai pengurus inti sangat mempengaruhi pandangan orang lain maupun jaringan sosial atas tindakannya. Kesalahan buruk yang dilakukan bukan itu saja, tetapi setelah diusut dia mempunyai catatan buruk melakukan korupsi keuangan beberapa komunitas lain di Kota Semarang yang pernah dia koordinir termasuk Rumah Pelangi Indonesia.”(GR, 25 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, permasalahan yang dialami internal komunitas mengenai kasus dilakukan pengurus inti sebagai pelaku kekerasan seksual dan korupsi keuangan sangat mempengaruhi kepercayaan anggota dan jaringan sosial komunitas. Permasalahan tersebut tergolong serius dan membutuhkan musyawarah dari anggota dan pengurus untuk pemecahannya demi kebaikan bersama.

Keempat, permasalahan pembagian tugas dalam struktur kepengurusan. Dalam sebuah komunitas terdapat struktur dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu di dalamnya. Namun, beberapa individu terkadang tidak melaksanakan dengan baik muncul ketimpangan peran atau tugas dalam kepengurusan. Ketimpangan peran dalam menjalankan kinerja komunitas ini akan berdampak dominannya individu yang dianggap memiliki

keaktifan di komunitas selain itu, manfaat dari pelaksanaan kinerja yakni edukasi yang didapatkan tidak akan merata apabila peran atau tugas dalam komunitas tidak seimbang.

- b. Tantangan eksternal dari kinerja komunitas. Pertama, mengungkap isu yang terbilang sensitif karena sampai saat ini LGBTIQ masih menjadi perdebatan yang mengarahkan pada perlakuan buruk masyarakat terhadap kelompok LGBTIQ. Menurut Tom Boellstorff (dalam Atmoko, 2016) mengenai kehidupan queer di Indonesia mengatakan, toleransi masyarakat Indonesia mengenai keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ) hanya ada ketika individunya merahasiakan praktik-praktik homoseksual mereka tidak secara terbuka mengenai identitasnya sebagai homoseksual. Kalimat singkat pandangan Boellstorff ini mengartikan ketika kelompok LGBTIQ secara terbuka mengakui keberadaan dan terlebih melakukan gerakan memperjuangkan hak-hak kepada minoritas seksual dan gender toleransi yang diinginkan akan sulit dicapai. Hal ini disampaikan oleh AA Ketua Pelaksana Harian Rumah Pelangi Indonesia dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Tantangan komunitas LGBTIQ khususnya Rumah Pelangi Indonesia di Kota Semarang yakni isu LGBTIQ kan sensitif tataran masyarakat Indonesia masih pada taraf naif belum berfikir kritis bahwa LGBTIQ bukan seperti pandangan negatif selama ini. Walaupun, sudah banyak penafsiran ilmiah bahwa mereka bukan gangguan kejiwaan ada jurnal penelitian, rujukan rumah sakit dan pernyataan dari WHO tapi kenyataannya di Indonesia masih menganggap penyakit. Masih banyak orang yang bicara spontan mengenai LGBTIQ tidak mau mendekat karena takut tertular dan disukai sesama jenisnya.”(AA, 14 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara penelitian tersebut, pandangan masyarakat mengenai LGBTIQ sangat mempengaruhi kinerja komunitas pandangan buruk spontan dari masyarakat tidak hanya dilontarkan secara individu tetapi juga komunitas. Dalam menjalankan kinerja komunitasnya komunitas LGBTIQ seringkali

mendapatkan lontaran negatif yakni tempat berkumpulnya penyuka sesama jenis dan melakukan hubungan seksual menyimpang. Menurut R anggota Rumah Pelangi Indonesia mengatakan, masyarakat belum memahami visi dan misi komunitas kita memandang negatif tempat seks orang menyimpang padahal tujuan adanya komunitas ini menjadi ruang aman bagi kelompok LGBTIQ seluruh anggota dan pengurus mendapatkan edukasi, kesehatan dan keamanan dari tim advokasi sesuai kebutuhan. Pandangan masyarakat mengenai individu dan komunitas LGBTIQ masih sangat negatif seluruh pergerakannya dipandang sebelah mata padahal tujuan komunitas berdiri untuk melindungi kelompok LGBTIQ atas kesadarannya meningkatnya kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami.

Tantangan komunitas mewadahi kelompok LGBTIQ karena isunya dianggap mengacaukan stabilitas negara. Sejak awal tahun 2016 isu mengenai kelompok LGBTIQ di Indonesia menuai banyak kecaman dari banyak pihak komunitas yang memperjuangkan hak-hak mereka mengalami perlambatan atas kinerjanya (Wawancara dengan GR, 14 Februari 2021).

Pernyataan dan tindakan para pejabat, pemerintah, kelompok militan dan massa agama yang menyulut intoleransi kepada kelompok LGBTIQ pada tahun 2016 dimulai dari hal tersebut kecaman publik mulai menguat himbauan mengenai kriminalisasi, prasangka buruk dan penyembuhan terhadap minoritas seksual tersebut. Pada saat itulah para aktivis kelompok LGBTIQ menguatkan kinerjanya melindungi dan berkomitmen, namun pada saat itu pula masyarakat bersikap anti terhadap minoritas seksual ancaman tersebut mematikan pergerakan mereka. Suara lantang mengenai perjuangan kelompok LGBTIQ tidak sebanding dengan suara masyarakat yang menempatkan komunitas LGBTIQ sebagai musuh nomor satu di Indonesia.

Kedua, tantangan eksternal lain bagi komunitas yakni minimnya kebijakan struktural. Tantangan tersebut berdampak pada kurangnya sistem keamanan terhadap komunitas LGBTIQ membuat keberadaannya di tengah masyarakat sering mendapatkan ancaman pembubaran komunitas. Selain mendapatkan pandangan buruk yang dilontarkan secara spontan oleh masyarakat, keberadaan komunitas LGBTIQ yang mendirikan rumah singgah atau perkantoran tidak luput dari kekhawatiran pembubaran oleh masyarakat di sekitar lingkungannya. Hal ini diperjelas oleh GR dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Waktu itu dari komunitas dalam rangka pemberdayaan ekonomi anggota Rumah Pelangi Indonesia kami dari pengurus mendirikan warung mie ayam dan usaha laundry yang dikelola pengurus dan anggota. Ternyata tidak direspon dengan baik keberadaan warung mie ayam alasannya banyak transpuan makan disana membuat warga tidak nyaman padahal dari anggota kami tidak pernah berkelakuan buruk selama mendirikan usaha. Sampai suatu ketika pak lurah mendatangi kantor kami dan menyuruh usaha ditutup serta kantor disuruh pindah menurutnya kegiatan kami meresahkan warga banyak omongan tidak baik seperti, tempat penyimpangan seksual padahal disini kami sama sekali tidak melakukan hal tersebut kami melakukan rapat bakti sosial dan program kerja komunitas. Kenyataannya tidak direspon baik dan saat itu sempat melakukan pembelaan mana buktinya kalau kami melakukan hal tersebut, mereka tidak punya bukti katanya meresahkan warga gitu aja akhirnya kami mengalah saja daripada kedepan banyak masalah.”(GR, 14 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, keberadaan komunitas LGBTIQ di lingkungan masyarakat Kota Semarang belum direspon dengan baik. Pandangan negatif masyarakat mengenai individu LGBTIQ bahkan komunitas yang jelas memiliki landasan hukum akta kenotariatan untuk membuktikan kinerjanya pada pemerintah tetap tidak mendapatkan simpati dengan baik. Eksistensi komunitas ini dapat dibuktikan bagaimana keberadaan mereka diakui oleh masyarakat. Rumah Pelangi Indonesia memang tidak mendapatkan simpatik dari masyarakat pergerakan mereka

dapat dilihat di lingkungan masyarakat melalui kinerjanya walaupun, akhirnya tidak mendapatkan respon positif. Eksistensi bagaimana cara mereka berkembang, bertahan dan berani mengambil keputusan atas kinerjanya yang didukung oleh pengurus dan anggota komunitas.

Tantangan komunitas LGBTIQ di Kota Semarang yakni kekhawatiran adanya pengrebekan yang dilakukan oleh komunitas atau organisasi lain. Ancaman pengrebekan pernah dialami Rumah Pelangi Indonesia pada tahun 2016 mengadakan edukasi SOGIE-SC mendapat kecaman dari Forum Umat Islam Semarang (FUIS) (Wawancara dengan GR, 14 Februari 2021). Pemberlakuan ketika pengadaan kegiatan komunitas memberlakukan SOP keamanan dengan baik seperti, Rumah Pelangi Indonesia ketika melakukan kegiatan gathering dan pelatihan di hotel memperhatikan keamanan yang ketat tidak boleh mengupload foto selama kegiatan berlangsung dan melakukan kerjasama dengan keamanan hotel apabila terjadi perlakuan buruk yang tidak diinginkan. Komunitas LGBTIQ di Indonesia memang rentan terhadap ancaman pembubaran kegiatan dan pengusiran kantor kinerja masyarakat atau oknum yang kurang menyukai keberadaan LGBTIQ tidak segan bertindak anarkis tanpa memikirkan sebab dan akibatnya padahal kegiatan komunitas LGBTIQ tidak mengandung unsur buruk seperti, praktik penyimpangan seksual karena komunitas yang sudah memiliki akta kenotariatan memiliki kewajiban atas kinerjanya pada negara.

Tantangan komunitas atas minimnya kebijakan struktural menyebabkan mereka rentan mendapatkan ancaman pembubaran dan persekusi dari individu atau kelompok yang tidak menyukai keberadaannya komunitas LGBTIQ malah dituding balik atas orientasi seksualnya. Komunitas LGBTIQ mendapatkan tantangan dan hambatan, termasuk kekerasan, diskriminasi, pelanggaran hak

asasi manusia dan stigma yang dilontarkan secara spontanitas. Hanya sekedar melakukan pertemuan saja komunitas LGBTIQ dianggap membentuk homofobia sosial dan hal tersebut malah menghambat individu LGBTIQ mengakses pelayanan kesehatan karena takut mendapatkan ancaman sosial dari masyarakat. Banyak sekali individu LGBTIQ yang tidak tergabung dalam komunitas dan menghambat pengembangan kapasitas yang dimilikinya seperti, seseorang memiliki keterampilan lebih menjadi terhambat ketika dirinya menutup dirinya dari kehidupan sosial.

Banyak dari komunitas gay dan lesbian enggan mengakses pelayanan umum karena diskriminasi yang akan didapatkan selama proses berlangsung. Tantangan Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak LGBTIQ di Kota Semarang sangat tidak sebanding apabila aktivis di dalamnya mengadvokasi kelompok pertanian kecaman dan persekusi tidak akan datang bertubi-tubi. Maka dari itu, para aktivis LGBTIQ ini mendorong masyarakat terbuka terhadap keberagaman gender dan seksualitas sehingga tidak dipandang tabu yang akan menghambat individu minoritas ini dalam layanan sosial di masyarakat.

C. Implikasi Teoritik Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia

Lingkungan berperan dalam membentuk perilaku, karakter dan sifat seseorang maka dari itu, perannya sangat penting bagi kehidupan manusia yang semuanya dapat terbentuk menyesuaikan keadaan lingkungan dan individu di dalamnya. Seseorang akan membentuk kepribadian baik ketika berinteraksi dan membangun tujuan baik didukung keadaan lingkungannya. Komunitas menjadi tempat seseorang berinteraksi dengan orang lain mendapatkan pengetahuan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana lingkungan tersebut dapat membentuk perilaku dan kepribadian seseorang sesuai dengan tujuan berdirinya komunitas. Rumah Pelangi Indonesia berperan sebagai ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang

dengan kegiatan-kegiatan yang dibentuk bersifat mengedukasi dan mengarahkan anggotanya, sesuai dengan visi komunitas yakni menjalankan misinya.

Rumah Pelangi Indonesia mempunyai misi membangun inklusifitas bagi anggotanya dengan mengembangkan kapasitas dan memberikan arahan berupa memberdayakan kelompok LGBTIQ dalam kegiatan paralegal, media cetak, kesehatan, edukasi, kampanye dan sebagainya bertujuan memberikan semangat kepada anggota yang merasa lemah atas stigma melekat untuk dapat memaknai hidupnya mengembangkan kreativitas. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial karya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann membahas bagaimana usaha pengurus komunitas menyampaikan peran mereka sesuai dengan visi dan misi yang diusung. Dalam hal ini komunitas berperan subjektif antara pengurus dan pendiri menggapai citra tentang peran komunitas yang didukung pemaknaan yang didapatkan anggotanya. Proses konstruksi sosial ini merupakan pemaknaan bersama seluruh individu dalam komunitas yang telah disepakati. Pengalaman yang dimiliki individu satu dengan lainnya memiliki perbedaan sehingga proses pemaknaan akan bercampur dengan pengalaman anggota lainnya saling berinteraksi dan memandang nilai atau fenomena dari kejadian tersebut. Dengan melalui proses pemaknaan dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tiga tahapan yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial bagaimana usaha pengurus komunitas untuk menyampaikan peran sesuai visi dan misi di komunitas kepada anggotanya. Penelitian ini menekankan komunitas yakni Rumah Pelangi Indonesia sebagai subjek penelitian pengurus dan pendiri komunitas menggapai citra tentang peran mereka didukung pemaknaan anggotanya dalam tujuan mewujudkan ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Dalam menganalisis eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang perlu diketahui

bahwa usaha pengurus dan pendiri komunitas dalam mewujudkan visi dan misi komunitas yang dimaknai anggotanya dikategorikan dalam tiga tahapan konstruksi sosial sebagai berikut:

a. Eksternalisasi

Pada tahap eksternalisasi individu menjadi hasil (penyesuaian) dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Sebagaimana dalam hasil penelitian mengenai kehidupan kelompok LGBTIQ di lingkungan sosial tidak lepas dari perlakuan buruk atau tidak menguntungkan akibat stigma yang melekat menimbulkan perilaku spontanitas dari individu lain. Menjadi seorang transpuan dalam lingkungan pendidikan rentan mendapatkan diskriminasi, seperti dialami R semasa SMA saat berolahraga tidak boleh bergabung teman prianya dengan anggapan tidak mampu melakukan hal yang sama perlakuan tersebut tentu sangat menjatuhkan mental dan prestasi dimiliki anak sebetulnya mampu namun, dihalangi atas alasan perilakunya menyerupai perempuan (Wawancara dengan R, 23 Februari 2021). Tergabungnya kelompok LGBTIQ dalam komunitas diharapkan mendapat nilai positif dan perubahan menuju lebih baik dalam kehidupan sosialnya. Perbedaan gender dan seksualitas yang dialami kelompok LGBTIQ dengan heteronormativitas menyebabkan stigma negatif melekat dalam dirinya seperti, menyimpang seksual, kelainan jiwa, tidak bertuhan dan pergaulan bebas menjadikan seorang LGBTIQ merasa malu atas identitasnya dan cenderung mengurung diri karena takut tidak bisa diterima masyarakat sekitar.

Lingkungan sosial secara keseluruhan belum bisa menerima individu penyuka sesama jenis hal ini menyebabkan mereka belum bisa coming out dan kurang bisa berinteraksi dengan baik dengan individu lainnya. Seorang LGBTIQ ditempatkan secara eksklusif dilingkungannya sehingga membatasi interaksi sosialnya, mereka sulit mengekspresi diri dan mengemukakan pendapat ada kekhawatiran tidak diterima dan didengar dengan baik. Kondisi tersebut mengarahkan pada keterbatasan

seseorang untuk mengembangkan kapasitasnya. Kelompok LGBTIQ yang tergabung di komunitas harapannya dapat membantu pihak terpuruk bernasib sama untuk bangkit melawan stigma memberikan pemahaman mengenai *coming in* dan *coming out* mengenai penerimaan jadi dirinya. Rumah Pelangi Indonesia memperkenalkan dirinya mewadahi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang untuk memperjuangkan hak-hak dasar melalui visi dan misi yang telah dibangun. Dalam proses eksternalisasi pengurus dan anggota tergabung beradaptasi dengan lingkungannya melalui bahasa dan tindakan. Proses adaptasi antara pengurus dan anggota beradaptasi dengan kegiatan komunitas bertujuan saling mengenal dan mengkrabkan dengan berinteraksi secara langsung. Penelitian ini telah memaparkan tujuan individu LGBTIQ tergabung dalam komunitas yakni rasa aman, interaksi sosial, dukungan dan mencapai tujuan bersama.

Dalam tahap eksternalisasi individu secara sadar tergabung di komunitas, pengurus menyampaikan tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan anggotanya seperti, menambah wawasan, memberdayakan, melawan stigma dan memberikan ruang aman bagi anggotanya. Hal ini disampaikan kepada anggota ketika melakukan kegiatan bersama untuk membangun citra komunitas sebagai wadah edukasi. Adaptasi kelompok LGBTIQ dalam komunitas merupakan sebuah proses eksternalisasi dimana seseorang mencurahkan dan mengekspresikan dirinya. Dengan tergabung individu LGBTIQ dalam komunitas menjadi cara mereka berinteraksi satu sama lain sehingga tidak terpuruk terhadap stigma saling menguatkan kondisi senasib yang dialami. Sehingga proses eksternalisasi merupakan usaha seseorang LGBTIQ mencurahkan dan mengekspresikan diri kepada lingkungan sekitar melalui tergabungnya dalam komunitas dengan tujuan mendapatkan manfaat positif, mengembangkan kapasitas diri dan tidak terpuruk mampu mengambil peran di masyarakat.

b. Objektivasi

Proses konstruksi sosial objektivasi ialah hasil yang telah dicapai dari kegiatan mental maupun fisik pada tahap eksternalisasi. Hasil dari tahap sebelumnya berupa realitas objektif suatu aktivitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia hadir dalam wujud nyata sehingga menyebabkan perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh individu dalam kelompok. Keseluruhan tatanan kelembagaan harus dimengerti oleh seluruh anggotanya dalam proses kelembagaan yang berbeda. Kemampuan manusia dalam mengekspresikan dirinya mampu menghasilkan objektivasi. Objektivasi dalam tahap ini kesan apa yang ingin disampaikan kepada anggota komunitas sebagai wadah kelompok LGBTIQ dengan memberikan edukasi terarah ketika bermasyarakat anggota dapat berperan dengan baik, sehingga keberadaan mereka sebagai minoritas seksual tidak mengganggu aktivitas dan tujuan anggota dalam mengembangkan kreativitas di kehidupan berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat ketika anggota tergabung dalam komunitas seperti yang disampaikan narasumber R pada wawancara penelitian mengatakan bahwa dirinya dan anggota lain menjadi tahu mengenai pendokumentasian kasus, sehingga ketika kelompok LGBTIQ di dalam maupun di luar komunitas mengalami perlakuan buruk di lingkungan sosial dapat menuliskan kronologi kasus terlebih dahulu untuk memudahkan proses pencatatan kronologi tim advokasi komunitas (Wawancara dengan R, 23 Februari 2021).

Rumah Pelangi Indonesia berdiri memberikan kemudahan pelayanan seperti, akses kesehatan individu LGBTIQ selain bisa mengakses layanan kesehatan bersama anggota lainnya mereka juga mendapatkan edukasi kesehatan mengenai HIV/AIDS pentingnya pemahaman mengenai penyakit menular tersebut bagaimana cara mencegah dan mengobati apabila sudah terdeteksi positif komunitas akan memberikan dukungan serta saran proses penyembuhan dengan berjejaring bersama PKBI Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota

Semarang. Mendapatkan pengetahuan SOGIE-SC tentang keberagaman gender dan seksualitas manusia yang dirangkai dalam acara gathering berguna mengakrabkan anggota satu sama lain memberikan penguatan diri kepada anggota mengenai *coming in* penerimaan atas identitas yang membuat seorang LGBTIQ tidak terpuruk ketika ingin bersosialisasi di lingkungan terlebih apabila individu ingin *coming out* mengenai identitasnya akan lebih percaya diri dalam melangkah namun, tindakan tersebut sangat beresiko terhadap kenyamanan. Maka dari itu, komunitas tidak pernah memaksakan anggota untuk melakukan *coming out* kepada masyarakat.

Kegiatan edukasi rutin perbulan dilakukan komunitas dalam rangka mengembangkan kapasitas dan melatih keterampilan seperti, pelatihan *leadership*, pelatihan media cetak, edukasi keberagaman gender dan seksual dengan sudut pandang agama, hukum maupun peningkatan kasus kekerasan yang dialami kelompok LGBTIQ di Indonesia serta memberikan ruang antar anggota untuk saling bertukar pikiran dan informasi mengenai pekerjaan, pemecahan masalah dan saling menguatkan satu sama lain. Dalam rangkaian kegiatan diikuti anggota, pengurus menyampaikan manfaat dari apa yang diikuti memberikan kemudahan kepada anggota untuk mendapatkan arahan ketika mengalami diskriminasi dan kekerasan serta mengikuti edukasi yang berguna mengembangkan kapasitas diri sehingga sosialisasi dimasyarakat tidak terhenti dan dipandang berdaya memiliki nilai positif atas kemampuan yang dimiliki terlebih apabila hal tersebut tidak dimiliki individu lainnya. Hal ini disampaikan oleh R selaku anggota Rumah Pelangi Indonesia dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Manfaat yang didapatkan ketika bergabung dalam komunitas banyak teman senasib, mendapatkan konseling dan edukasi kesehatan, keberagaman gender dan seksualitas dikenalkan dengan jaringan sosial seperti, LBH Semarang yang turut membantu advokasi kasus. Interaksi sosial yang baik saling menguatkan dan mendorong semangat teman-teman RPI untuk bangkit melakukan hal positif sehingga stigma dan diskriminasi

dialami serta keluarga yang menolak pasti lama-kelamaan akan menerima kondisi kita.”(R, 23 Februari 2021)

Keikutsertaan anggota dalam seluruh kegiatan komunitas menandakan mereka menjadi bagian penting untuk membangun kinerja komunitas lebih baik, tidak hanya diberikan pelatihan dan edukasi anggota juga ikut serta dalam kampanye memperjuangkan hak-hak dasar mereka yang dihalangi. Mereka mengaku bahwa komunitas memberikan peran positif dengan edukasi, pelayanan dan pelatihan yang diberikan untuk anggota dalam mengembangkan kapasitas diri. Sehingga pada tahap objektivasi ini, para anggota Rumah Pelangi Indonesia mewujudkan keanggotaannya dalam bentuk fisik maupun mental menjadi bagian dari komunitas mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan pengurus dan memiliki rasa yang sama antar anggota sebagai wadah mengedukasi dan lebih memaknai hidupnya. Rumah Pelangi Indonesia memberikan ruang aman bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang untuk memberikan dampak positif sesuai visi dan misi mencapai inklusifitas sehingga tidak dipandang eksklusif oleh masyarakat dengan memberdayakan, mendorong anggota bertahan melawan stigma dan memaknai hidupnya serta aktif melakukan kajian menciptakan nalar kritis untuk mengembangkan kapasitas.

c. Internalisasi

Merupakan proses dimana manusia menjadi hasil dari masyarakat proses terjadinya internalisasi pada suatu lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu tersebut menjadi anggota. Terjadinya proses pemahaman secara subjektif orang lain agar memiliki makna bagi kita. Dalam proses internalisasi terjadi melalui dua cara sosialisasi yakni sosialisasi primer lingkup keluarga dan sosialisasi sekunder diperankan oleh organisasi sosial atau komunitas dimana individu menjadi anggotanya untuk peran Rumah Pelangi Indonesia membentuk karakter positif dan memberikan semangat mengembangkan kapasitas.

Melalui kegiatan *gathering* dan webinar diadakan oleh Rumah Pelangi Indonesia yang mengusung tema kekerasan dan diskriminasi dialami kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilakukan secara online maupun offline, hal tersebut menyesuaikan pada masa pandemi dimana tidak semua kegiatan bisa dilakukan secara langsung edukasi tetap bisa diadakan melalui online semua peserta kegiatan webinar tidak hanya dari keanggotaan saja melainkan umum. Sedangkan, kegiatan *gathering* diadakan secara offline diikuti seluruh pengurus dan anggota internal komunitas biasanya membahas mengenai monitoring kasus yang dialami anggota, pelatihan paralegal menghadapi kasus dan pendokumentasiannya, persiapan kampanye, pembahasan bakti sosial, edukasi SOGIE-SC, konseling kasus serta kesehatan reproduksi HIV/AIDS. Berikut beberapa kegiatan Rumah Pelangi Indonesia dalam mewujudkan visi misi menjadi ruang aman dan menciptakan inklusifitas bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang secara online maupun offline:

Gambar 5.6

Gathering Rumah Pelangi Indonesia



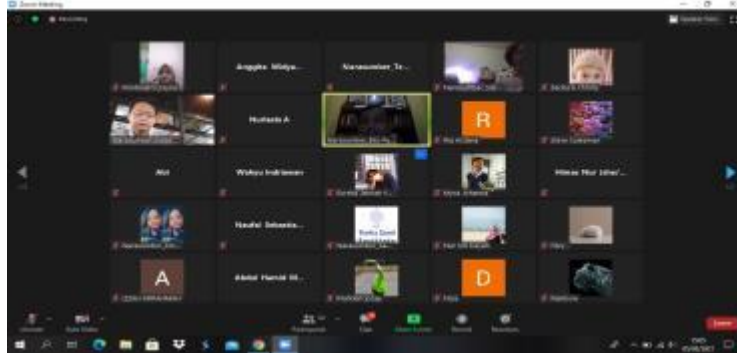
Sumber : Akun Instagram @rumahpelangiindonesia.official

Kegiatan *gathering* diskusi waroeng HAM dengan mengusung tema minoritas seksual dan permasalahan hukumnya. Pada kajian tersebut menjelaskan permasalahan yang dialami minoritas seksual di Kota Semarang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan saat berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun ketika mengakses pelayanan umum.

Penjelasan utama dalam kegiatan tersebut bagaimana kelompok LGBTIQ dalam menghadapi perlakuan buruk yang sewaktu dapat diterima saat di lingkungan sosial, Rumah Pelangi Indonesia menjelaskan betapa sulitnya mengakses pelayanan hukum oleh minoritas seksual selalu dibenturkan dengan stigma negatif yang menghambat tim advokasi dalam membantu anggota pada proses penanganan kasus. Pada tahap internalisasi seorang individu berupaya mengambil peran dalam komunitas, seperti yang kita ketahui setiap komunitas tentu memiliki struktur kepengurusan terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, Divisi Pengorganisasian, Divisi Pendokumentasian Kasus, Divisi Media dan Kampanye Kreatif dengan adanya struktur di sebuah komunitas, maka seluruh anggota akan bergabung dengan komunitas mengambil peran dalam divisi yang memiliki fungsi untuk mengurus dan menyiapkan segala keperluan mendukung kegiatan komunitas. Seperti Divisi Pengorganisasian LGBTIQ, ketika anggota tergabung dalam divisi tersebut mempunyai peran mempersiapkan kegiatan berguna pengembangan kapasitas internal pengadaan edukasi, melakukan koordinasi dengan tim pendokumentasian kasus apabila ada anggota ingin mengakses layanan dan mempersiapkan kegiatan konseling anggota. Kemudian dalam tahap internalisasi tidak hanya peran yang sesuai dengan struktur kepengurusan, tetapi pengurus memiliki pengalaman lebih banyak saling bertukar pendapat dan berbagi informasi dengan anggota lainnya. Seperti kegiatan yang didapatkan anggota komunitas melalui online edukasi gender dan seksual perspektif agama dengan mengundang empat tokoh keagamaan yakni Hindhu, Budha, Kekristenan dan Islam.

Gambar 6.6

Kegiatan Webinar Ragam Gender dan Seksual dalam Perspektif Agama



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

Dengan adanya struktur kepengurusan dalam komunitas keterlibatan anggota menjadi maksimal seluruh kegiatan berjalan sesuai keinginan melalui kontribusi dan kerjasama individu di dalamnya. Seluruh individu dalam komunitas memiliki hak yang sama mendapatkan edukasi, mengemukakan pendapat dan menjadi pemateri ketika kegiatan berlangsung semuanya mengalir dimana individu dipandang memiliki potensi positif dan berdaya pengalaman maupun pengetahuan lebih dimiliki oleh anggota boleh dibagikan satu sama lain (Wawancara dengan R, 23 Februari 2021). Dengan interaksi antara pengurus dan anggota yang berbeda wawasan dan pengalaman, akan saling mengarahkan dan membantu anggota lainnya dalam mengembangkan kapasitas. Selain itu dilihat dari visi utama Rumah Pelangi Indonesia yakni “Terciptanya masyarakat yang inklusif di Indonesia dan menjunjung tinggi keberagaman gender dan seksualitas”, mengandung makna komunitas mewadahi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang menciptakan ruang inklusif dan aman bagi individu dengan kondisi minoritas gender dan seksual.

Perbedaan latar belakang anggota dan pengurus dalam komunitas memudahkan berbagi pengetahuan dan pengalaman satu sama lain. Rumah Pelangi Indonesia membuka ruang selebar-lebarnya khususnya kepada kelompok LGBTIQ tergabung dalam komunitas untuk mewujudkan ruang

aman dan pengembangan kapasitas sehingga mereka berdaya dan berperan positif tidak larut dalam pandangan negatif yang memperpuruk keadaannya di lingkungan sosial. Dimana ketika individu bertemu dengan lingkungan dan individu lain dalam komunitas yang positif, maka akan mendorong tumbuhnya perilaku positif anggota untuk memaksimalkan potensinya dalam mengembangkan kapasitas. Tahap internalisasi digunakan pengurus agar anggotanya dapat mengambil peran yang layak di masyarakat dengan mengubah pandangan negatif mengenai kelompok minoritas gender dan seksual membuka pemikiran yang lebih luas bahwa keberadaan komunitas LGBTIQ tidak berkonotasi negatif melainkan tempat bagi mereka mendapatkan ruang aman atas kekerasan dan diskriminasi yang dialami serta menciptakan inklusifitas melalui pengembangan kapasitas. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial diketahui bagaimana usaha pengurus komunitas dalam menyampaikan peran sesuai visi dan misi kepada anggotanya untuk menciptakan ruang aman dan inklusifitas.

Eksistensi penting bagi keberlangsungan kinerja komunitas dan diakuiinya keberadaan mereka. Bagaimana strategi mereka dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat hal terpenting dalam eksistensi komunitas adalah dukungan anggota komunitas. Usaha pengurus Rumah Pelangi Indonesia dalam mewujudkan peran sesuai visi dan misi yang didukung pemaknaan oleh anggotanya keterlibatan dan pengembangan potensi individu seorang LGBTIQ di Kota Semarang. Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dilakukan dengan perannya memberikan edukasi dan fasilitas serta melakukan kampanye dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Semarang. Rumah Pelangi Indonesia cukup diakui keberadaannya oleh jaringan sosial dan komunitas di Kota Semarang begitupula dengan

masyarakatnya, namun hal tersebut tentu tidak menjadikan seluruh peranya dimaknai positif oleh lingkungan sosial terutama yang menolak keberadaanya mereka masih saja dipandang negatif dalam tantangan komunitas untuk memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang.

Tabel 2.6

No	Teori	Implikasi	Keterangan
1.	Terbentuknya Komunitas: Hadirnya komunitas menjadi ruang individu dalam beraspirasi dan mengambil peran positif di dalamnya.	Dalam penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwa Rumah Pelangi Indonesia terbentuk oleh keadaan kelompok LGBTIQ rentan, membutuhkan jembatan serta perlindungan yang akan didapatkan bila membentuk komunitas dan berjejaring sosial.	Terbentuknya komunitas didasari oleh setiap individu menginginkan rasa aman, tujuan, interaksi dan afiliasi serta dukungan satu sama lain. Oleh karena itu, terbentuknya komunitas LGBTIQ yakni Rumah Pelangi Indonesia wadah bagi minoritas seksual di Kota Semarang mendapatkan pelayanan, dukungan dan mengembangkan

			kapasitas.
2.	<p>Identitas:</p> <p>Pengetahuan yang didapatkan individu dalam sebuah komunitas akan menciptakan dampak emosional dan menjadi kesepakatan bersama untuk membangun kinerja komunitas.</p>	<p>Menganalisis data di lapangan terkait dengan identitas yang digunakan Rumah Pelangi Indonesia adalah mereka menggunakan istilah ruang aman. Mengambil identitas tersebut agar tercipta ruang yang menjunjung tinggi dan menghargai keberagaman gender dan seksualitas.</p>	<p>Selain itu, ruang aman sebagai tempat kelompok LGBTIQ tidak hanya mendapatkan perlindungan saja, tetapi dukungan, pelayanan dan mengembangkan kapasitas.</p>
3.	<p>Peran Komunitas:</p> <p>Komunitas memiliki peran bagi anggotanya sebagai sarana edukasi dan ruang nyaman untuk memberdayakan kelompok LGBTIQ di kehidupan sehari-harinya.</p>	<p>Pada teori ini membuktikan bahwa Rumah Pelangi Indonesia membuktikan perannya melalui edukasi paralegal, konseling kesehatan, edukasi SOGIE-SC, pelatihan media dan pelatihan <i>leadership</i>.</p>	<p>Bentuk peran komunitas didukung oleh pemaknaan anggotanya melalui keterlibatan dalam seluruh kegiatan yang dilakukan komunitas dan mengidentifikasi diri menjadi bagian dari komunitas.</p>

4.	<p>Strategi Komunitas: Rumah Pelangi Indonesia memiliki strategi yang digunakan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak kelompok LGBTIQ di Kota Semarang terutama korban diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC.</p>	<p>Dalam penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwa di dalam Rumah Pelangi Indonesia strategi advokasi dilakukan mengkonstruksi keterlibatan anggota sebagai pekerja sosial membantu kelompok LGBTIQ yang mendapatkan perlakuan buruk di masyarakat.</p>	<p>Sebagai pekerja sosial, anggota Rumah Pelangi Indonesia terlibat dalam advokasi mikro tergolong dalam eksternalisasi wujud anggota mencurahkan dan mengekspresikan diri sebagai manajemen kasus, advokasi makro melalui objektivasi anggota bekerja sama dengan jaringan sosial terlibat langsung untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi lanjutan berposisi sebagai mediator. Sedangkan, advokasi meso anggota RPI menginternalisasi diri melalui aksi sosial dalam masyarakat mengubah cara pandang masyarakat negatif</p>
----	--	---	--

			mengenai LGBTIQ.
5.	Konstruksi Sosial: peran komunitas merupakan bagian dari perjuangan individu di dalamnya untuk menunjukkan eksistensi mereka yang menjadi bagian dari konstruksi manusia.	Menganalisis data di lapangan menggunakan teori ini bahwa membentuk peran dimaknai anggotanya pada Rumah Pelangi Indonesia melalui tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Setiap proses pembentukannya berbeda-beda tergantung latar belakang, komitmen dan dukungan individu dalam komunitas. Sehingga setiap individu pada proses internalisasi mengidentifikasi diri menjadi bagian dari komunitas mengikuti peran dan ajaran komunitas yang bermaknai positif baginya serta	Dari ketiga proses konstruksi terbentuklah sebuah peran yang sesuai dengan visi dan misi komunitas yang dibangun bersama sebagai ruang aman dan nyaman kelompok LGBTIQ di Kota Semarang untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengembangkan kapasitas dirinya. Namun, peran yang sesuai tersebut nyatanya tidak mengubah kenyataan di masyarakat bahwa kelompok LGBTIQ sebagai individu menyimpang dengan segala stigma negatif yang dimiliki.

		<p>menginternalisasi diri</p> <p>dalam masyarakat</p> <p>melalui aksi sosial</p> <p>mengubah cara pandang</p> <p>masyarakat.</p>	
--	--	--	--

Sumber: olahan data primer dan data sekunder

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengolahan data lapangan yang telah dilakukan oleh penulis pada Rumah Pelangi Indonesia mengenai eksistensi komunitas LGBTIQ dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Maka dapat diperoleh kesimpulan dari rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kelompok LGBTIQ rentan terhadap perlakuan diskriminatif, represif dan kekerasan di lingkungan sosial, pendidikan dan pekerjaan. Pandangan buruk mengenai orientasi seksual mereka membuat tidak bisa diterima dalam lingkungan sepenuhnya, alasan masyarakat masih menolak keberadaan LGBTIQ yakni perilaku penyuka sesama jenis dilarang oleh agama/Tuhan, kebiasaan buruk seseorang yang tidak bisa mengubah gaya hidup, masyarakat belum semuanya memahami keberagaman gender dan seksualitas dan kelompok LGBTIQ cenderung menutup identitasnya karena alasan keluarga atau rasa malu yang nantinya dihadapi. Tidak semua LGBTIQ terbuka mengenai identitasnya kepada khalayak umum, seseorang akan cenderung melihat apakah lingkungannya tersebut kondusif menerima keberadaannya atau tidak.

Lingkungan pendidikan dan pekerjaan belum sepenuhnya menerima kelompok LGBTIQ kekhawatiran perilakunya mengganggu individu lain menjadikan mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti pengurangan jam perkuliahan, dikeluarkan dari kampus dan pemecatan kerja. Diskriminasi sangat kentara dialami kelompok trans untuk mengakses pekerjaan formal sulit bagi mereka atas perbedaan jenis kelamin dan ekspresinya menyebabkan masyarakat belum bisa menerima kondisi tersebut. Adanya hegemoni masyarakat mengenai ekspresi maskulin identik dengan jenis kelamin laki-laki dan feminin dengan jenis

kelamin perempuan apabila ekspresi dan jenis kelamin tidak sesuai dianggap tidak normal, sehingga menghasilkan ketidaksengajaan yang dilakukan berupa cacian kepada LGBTIQ dengan unsur spontanitas. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa individu membentuk komunitas LGBTIQ tidak lain sebagai jembatan bagi minoritas seksual mendapatkan hak layak seperti akses pelayanan umum dan memperjuangkan keadilan atas perlakuan buruk yang diterima. Berawal dari Komunitas Sobat Semarang memperlebar kinerja dan wilayahnya mengubah nama Rumah Pelangi Indonesia yakni wadah bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Atas perlakuan buruk dan keterbatasan LGBTIQ di lingkungan sosial identitas yang diusung dalam Rumah Pelangi Indonesia yakni menciptakan ruang aman dan inklusif bagi minoritas seksual dan gender di Kota Semarang. Tindakan positif dalam komunitas sebagai simbol berupa modal untuk mempertegas identitasnya guna mengembangkan kapasitas anggotanya.

2. Rumah Pelangi Indonesia memiliki peran penting dalam mewadahi anggotanya untuk mewujudkan inklusifitas dan ruang nyaman menghargai keberagaman gender seksualitas. Dengan melihat kondisi minoritas seksual dan gender di Kota Semarang kerap mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dalam sajian data penelitian setiap tahunnya maka dari itu, komunitas berdiri mewadahi individu tersebut atas perlakuan buruk yang diterima menyebabkan seseorang menutup diri dari lingkungan sosial. Padahal interaksi sosial sangat diperlukan bagi manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya komunitas LGBTIQ di Kota Semarang harapanya dapat merangkul individu yang masih terpuruk dengan kondisinya untuk bisa bangkit melawan stigma dan berdaya di lingkungan sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan yang bertujuan mengembangkan kapasitas anggota seperti, edukasi SOGIE-SC, paralegal, kesehatan reproduksi HIV/AIDS, pelatihan media cetak, leadership, kampanye, gathering bulanan dan mengikutsertakan anggota tergabung dalam kegiatan

nasional bersama federasi arus pelangi Indonesia. Adanya komunitas LGBTIQ dapat merangkul individu bernasib sama untuk saling menguatkan dan menunjukkan peran positif di lingkungan sosial.

3. Dalam rangka memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ di Kota Semarang, Rumah Pelangi Indonesia membentuk strategi advokasi sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota maupun individu di luar komunitas yang mendapatkan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekitar. Rumah Pelangi Indonesia menggunakan tiga tahapan strategi advokasi yaitu aras mikro, meso dan makro. Pertama, mikro pekerja sosial atau tim pengadvokasian berperan sebagai broker menghubungkan klien dengan sumber pelayanan sekitar. Kedua, meso pekerja sosial atau tim pengadvokasian berperan sebagai pendamping mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi agar tidak berkelanjutan dan meningkat setiap tahunnya. Ketiga, makro perjuangan menuntut keadilan dengan mewujudkan kebijakan publik bertujuan memperjuangkan hak-hak LGBTIQ seperti, kampanye masyarakat dan kebijakan pemerintah yang dinilai memarginalkan kelompok minoritas seksual dan gender di Kota Semarang.

Terdapat kecocokan antara pembahasan eksistensi Rumah Pelangi Indonesia bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengenai peran komunitas memperjuangkan hak-hak dasar. Pertama, eksternalisasi kelompok LGBTIQ secara sadar tergabung dalam komunitas melakukan adaptasi yang menjadi usaha pengembangan kapasitas dirinya. Kedua, objektivasi kelompok LGBTIQ telah menjadi anggota dalam komunitas mengikuti semua kegiatan pengurus berperan menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan memberdayakan, mendorong anggota bertahan melawan stigma dan memaknai hidupnya serta aktif melakukan kajian menciptakan nalar kritis. Ketiga, internalisasi dimana anggota komunitas mengidentifikasi dirinya mengambil peran dalam seluruh kegiatan dan mewujudkan kinerja dengan baik. Dalam proses tersebut komunitas

berupaya menginternalisasikan diri di masyarakat melalui aksi sosial berupa, kampanye, bakti sosial dan bantuan dana untuk kelompok LGBTIQ rentan sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan membuat kesadaran masyarakat mengenai kelompok LGBTIQ di lingkungan sosial rentan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi yang minim perlindungan, atas perlakuan buruk dialami sebagai warga negara mereka patut mendapatkan hak dan kewajiban sama tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Walaupun, komunitas LGBTIQ yakni Rumah Pelangi Indonesia telah menunjukkan peran sesuai dengan visi dan misinya, eksistensi mereka ternyata tidak menjadikan seluruh peranya dimaknai positif oleh lingkungan sosial terutama yang menolak keberadaanya. Mereka masih saja dipandang negatif tempat melakukan hubungan seks sesama jenis serta tantangan lain yang melingkupi kinerja komunitas.

Atas permasalahan internal komunitas yang dialami pada akhir tahun 2019 yakni kekerasan seksual dan korupsi dilakukan oleh program manager Rumah Pelangi Indonesia tahun 2015-2019. Pada tanggal 28, Maret 2021 Rumah Pelangi Indonesia mengadakan musyawarah pengurus dan anggota hasil dari pertemuan ini komunitas akan melakukan regenerasi yang bertujuan mengubah kondisi kedepan lebih baik. Atas perlakuan buruk yang dilakukan seseorang yang berposisi sebagai pemimpin komunitas berdampak buruk kepada pandangan jaringan sosial terhadap Rumah Pelangi Indonesia mengakibatkan berkurangnya kepercayaan pihak lain dalam menyumbang pendanaan untuk komunitas. Kekerasan seksual dan korupsi yang dilakukan pengurus inti tersebut sangat bertentangan dengan identitas Rumah Pelangi Indonesia yakni sebagai ruang aman bagi kelompok LGBTIQ korban kekerasan seksual dan diskriminasi di Semarang. Hal tersebut, sangat disayangkan karena pengurus inti komunitas menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Kondisi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Rumah Pelangi Indonesia dalam proses regenerasi dan komunitas lain dalam membangun kinerjanya.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis akan memberikan beberapa kritik dan saran yang semoga dapat bermanfaat kepada pihak terkait :

1. Kritik

a. Bagi Rumah Pelangi Indonesia

Kurangnya kajian dan kegiatan mengenai keberagaman gender dan seksualitas menjadi salah satu faktor masyarakat masih menaruh stigma negatif mengenai komunitas LGBTIQ. Menurut penulis setelah dilakukan penelitian dalam komunitas, memang seluruh kinerja dan kegiatan telah berjalan sesuai keinginan. Namun, individu dalam struktur kepengurusan tidak semua terlibat aktif hanya beberapa individu yang sering tampil berinteraksi dengan komunitas maupun lembaga lain dalam kegiatan di luar komunitas. Hal ini sangat disayangkan akan ada ketimpangan tidak hanya peran tetapi *output* mengenai informasi dan wawasan pengetahuan didapatkan. Permasalahan internal yang dialami Rumah Pelangi Indonesia saat ini seharusnya dapat menjadi pembelajaran kedepan bahwa identitas harus selaras dengan perilaku individu di dalamnya. Jangan sampai komunitas sebagai ruang aman kekerasan dan diskriminasi, tetapi pengurus di dalamnya menjadi pelaku dari tindakan buruk tersebut.

b. Bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang

Menjadi kelompok LGBTIQ tidaklah mudah, tentu disertai alasan berbeda masing-masing individu. Maka dari itu, keputusan yang diambil dengan matang-matang ini seharusnya tidak menjadikan seseorang terpuruk ada resiko dari setiap tindakan yang diambil jangan sampai keputusan tersebut malah berdampak buruk terhadap interaksi sosial karena manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menutup diri terhadap lingkungan sosial akan membuat hidupmu semakin dipandang sebelah mata oleh orang

lain sejatinya manusia membutuhkan eksistensi dimana dia diakui dalam kehidupan sosial yang bisa ditunjukkan dengan melalui hal-hal positif dan peran baik di masyarakat.

c. Bagi masyarakat luas

Sebagian besar masyarakat di Kota Semarang masih menolak dan tidak mengakui keberadaan individu maupun komunitas LGBTIQ di Kota Semarang dengan stigma negatif yang melekat dicap sebagai makhluk mengkhianati Tuhan/Agama, individu kelainan jiwa, salah dalam bergaul di lingkungan, penyuka sesama jenis yang perlu dihindari di masyarakat dan pandangan buruk mengenai komunitas sebagai tempat melakukan penyimpangan seksual. Padahal tidak semua stigma tersebut sesuai dengan kenyataan, individu LGBTIQ sama seperti makhluk lain taat kepada Tuhan-Nya karena semua ibadah manusia hanya tuhan yang tahu manusia tidak boleh berburuk sangka. Telah ada publikasi dan artikel yang menjelaskan bahwa LGBTIQ bukan individu kelainan jiwa dan komunitas mewadahi kelompok LGBTIQ sebenarnya banyak sisi positif bisa dilihat, seperti mereka mewadahi kelompok minoritas yang cenderung mengurung diri atas kondisinya sehingga terpuruk dan sulit mengembangkan keterampilan atas kekhawatiran tidak diterima di lingkungan sosial. Komunitas LGBTIQ berupaya memberikan wadah bagi anggotanya agar tidak lagi dipandang eksklusif memudahkan mengembangkan kapasitas dengan memberikan beberapa kegiatan, seperti edukasi, pelayanan dan keterampilan bagi anggotanya.

2. Saran

a. Bagi Rumah Pelangi Indonesia

Selain memberikan edukasi terhadap anggota Rumah Pelangi Indonesia seharusnya lebih sering mengadakan kegiatan yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum seperti, menekan pengurangan penderita HIV/AIDS. Hal ini dimaksud agar masyarakat mengetahui peran positif yang dilakukan oleh komunitas serta harapan kedepan

mengajak lembaga maupun komunitas lain di Kota Semarang untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan mempermudah kinerja dan keaktifan komunitas. Bagi anggota dan pengurus komunitas harus saling menguatkan kerja sama dan komitmen sehingga keberlangsungan kinerja dan eksistensi mereka dapat diterima dengan baik di lingkungan sekitar. Dalam rangka membangun regenerasi komunitas harapannya pengurus dan anggota dapat menjadikan permasalahan yang dihadapi sebelumnya sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun komunitas yang lebih baik kedepan.

b. Bagi kelompok LGBTIQ di Kota Semarang

Dengan kondisi dan pilihan terkait orientasi seksual jangan sampai menjadikan terbatasnya kemampuan dimiliki karena semua manusia berhak dalam mengembangkan kreativitas tunjukkan kepada masyarakat peran dan hal-hal positif yang dimiliki dibalik hal negatif dilakukan. Terpuruknya kondisi hanya akan membuatmu dipandang sebelah mata oleh masyarakat maka dari itu, tunjukkan semua capaian yang bisa dilakukan.

c. Bagi masyarakat luas

Manusia dalam kehidupan selalu membutuhkan manusia lain maka dari itu, janganlah berprasangka buruk dan bersikap tidak adil kepada individu dan komunitas LGBTIQ kita tidak tahu kapan dan bagaimana individu yang kita benci ternyata membantu kita saat membutuhkan pertolongan. Mereka minoritas seksual dan gender sama seperti manusia lain memiliki hak dan kewajiban di lingkungan sosial, diharapkan masyarakat tidak menghalangi interaksi dan pengembangan kapasitas seseorang dengan alasan perbedaan yang dimiliki. Jangan sampai kita menjadi pelaku dari kekerasan dan diskriminasi terhadap saudara sendiri karena hidup damai jauh lebih nyaman bukan berarti kita mendukung tetapi, menghargai hak orang lain saja sudah cukup untuk membuat kelompok rentan berdaya dan memaknai hidupnya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Basari Hasan. (1990). Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli Peter L. Berger dan Thomas Luckmann: *The Social Construction of Reality*). Jakarta: LP3ES.
- Boellstorff Tom. (2005). *The Gay Archipelago* . Princeton: Princeton University Press.
- Bungin Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davies Sharyn Graham . (2018). Keberagaman Gender di Indonesia. Dalam Murray A.J (ed.), *Let Them Take Ecstasy: Class and Jakarta Lesbian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perlindungan HAM . (2006). *Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Nanggroe Aceh Darussalam : Equitas-International Centre for Human Rights Education.
- Dubois Brenda, & Miley Karla Krogsrud. (2005). *Social Work An Empowering Profession*. USA: Pearson.
- Galink. (2013). *Seksualitas Rasa Rainbow Cake: Memahami Keberagaman Orientasi Seksual Manusia*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.
- Gayatri BJD. (2015). Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) di Nusantara. Jakarta: Jurnal Perempuan 87.

- Genia Kadek. (2019). Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM. Jakarta: Laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).
- Henig Robin Marantz. (2017). Ekspresi Gender Edisi Khusus National Geographic Indonesia. Jakarta: Jacob Oetama.
- Jamson Ulya Niami E. (2016). Transformasi Strategi Gerakan Waria Yogyakarta: Politik Retribusi dan Politik Rekognisi Untuk Keadilan Sosial. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Madrim Sasmito. (2019). LBH Masyarakat Menentang Pemecatan Polisi Gay. VOA Indonesia.
- Moleong Lexy. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Muhammad Kyai Husein, Mulia Siti Musdah, & Wahid Marzuki. (2011). Fiqih Seksualitas . Jakarta: PKBI.
- Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyana D. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Muthmainnah Yulianti. (2015). Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Subagyo Djoko. (1991). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). Motode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Suharto E. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri. Bandung: Alfabeta.

- Susan Novri. (2009). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yolandasari Ayu Regina. (2015). Penyebab atau Penyembuh ? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual dan Transgender Female-to-Male di Indonesia. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Zakiah Naila Rizqi. (2017). Bahaya Akut Persekusi LGBT. Jakarta: LBH Masyarakat.

Sumber Jurnal dan Skripsi :

- Andina Elga. (2016). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol.7 No.2 , 30.
- Ardiyantika Sulistyari. (2016). Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di Sapda. INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 2, 180-220.
- Jamson Ulya Niami E. (2016). Transformasi Strategi Gerakan Waria Yogyakarta: Politik Retribusi dan Politik Rekognisi Untuk Keadilan Sosial. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Kartikaningdryani Inestya. (2016). Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma . Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6 No.2, 191.

- Laud Hendra Fajar Dani, Bauto La Ode Monto, & Roslan Suharty. (2019). Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Kota Kendari. *Jurnal Neo Societal* Vol. 4, No. 4, 992-999.
- Lestari Yeni Sri. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Community Volume*. 4, Nomor 1, 67.
- Nurcahya Dewi Sapta. (2020). Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nurusshalikhah Dina Ika. (2015). Diskriminasi Hak Kerja Terhadap Kaum Transgender. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Ridu Vincent Roy. (2019). Hegemoni Pelaku Kekerasan terhadap Lelaki Feminin di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rizal Khairul. (2016). Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry.
- Santoso Meilanny Budiarti. (2015). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Pekerja Sosial* Vol. 6, Nomor 2, 154-272.
- Setiawati Sri. (2016). Jaringan Sosial Organisasi Lesbian, Biseksual dan Transgender: Studi Kasus Ardhanary Institute di Jakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 18 (2), 153-171.
- Setyorini A. (2011). Performativitas Gender dan Seksualitas dalam Weblog Lesbian di Indonesia. *Kawisatara* Vol. 1 (2), 101-212.
- SujanaI Nyoman, Setyawati Komang Arini, & Ujanti Ni Made Puspasutari. (2018). The Existence of The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Community in The Perspective of a State Based on Pancasila. *Jurnal MIMBAR HUKUM* Vol. 30, Nomor 1, 127-139.

- Wahyuni Sri. (2012). Kekerasan pada Gay di Kota Surakarta: Bentuk dan Usaha-Usaha Gay dalam Menghadapinya. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Wijaya Windy. (2015). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Peran Komunitas LGBT dalam Mendukung Pariwisata di Bali: Studi Kasus di Kelurahan Seminyak, Kuta. Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, 223.
- Yansyah Roby, & Rahayu. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. Law Reform Vol. 14, No. 1, 345.
- Yuliana E. (2014). Strategi Mempertahankan Eksistensi Komunitas Virginitas. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumber Internet dan Webinar :

- Silvy. (2020). Kondisi Kelompok Rentan Masa Pandemi. Semarang: Disampaikan pada Webinar " Antara Covid-19 dan Kelompok Rentan ".
- Amalia Shafira. 2019 <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>. Diakses pada 02 Februari 2021
- Ariefana Pebriansyah. 2015 <https://amp.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-di-indonesia>. Diakses pada 19 Juli 2020
- Atmoko Andreas Fitri. 2016 <https://www.hrw.org/id/report/2016/08/10/292433>. Diakses pada 1 Maret 2021
- ErwantiMarlinda Oktavia. 2018 <https://news.detik.com/berita/d-4290206/hnw-minta-jokowi-segera-terbitkan-aturan-larangan-lgbt>. Diakses pada 20 September 2020
- Khalik Abdul. 2008 <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url>

=<https://www.thejakartapost.com/news/2008/03/27/islam-039recognizes->.
Diakses pada 27 Juli 2020

ManafeI manuel Nicolas. 2016 <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2016/02/05/pbnu-lgbt-bertabrakan-dengan-agama-dan-fitrah-manusia>. Diakses pada 20 Agustus 2020

Purbaya Angling Adhitya. 2019 <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4764169/incar-gay-3-pelaku-pemerasan-diciduk-polisi-di-semarang>. Diakses pada 19 September 2020

Putra M. Andika. 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200114071325-20-465076/suara-warga-soal-polemik-razia-lgbt-di-depok>. Diakses pada 27 Juli 2020

Rakhmat Ioanes. 2016 <https://islamlib.com/gagasan/lgbt-agama-teks-alkitab-dan-temuan-sains-modern/>. Diakses pada 12 September 2020

Saputra Imam Yuda. 2019 <https://m.solopos.com/lgbt-semarang-curhat-kerap-dapat-diskriminasi-pemkot-siap-turun-tangan-993468/amp>. Diakses pada 20 November 2020

Yulius Hendri. 2016 <https://www.rappler.com/world/sejarah-gerakan-gay-indonesia-homoseksualitas>. Diakses pada 15 Februari 2021

LAMPIRAN



Foto 1. Perayaan dan Kajian memperingati IDAHOT bersama Anggota dan Jaringan Sosial 2018.



Foto 2. Diskusi Monitoring Kasus dan Hukum LGBTIQ Semarang Bersama LBH Semarang.



Foto 3. Keterlibatan Rumah Pelangi Indonesia sebagai Pemateri “Keadilan Gender dan LGBTIQ” pada Diskusi KOPRI UIN Walisongo.



Foto 4. Rumah Pelangi Indonesia sebagai Pemateri Diskusi “Queer and Religion” yang diadakan dipoghrc.



Foto 5. Wawancara dengan GR sebagai Pendiri dan Program Manager
Rumah Pelangi Indonesia.



Foto 6. Diskusi Rumah Pelangi Indonesia dan Seluruh Komunitas di Kota
Semarang dalam rangka persiapan “Hari Perempuan Internasional 2020”.



Foto 7. Layanan Pengaduan Korban Kekerasan berbasis SOGIE-SC via Facebook.



Foto 8. Wawancara dengan YI sebagai Relawan Aktif Rumah Pelangi Indonesia dan Relawan Kesehatan Reproduksi Kota Semarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Anggita Widya Rezanti
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 24 Agustus 1999
Nama Ayah : Wisnu Broto Susanto
Nama Ibu : Sri Widayati
Alamat : Jl. Pucang Jajar Timur VI No. 14 RT
04/RW 21, Kec. Mranggen, Kab. Demak
No. Hp : 082135821882
Alamat E-mail : anggitaw042@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

Riwayat Pendidikan

1. SD N Batusari 05 : 2011 (Lulus)
2. SMP N 3 Mranggen : 2014 (Lulus)
3. SMA N 11 Semarang : 2017 (Lulus)

C. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa REFERENCE FISIP UIN Walisongo (2017-2021)
2. HMJ Sosiologi FISIP UIN Walisongo (2018-2019)
4. PMII Rayon FISIP UIN Walisongo (2017-2019)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 14 April 2021



(Anggita Widya Rezanti)